



# **Landasan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak:**

*Paradigma, teori, dan Kebijakan*



Direktori Dik:  
Fakultas Ilmu Keolahragaan  
Universitas Negeri Yogyakarta

**Prof. Dr. Wawan Sundawan Suherman, M.Ed.**

Landasan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak:  
Paradigma, Teori, dan Kebijakan

Oleh: Prof. Dr. Wawan Sundawan Suherman, M.Ed.

ISBN : 978-602-8429-75-7

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip  
atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku  
tanpa izin tertulis dari penerbit.



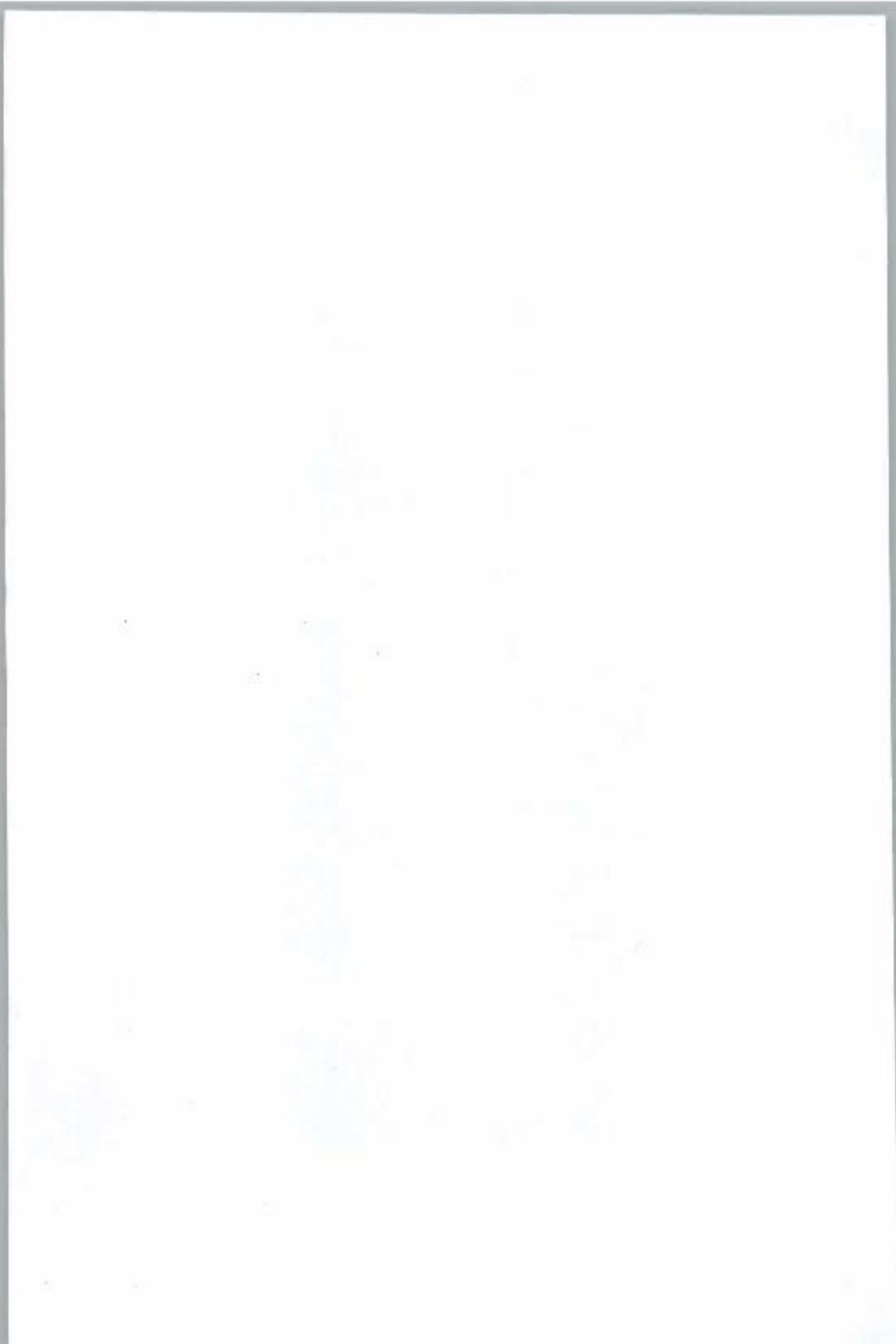
Fakultas Ilmu Keolahragaan  
Universitas Negeri Yogyakarta  
Jl. Colombo No. 1 Karangmalang  
Yogyakarta 55281  
Telp/Fax: 0274-513092

**LANDASAN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK:  
PARADIGMA, TEORI, DAN KEBIJAKAN**



Oleh:  
**Prof. Dr. Wawan Sundawan Suherman, M.Ed**

**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**





## PRAKATA

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Illahi Rabbi atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul "Landasan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak: Paradigma, Teori, dan Kebijakan". Sebagian besar bahan buku ini berasal dari Disertasi penulis dengan judul *Paradigma dan Kebijakan Pendidikan Taman Kanak-kanak: Studi Multikasus Tiga Tipe Taman Kanak-kanak*. **Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, 2012.**

Buku ini dapat dijadikan bahan referensi dan landasan bagi penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak di Indonesia agar penyelenggaraan pendidikan TK memperhatikan paradigma, teori, dan kebijakan pendidikan. Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan TK memiliki landasan yang kuat dan kokoh serta mempraktikkan proses pendidikan yang terpercaya karena menggunakan paradigma pendidikan yang jelas, teori pendidikan yang teruji dan dipahami oleh para penyelenggara, dan menerapkan kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah. Karenanya, buku ini dapat menjadi acuan untuk mendorong seluruh penyelenggara pendidikan TK supaya menjalankan proses-proses pendidikan secara sistematis dan bermutu untuk menghasilkan insan cendikia Indonesia seutuhnya. Oleh sebab itu, buku ini sangat layak dan penting untuk dimiliki dan dipelajari oleh penyelenggara Taman Kanak-Kanak di seluruh Indonesia. Buku ini dapat pula dijadikan bahan kuliah bagi mahasiswa S1 dan S2 yang mengambil program studi pendidikan anak usia dini.

Karya ilmiah berupa buku ini memiliki makna penting sebagai pengejawantahan dari hak kekayaan intelektual karena buku ini telah dicatatkan dalam Daftar Umum Ciptaan Kemenkumham RI dengan nomor pencatatan 089081, jenis ciptaan buku. Pencatatan Hak Cipta

dilakukan untuk mencegah terjadinya plagiarisme dan pengambilan keuntungan individu lain yang menyebarluaskan untuk mendapatkan materi dari hasil penjualan dan pembeliannya.

Sehubungan dengan hal itu, buku ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Seperti telah dikemukakan di atas, bahan utama buku ini berasal dari Disertasi yang penulis susun, karenanya penulis menghaturkan terima kasih kepada kedua promotor, yaitu Prof. Suyata, Ph.D., dan Prof. Dr. Endang Ekowarni. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, pengelola, guru, dan siswa ketiga TK yang kami samarkan namanya, tempat penelitian yang berlasung. Penulis menghaturkan terima kasih kepada semua pihak, yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas bantuan dan dukungan dalam segala cara dan bentuk. Tegur sapa dari sidang pembaca sangat kami harapkan karena usulan dan masukan perbaikan akan sangat bermanfaat untuk memperbaiki kekurangan buku ini. Semoga segala amal kebaikan Ibu/Bapak/Saudara mendapatkan limpahan balasan yang tak terhingga dari Rabb yang maha penyayang.

Yogyakarta, September 2017  
Penulis.



## SURAT PENCATATAN CIPTAAN



### REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

#### SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang tentang perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (tidak melandungi kekayaan intelektual lainnya), dengan ini menerangkan bahwa hal-hal tersebut di bawah ini telah tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan:

- I. Nomor dan tanggal permohonan : C00201704239, 29 September 2017
- II. Pencipta  
Nama : Prof. Dr. WAWAN SUNDAWAN SUHERMAN, M.Ed.  
Alamat : Griya Purwa Asri C 312, Purwamartani  
Kalenan, Sleman, D.I. Yogyakarta.  
Kewarganegaraan : Indonesia
- III. Pemegang Hak Cipta  
Nama : Prof. Dr. WAWAN SUNDAWAN SUHERMAN, M.Ed.  
Alamat : Griya Purwa Asri C 312, Purwamartani  
Kalenan, Sleman, D.I. Yogyakarta.  
Kewarganegaraan : Indonesia
- IV. Jenis Ciptaan : Buku
- V. Judul Ciptaan : **LANDASAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
TAMAN KANAK-KANAK**
- VI. Tanggal dan tempat diumumkan  
untuk pertama kali di wilayah  
Indonesia atau di luar wilayah  
Indonesia : 01 September 2013, di Yogyakarta
- VII. Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung  
hingga 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta  
meninggal dunia.
- VIII. Nomor pencatatan : 089081

Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam Daftar Umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat. Menteri tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang tercatat. (Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)

d.s. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
s.d.  
DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI

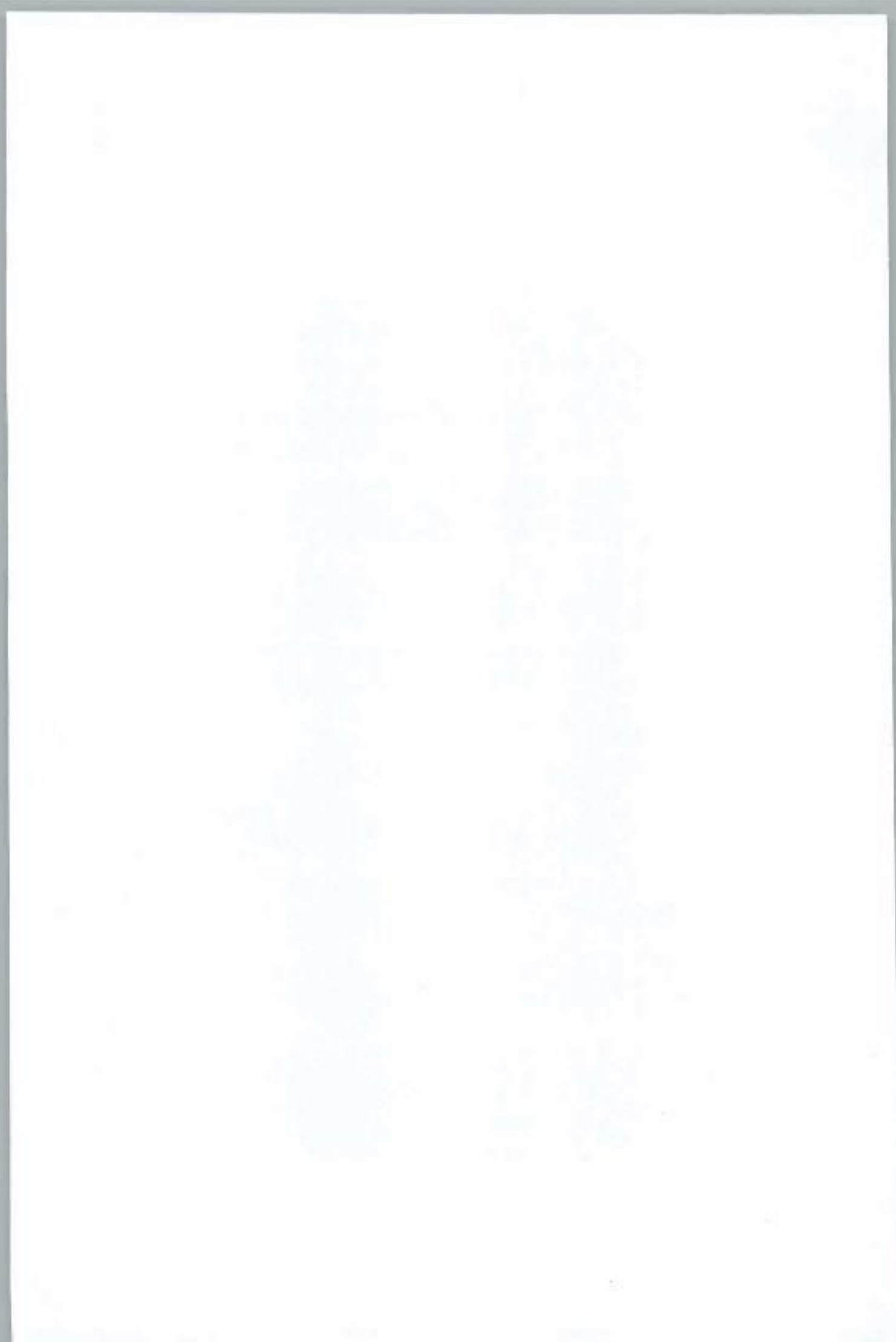
Dr. Dra. Erni Widhyastari, Apt., M.Si.  
NIP. 196003181991032001

## DAFTAR ISI

	Halaman
PRAKATA.....	i
Surat Pencatatan Ciptaan (Hak Cipta).....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II TAMAN KANAK-KANAK.....	15
A. Pendahuluan.....	15
B. Hakikat Taman Kanak-kanak.....	16
C. Tipe Taman Kanak-kanak.....	20
D. Tokoh yang Berpengaruh terhadap Penyelenggaraan TK.....	25
BAB III PARADIGMA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK.....	33
A. Pendahuluan.....	33
B. Paradigma “Perkembangan”.....	35
C. Paradigma “Ekonomi dan Politik”.....	38
D. Paradigma “Sosial dan Budaya”.....	40
E. Paradigma “Hak Asasi Manusia”.....	42
F. Paradigma “Among Siswa”.....	45
BAB IV TEORI PENDIDIKAN TK.....	50
A. Pendahuluan.....	50
B. Teori Sumberdaya Manusia.....	53
C. Teori Revitalisasi Budaya.....	55
D. Teori Rekonstruksionisme.....	58
BAB V KEBIJAKAN PENDIDIKAN TK.....	60

A. Pengantar.....	60
B. Hakikat Kebijakan Pendidikan.....	65
C. Bentuk Kebijakan.....	68
D. Landasan Kebijakan.....	70
E. Arah Kebijakan.....	73
F. Substansi Kebijakan.....	74
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>93</b>
A. Pengantar.....	93
B. Penyelenggaraan Pendidikan TK.....	93
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Pendidikan TK .....	130
D. Kaitan Paradigma, Teori, dan Kebijakan Pendidikan dengan Penyelenggaraan Pendidikan TK.....	134
E. Penutup.....	143
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>145</b>





## **BAB I PENDAHULUAN**

Globalisasi membawa dampak yang luar biasa bagi seluruh warga dunia, tidak terkecuali Indonesia. Warga negara dan pemerintah Indonesia harus melakukan berbagai upaya agar dapat berpartisipasi aktif dan mampu mengatasi perubahan yang terus berlangsung secara cepat sebagai dampak dari globalisasi. Salah satu sektor kehidupan yang akan terpengaruh oleh dan berpengaruh terhadap globalisasi adalah pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan harus mampu mengatasi dampak negatif dari globalisasi, dan menumbuhkembangkan dampak positifnya.

Zamroni (2007: 175-178) menyatakan bahwa globalisasi akan berpengaruh terhadap pendidikan, paling tidak dalam tiga hal. Pertama, tumbuhnya kecenderungan yang kuat terhadap komersialisasi dan komoditisasi pendidikan. Transformasi pendidikan akan terjadi dari proses sosial menjadi proses ekonomi pasar yang akan merekonfigurasi pendidikan layanan sosial kemasyarakatan menjadi jasa yang *marketable*. Pendidikan menjadi komoditas ekonomi yang lebih banyak memperhitungkan keuntungan dan kerugian dari sisi ekonomi daripada keuntungan dan kerugian sosial dan budaya.

Kedua, internasionalisasi pendidikan yang melahirkan proses re-lokalisasi pendidikan dengan berbagai bentuk homogenisasi kehidupan berpendidikan. Pendidikan cenderung akan semakin mengglobal dengan ukuran kualitas yang terstandar. Standarisasi pendidikan semakin kuat demi meraih mutu pendidikan dan peningkatan daya saing global. Efek samping dari kondisi tersebut, pendidikan tidak hanya menjadi semakin mahal, tetapi juga pendidikan semakin terpola secara baku.

Ketiga, kemunculan suatu kondisi baru yang mensyaratkan kemampuan bangsa untuk dapat bersaing dan mempertahankan keberadaannya dalam era global tidak lagi ditentukan oleh modal fisik berupa kekayaan alam ataupun mesin-mesin industri, tetapi lebih dipengaruhi oleh modal maya (*virtual*) yaitu *intellectual capital*, *social capital*, dan *moral capital* agar bangsa tersebut dapat mempertahankan keberadaannya, mampu bersaing, dan dapat mencapai kesejahteraan.

*Intellectual capital* merupakan modal dasar yang dimiliki manusia berupa pengetahuan, kemampuan dan kompetensi untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Modal ini diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan. *Social capital* merupakan modal sosial berupa jejaring yang sangat padu berdasarkan rasa saling percaya antar manusia sebagai komponen penting dalam bermasyarakat. Kerjasama yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat berlangsung secara sederhana dan efisien, sehingga menjadi landasan yang kokoh untuk menuju masyarakat yang sejahtera. *Moral capital* merupakan modal berupa watak berkarakter yang dimiliki oleh warga bangsa, dan ditandai oleh nilai-nilai sosial, humanis, dan religius. Watak berkarakter yang telah terpatrit secara mendalam, akan terefleksi sebagai pedoman berkehidupan dan termanifestasi dalam perilaku kehidupan sehari-hari.

Pendapat Zamroni tersebut menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peran dan fungsi ganda yang sangat strategis, seperti dua sisi mata uang logam, dalam menghadapi globalisasi. Di satu sisi, pendidikan merupakan bidang yang terkena dampak globalisasi, tetapi di sisi yang lain, pendidikan harus menjadi sektor yang mampu menyiapkan sumber daya insani agar mampu mengatasi globalisasi. Peran dan fungsi pendidikan untuk menyiapkan sumber daya insani



harus dikerjakan dan dikembangkan oleh seluruh komponen bangsa agar insan Indonesia mampu menghadapi dan mengatasi globalisasi.

Salah satu bagian atau sektor atau jenjang pendidikan yang sangat penting untuk menyukseskan upaya tersebut adalah pendidikan anak usia dini (PAUD). PAUD dipercaya akan memberikan sumbangan yang penting bagi penyiapan sumber daya insani. PAUD diperlukan sebagai fondasi bagi pelaksanaan pendidikan selanjutnya. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Inklusif UNESCO (2005) menyatakan bahwa PAUD di Indonesia memiliki lima jenis layanan, yaitu (1) Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA), (2) Kelompok Bermain (KB), (3) Taman Penitipan Anak (TPA), (4) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan (5) Bina Keluarga Balita (BKB). Penjelasan kelima jenis layanan PAUD adalah sebagai berikut.

Pertama, TK/RA adalah pelayanan PAUD terutama disediakan untuk anak usia 4+ - 6+ Tahun, tetapi RA menekankan pada pengajaran agama Islam. Baik TK maupun RA berkembang pesat belakangan ini (kondisi tersebut ditunjukkan dengan kenaikan tingkat partisipasi kasar dari 6% pada tahun 1970 menjadi 19% pada tahun 2000), namun aksesibilitasnya masih terbatas bagi orang-orang tertentu saja.

Kedua, Kelompok Bermain menyediakan pendidikan untuk anak usia 2+ - 6+ tahun. Namun, di daerah perkotaan Kelompok Bermain cenderung untuk kelas junior yaitu untuk anak usia 2+ dan 4+ tahun, sedangkan usia 4 - 6 tahun di TK atau RA, penekanannya pada kegiatan bermain. Bagi daerah yang tidak ada TK atau RA, Kelompok Bermain semata-mata nama dari pelayanan pendidikan setengah hari untuk anak 2+ - 6+ tahun.

Ketiga, TPA menyediakan pendidikan untuk anak usia 3 bulan sampai 6 tahun karena orang tua mereka (terutama Ibu) bekerja.



Taman Penitipan Anak dibangun dekat tempat kerja orang tua. Namun demikian, terjadi pergeseran fungsi TPA di daerah perkotaan, lama-lama TPA menjadi kegiatan pendidikan yang menyediakan kebutuhan mendidik dan merawat bagi ibu-ibu pekerja yang berpenghasilan tinggi, sementara fungsi TPA di pedesaan masih didominasi oleh fungsi kekeluargaan bagi anak.

Keempat, Posyandu pada dasarnya merupakan pusat pelayanan kesehatan bagi ibu-ibu hamil dan menyusui, serta anak-anaknya untuk menerima perawatan kesehatan (misalnya gizi tambahan, imunisasi dan lain-lain). Saat ini, fungsi Posyandu telah berkembang menjadi pusat layanan yang lebih luas bagi ibu-ibu dan balitanya. Mereka datang 2 kali sebulan bukan saja untuk menerima perawatan kesehatan, tetapi juga untuk belajar menjadi orang tua yang memberikan pengasuhan secara memadai bagi anak-anaknya, khususnya anak usia dini.

Kelima, Bina Keluarga Balita (BKB). Tujuan utama dari BKB adalah menyediakan informasi bagi ibu-ibu mengenai keterampilan menjadi orang tua yang cakap – bagaimana membesarkan dan mengawasi perkembangan fisik, emosi, intelektual anak usia dini. Saat ini, BKB disatukan dengan Posyandu dengan menekankan kembali peran dan fungsi orangtua agar terampil melayani anaknya yang masih usia dini. Baik Posyandu maupun BKB dikelola oleh kader yang terlatih.

Akhir-akhir ini, PAUD terus mendapatkan perhatian yang meningkat dari orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Selain karena seluruh pemangku kepentingan pendidikan menyadari bahwa PAUD masih perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya, juga telah muncul kesadaran bahwa peran dan fungsi PAUD sangat menentukan keberlanjutan pendidikan anak-anak. Hal ini sejalan dengan Laporan *The section of ECE and Inclusive Education UNESCO (2003)* pada



Pertemuan Menteri Negara E-9 V di Kairo Mesir tahun 2003, yang menyampaikan bahwa Indonesia masih sangat membutuhkan program PAUD, sehingga pemerintah dan masyarakat selayaknya terus memperhatikan dan memprioritaskan pengembangan PAUD. Pemerintah Indonesia perlu memprioritaskan peningkatan kuantitas dan kualitas PAUD, terutama pengurangan kesenjangan kuantitas dan kualitas antara PAUD di pedesaan dan PAUD di perkotaan.

Permasalahan lainnya yang dihadapi oleh program PAUD adalah penyediaan layanan PAUD sebagai implementasi dari visi "*learning begins at birth*" mengalami kendala di negara-negara berkembang (E-9). Kendala tersebut disebabkan oleh ibu-ibu dari anak-anak sasaran program tersebut masih banyak menderita buta huruf. Akibatnya, petugas kesulitan untuk memobilisasi ibu-ibu tersebut sebagai pelaksana kunci dari pendidikan anak sejak dini. Agar implementasi program tersebut berhasil, maka upaya itu harus disertai dengan berbagai program pendukungnya, seperti disarankan Kamerman (2002) agar program dan kebijakan PAUD dibarengi dengan program pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan ibu dan anak, dan program yang dijalankan memperhatikan perubahan struktur dalam keluarga.

Untuk memperkuat implementasi pembangunan PAUD, Konvensi Hak Anak dan Pendidikan untuk Semua (*Children's Right and Education for All*) mendorong pemerintahan di setiap negara E-9 untuk membuat landasan hukum bagi PAUD dan menyusun program untuk memajukan PAUD di negara masing-masing. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan anjuran tersebut, dan atas kesadaran dan komitmen sendiri telah menetapkan PAUD sebagai salah satu bidang prioritas dalam pembangunan nasionalnya, dan telah memasukkan PAUD ke dalam kerangka kebijakan pemerintah. PAUD telah diatur dalam Undang-Undang nomor 20

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1 (14) berbunyi:

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Selanjutnya, pasal 28, mengakui bahwa PAUD sebagai langkah awal untuk pendidikan dasar. PAUD dapat dilaksanakan melalui cara formal, non formal dan informal, dengan merangkul semua jenis layanan pendidikan yang ada di Indonesia, seperti TK/RA, KB, TPA, Posyandu dan BKB.

Dari lima jenis layanan PAUD, TK/RA dipilih dan ditetapkan sebagai topik penelitian yang akan dilakukan. Pemilihan ini didasarkan pertimbangan bahwa TK memiliki kekhasan kedudukan dan fungsi dalam PAUD, dan memiliki pergerakan yang sangat dinamis karena ia merupakan wahana transisi yang menghantarkan anak untuk mengenal budaya sekolah dalam pendidikan formal. Karena masih dekat dengan peran ibu dalam keluarga, hampir semua pendidikan TK diampu oleh ibu-ibu. Pengamatan awal menunjukkan bahwa para ibu guru sangat sabar, telaten, dan penuh kasih sayang saat menyelenggarakan pembiasaan dan pengembangan di TK. Selain itu, karena masih masa transisi maka peran orangtua masih tetap diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan TK. Dengan demikian, diharapkan agar pendidikan TK selain menyediakan masa transisi, juga menyediakan landasan yang kokoh bagi pengembangan seluruh potensi anak.

Peletakan dasar dalam pengembangan pola pikir dan kepribadian anak akan sangat ditentukan oleh pengalaman belajar anak-anak pada masa anak berusia pra sekolah. Pengalaman belajar



yang diterima oleh anak-anak baik dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, maupun dari lingkungan TK merupakan proses belajar yang penting dan menentukan bagi perkembangan anak selanjutnya. Pertumbuhan pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan sifat anak akan tergantung pada apa yang dilihat, diperoleh, dan diajarkan oleh orang lain kepada anak pada saat ia berusia dini.

Karena pengalaman yang diperoleh anak pada masa usia dini memegang peranan penting bagi perkembangan anak, maka TK sebagai institusi PAUD perlu memperhatikan dan membekalkan pengalaman yang baik dalam proses pengasuhan dan pembiasaannya. Karenanya, TK memiliki tujuan utama untuk mengenalkan budaya belajar agar anak siap memasuki sekolah dasar. Selain itu, TK merupakan wahana pengembangan awal anak secara utuh agar membentuk landasan yang kokoh bagi anak untuk mengalami proses tumbuh kembang secara optimal. Namun demikian, praktik di lapangan menunjukkan bahwa pendidikan TK lebih diarahkan untuk membekali anak dengan kemampuan akademik agar anak memiliki kemampuan calistung (membaca, menulis, dan menghitung) untuk memasuki pendidikan dasar, bukan mengenalkan budaya belajar. Oleh sebab itu, pelaksanaan pendidikan TK melebihi kapasitas yang seharusnya dikerjakan karena memenuhi tuntutan masyarakat sehingga pembekalan kemampuan akademis calistung menjadi lebih dominan ketimbang mengenalkan budaya sekolah.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi antara paradigma dan praktik pendidikan TK. Praktik pendidikan TK lebih menonjolkan tujuan-tujuan pragmatis instrumental, seperti pembekalan kemampuan akademis calistung daripada tujuan instrinsik pendidikan, seperti pengenalan budaya belajar. Selain itu, penyelenggaraan pendidikan TK yang berlangsung saat ini belum dapat memberikan layanan secara memadai bagi seluruh anak usia



TK, terutama kepada anak-anak yang kurang beruntung karena biaya pendidikan TK dipandang sesuatu yang mahal. Selain itu, sistem pendidikan TK saat ini kurang memberikan ruang bagi tumbuhnya pendidikan alternatif karena berorientasi pada kelas menengah kota.

Salah satu penyebab timbulnya persoalan tersebut adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan TK didisain secara seragam dan nasional serta harus tunduk pada kebijakan yang berlaku secara nasional dan elitis. Kebijakan penyeragaman dan ketidakrelevanan dengan kondisi nyata di lapangan menyebabkan praktik pendidikan TK menghadapi kendala dalam upaya pengembangannya. Permasalahan menjadi semakin rumit karena problematika ketidakmampuan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan TK secara merata. Hal ini tidak hanya menyebabkan terjadinya kesenjangan baik antar-jenjang pendidikan maupun antar-daerah, tetapi juga mengakibatkan rendahnya pengalokasian anggaran pendidikan bagi TK. Selain itu, kebijakan pendidikan belum menunjukkan keberpihakan yang proporsional kepada golongan yang kurang mampu.

Ketidakjelasan kebijakan pendidikan TK seperti itu tidak terjadi di kabupaten Sleman. Pemkab Sleman berupaya menetapkan berbagai kebijakan pendidikan TK yang populis untuk mendorong perkembangan penyelenggaraan pendidikan TK. Sleman merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Sleman berada di bagian utara provinsi ini. Dari sisi geografis dan demografis, kabupaten Sleman merupakan daerah penyangga kota Yogyakarta. Berkaitan dengan hal itu, Pemkab Sleman dalam RKPD (2009: 8) membagi wilayahnya, berdasarkan letak kota dan mobilitas kegiatan masyarakatnya, menjadi daerah fungsi kota dengan kelompok sebagai berikut.

- 1) Wilayah aglomerasi (perkembangan kota dalam kawasan tertentu) yang meliputi Kecamatan Depok, Gamping, serta sebagian wilayah

Kecamatan Ngaglik, Ngemplak, Kalasan, Berbah, Sleman, dan Mlati sebagai wilayah aglomerasi perkotaan Yogyakarta.

2) Wilayah sub-urban (wilayah perbatasan antara desa dan kota) meliputi kota Kecamatan Godean, Sleman, dan Ngaglik, yang terletak cukup jauh dari kota Yogyakarta dan berkembang menjadi tujuan kegiatan masyarakat di wilayah kecamatan sekitarnya, sehingga menjadi pusat pertumbuhan.

3) Wilayah fungsi khusus atau wilayah penyangga (*buffer zone*) meliputi Kecamatan Tempel, Turi, Pakem, dan Cangkringan, yang merupakan pusat pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya.

Selain karena letak geografis, dan sebagian besar wilayah kabupaten Sleman strategis serta mudah dijangkau, juga berbagai kebijakan pendidikan yang dikeluarkan Pemkab Sleman mendorong banyak institusi pendidikan, dari pendidikan prasekolah sampai pendidikan tinggi, membangun kampusnya di wilayah kabupaten Sleman. Beragam penyelenggaraan pendidikan TK tumbuh subur bermunculan di wilayah kabupaten Sleman.

Selain itu, kabupaten Sleman merupakan daerah yang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat untuk pemukiman. Berbagai perumahan bermunculan di kabupaten Sleman menyebabkan penambahan jumlah penduduk berlangsung secara cepat, dan lahan pertanian berubah menjadi kawasan pemukiman. Dari pengamatan menunjukkan bahwa perumahan-perumahan tersebut cenderung dihuni oleh pasangan muda, sehingga pertumbuhan kelompok usia sekolah sangat mencolok. Kondisi ini menyebabkan kebutuhan akan PAUD, terutama TK semakin meningkat akhir-akhir ini.

Kondisi kabupaten Sleman seperti itu merupakan tantangan dan sekaligus kesempatan. Tantangan bagi Pemkab Sleman dan masyarakat warga Sleman untuk menyediakan pendidikan TK yang bermutu, dan meningkatkan kemudahan aksesibilitas pendidikan TK



bagi seluruh anak usia TK di kabupaten Sleman. Kesempatan bagi masyarakat/swasta untuk berpartisipasi menyediakan pendidikan TK yang bermutu bagi seluruh golongan masyarakat. Tampaknya, pihak masyarakat/ swasta mampu menangkap peluang dan kesempatan untuk memanfaatkan kondisi tersebut, sehingga banyak bermunculan TK swasta, baik institusi swasta umum, maupun lembaga swasta keagamaan.

Data dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY mengenai Jumlah Sekolah Provinsi DIY Tahun Pelajaran 2009/2010, dan Renstra Dinas Dikpora 2011 – 2015 mengenai jumlah TK di Sleman tahun 2011 menunjukkan kondisi per-TK-an kabupaten Sleman sebagai berikut.

Tabel 1. Kondisi Taman Kanak-kanak Kabupaten Sleman

No	Klasifikasi	Negeri	Swasta	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak	4	515	519
2	Peserta Didik	429	25.927	26.356
3	Tenaga Pendidik	42	2.211	2.253
4	Tenaga Kependidikan	12	258	270

Sumber: Renstra Dinas Dikpora 2011 – 2015

Walaupun TK di Sleman sudah berjumlah 519 pada tahun 2011, tetapi keberadaannya belum mampu menampung seluruh anak usia TK yang berada di kabupaten Sleman. Padahal, sejak tahun 2009 Pemkab Sleman (RKPD 2009: 43) telah menetapkan prioritas pembangunan daerah berupa peningkatan kuantitas dan kualitas PAUD, serta mempermudah akses terhadap layanan PAUD. Program prioritas tersebut masih terus dilaksanakan karena kenyataan menunjukkan bahwa jumlah anak usia 6 tahun yang belum terlayani

oleh lembaga PAUD/TK masih cukup besar (Renstra Dinas Dikpora 2011 – 2015). Selain itu, data yang diperoleh dari Bappenas (2008) menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar TK secara nasional menunjukkan angka sekitar 40%. Angka tersebut tergolong masih rendah bila dibandingkan dengan APK jenjang pendidikan di atasnya.

Selain kekurangmampuan menampung semua anak usia TK, sebagian besar penyelenggaraan pendidikan TK belum memiliki kualitas seperti yang diharapkan oleh standar persyaratan yang ditetapkan. Sebagai acuan kualitas penyelenggaraan TK, pemerintah telah mengeluarkan standar PAUD 2009 dalam bentuk Permendiknas nomor 58 tahun 2009. Standar PAUD terdiri atas empat kelompok standar, yaitu: (1) standar tingkat pencapaian perkembangan, (2) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (3) standar isi, proses, dan penilaian, serta (4) standar sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Tampaknya, keberadaan sebagian besar TK lebih pada pemenuhan kebutuhan dasar akan PAUD yang semakin hari semakin meningkat, seiring peningkatan kesadaran para orangtua akan pentingnya pendidikan anak usia dini.

Aspek lain yang ditunjukkan oleh data tentang jumlah TK yang dikemukakan di atas adalah bahwa jumlah TK yang dikelola masyarakat atau pihak swasta jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah TK yang dikelola oleh pemerintah atau negara. Lebih lanjut, Dinas Dikpora DIY (2010) menyatakan bahwa bila dirinci lebih dalam lagi berdasarkan namanya, TK swasta keagamaan berjumlah 52% dari seluruh TK swasta. Dengan demikian, TK yang dikelola oleh lembaga swasta keagamaan lebih banyak dibandingkan dengan TK swasta umum. Pertumbuhan TK yang dikelola oleh pihak swasta keagamaan cukup menakutkan. Kondisi tersebut tampaknya disebabkan oleh peningkatan kesadaran orangtua akan pentingnya pembekalan nilai-nilai, pengetahuan, dan kemampuan keagamaan



bagi anak-anaknya sejak usia dini. Karenanya, mereka menyekolahkan anaknya ke TK swasta keagamaan yang membekalkan pengetahuan dan kemampuan keagamaan.

Selain TK swasta keagamaan, juga terdapat TK yang mengalami perkembangan cukup pesat yaitu TK Terpadu. TK Terpadu merupakan tipe TK yang memberikan layanan pengasuhan hampir sepanjang hari atau dari pagi hari sampai sore hari. Selain pengasuhannya sehari penuh, TK Terpadu melaksanakan proses pendidikan dengan kurikulum terintegrasi antara muatan akademis dan muatan keagamaan. Selain pengembangan kemampuan akademis, anak-anak mengalami pembiasaan kegiatan amaliah ibadah keagamaannya. Proses pengasuhan dan pengembangan demikian diharapkan akan menumbuhkembangkan seluruh potensi anak, sehingga mereka memiliki kesiapan yang mantap untuk memasuki pendidikan formal selanjutnya, dan seluruh potensi kecerdasannya memperoleh kesempatan untuk berkembang secara seimbang lebih lanjut.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan TK semestinya merupakan sebuah praksis pendidikan. Karena penyelenggaraan pendidikan merupakan praktis pendidikan, maka penyelenggaraan pendidikan TK mesti dilandasi oleh ideologi atau falsafah yang kuat, dalam hal ini paradigma dan teori pendidikan. Selain dilandasi oleh paradigma pendidikan dan teori pendidikan, penyelenggaraan pendidikan TK perlu didukung oleh kebijakan pendidikan yang memadai. Kebijakan pendidikan dikatakan memadai apabila kebijakan tersebut memiliki bentuk yang formal, substansi yang lengkap, dan dapat diimplementasikan oleh pemangku kepentingan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan akan berjalan efektif apabila memiliki bentuk yang formal, substansi yang sesuai dengan kondisi faktual dan diimplementasikan secara tepat oleh



penyelenggara pendidikan. Kebijakan pendidikan yang dikeluarkan Pemerintah dapat bersifat populis, elitis, atau belum tentu mendukung penyelenggaraan pendidikan TK, karena kadang-kadang penetapan kebijakan pendidikan TK dipengaruhi oleh berbagai kepentingan di luar kepentingan pendidikan, sehingga tidak jelas substansinya dan kurang relevan dengan kondisi nyata di lapangan.

Dengan demikian, agar dapat berjalan dengan baik dan mampu melayani kebutuhan masyarakat, maka penyelenggaraan pendidikan TK perlu dilandasi oleh paradigma pendidikan yang jelas, teori pendidikan yang sesuai, dan kebijakan pendidikan yang populis dan memihak. Oleh karena itu, buku ini akan mendiskusikan Landasan penyelenggaraan pendidikan TK yang berkaitan dengan Paradigma pendidikan TK yang selayaknya dipergunakan, Teori pendidikan TK yang perlu dipertimbangkan, dan kebijakan pendidikan TK yang perlu disusun dan diimplementasikan.

Buku ini akan membahas apa yang dimaksud dengan taman kanak-kanak dan landasan penyelenggaraan Taman kanak-kanak yang terdiri dari paradigma, teori, dan kebijakan pendidikan. Untuk mempermudah pembaca mengikuti alur pikir yang dikembangkan, buku ini disajikan dalam urutan pendahuluan yang berisi ulasan singkat tentang substansi isi buku. Kemudian, pembahasan tentang Taman kanak-kanak berisi hakikat taman kanak-kanak, tipe-tipe taman kanak-kanak, dan tokoh-tokoh yang berpengaruh terhadap perkembangan dan penyelenggaraan taman kanak-kanak. Selanjutnya bahasan mendiskusikan Paradigma penyelenggaraan TK memuat perbincangan tentang lima paradigma yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan TK, yaitu Paradigma perkembangan, paradigma ekonomi dan politik, paradigma sosial dan budaya, paradigma hak asasi manusia, dan paradigma among putro. Diskusi dilanjutkan dengan bahasan tentang teori pendidikan yang meliputi

Teori sumberdaya manusia, Teori revitalisasi budaya, dan Teori rekonstruksionisme. Diskusi dilengkapi dengan bahasan tentang kebijakan pendidikan yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan TK yang meliputi hakikat kebijakan pendidikan, bentuk kebijakan pendidikan, landasan kebijakan pendidikan, arah kebijakan pendidikan, dan substansi kebijakan pendidikan. Diskusi diakhiri dengan penutup untuk merangkum hasil pembahasan dalam buku ini.



## **BAB II**

### **TAMAN KANAK-KANAK**

#### **A. Pendahuluan**

Sebelum mendiskusikan landasan penyelenggaraan pendidikan TK secara mendalam, bahasan akan dimulai dengan hakikat taman kanak-kanak. Taman kanak-kanak merupakan pendidikan prasekolah yang diselenggarakan secara formal. Sesuai namanya, Taman kanak-kanak diharapkan menjadi taman oase yang menyenangkan dan memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak. Kondisi tersebut sesuai dengan harapan perintis pendidikan TK yaitu Froebel karena harapannya itulah beliau menamakannya Kindergarten. Taman kanak-kanak mengalami perkembangan yang pesat termasuk di Indonesia seiring dengan peningkatan kesadaran orangtua akan pentingnya pendidikan anak usia dini bagi anak-anaknya.

Seiring dengan peningkatan kebutuhan dan permintaan masyarakat, bermunculan beragam tipe TK. Namun peningkatan kuantitas dan tipe TK belum dibarengi dengan peningkatan kualitas pendidikan, malah kadang terjadi kesalahkaprahan dalam praktik pendidikan TK. Taman kanak-kanak yang seharusnya lebih menitikberatkan pada pengenalan budaya sekolah, malah memfokuskan pada pembekalan akademik untuk persiapan masuk sekolah dasar, sehingga calistung menjadi menu utama. Kondisi ini menggejala di tengah-tengah masyarakat, baik karena tuntutan masyarakat ataupun upaya penyelenggara TK untuk tetap mempertahankan eksistensinya.

Memperhatikan kondisi demikian, para orangtua dan pemangku kepentingan lainnya menjadi urgen untuk memahami apa sesungguhnya hakikat pendidikan TK dan bagaimana sejarah

perkembangan TK. Selain itu, perlu pula memiliki pengetahuan tentang tipe-tipe taman kanak-kanak agar dapat menetapkan pilihan tipe TK yang sesuai dengan kebutuhan putra-putrinya. Hal penting lainnya adalah mengenal tokoh atau ahli pendidikan yang memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan pendidikan taman kanak-kanak sehingga kita dapat memahami pergulatan pemikiran dan sepakterjangnya untuk kemajuan pendidikan taman kanak-kanak. Karena itulah, bagian berikut akan memaparkan atau mendiskusikan hal-hal tersebut.

## **B. Hakikat Taman Kanak-kanak**

Taman kanak-kanak (TK) merupakan salah satu layanan PAUD yang dilaksanakan secara formal, dan disediakan bagi anak sebagai persiapan menuju pendidikan dasar. Berkembang mulai pada awal abad ke-19, TK merupakan perwujudan dari ide dan praktik yang dirintis oleh Robert Owen di Inggris, Johann H. Pestalozzi di Swiss dan siswanya Friedrich Froebel di Jerman, serta Maria Montessor di Itali. Taman kanak-kanak sangat memperhatikan ranah emosional dan spiritual anak, mendorong pemahaman diri melalui aktivitas bermain, dan memberikan kebebasan yang lebih luas daripada yang diharuskan menurut pemikiran orang dewasa.

Pada tahun 1837, Froebel membuka TK di Blankenburg, Prusia, "sebuah institusi pelatihan psikologis bagi anak-anak kecil dengan memanfaatkan bermain sebagai wahananya." Froebel menyebut institusi pendidikannya dengan nama "Kindergarten" atau "Taman kanak-kanak". Dengan memilih nama "Taman kanak-kanak" atau "Kindergarten", Froebel ingin menyampaikan pesan bahwa institusi yang ia ciptakan merupakan suatu tempat nan indah dan menyenangkan bagi anak-anak. Di tempat inilah,



anak-anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara bebas layaknya taman nan indah tempat persemaian bunga-bunga yang tumbuh dengan subur, menghasilkan bunga yang harum semerbak. Selama 25 tahun setelah Froebel meninggal, TK berkembang ke seluruh Eropa, Amerika Utara, Jepang, dan bagian dunia yang lainnya (Encyclopaedia Britannica Online, 2009).

Taman kanak-kanak merupakan sebuah institusi pendidikan yang mengasuh anak sesuai dengan sifat-sifatnya; menampilkannya dengan bunga di sebuah taman; memahaminya sebagai hubungan segitiga antara Tuhan, manusia, dan alam; menyediakan wahana bagi pengembangan para penghuninya, untuk melatih panca inderanya, dan untuk mengembangkan kekuatan fisiknya. Sebuah institusi pendidikan tempat seorang anak bermain dengan anak-anak lainnya (Froebel dikutip Morrison, 1988: 259).

Mansur (2009: 127-128) menambahkan bahwa TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia empat tahun sampai enam tahun. Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA) adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan umum dan pendidikan keagamaan Islam bagi anak usia empat tahun sampai enam tahun. Dari ketiga jenis PAUD pada jalur pendidikan formal, yaitu TK, RA, dan BA, penelitian akan difokuskan pada TK saja. Karena pilihan fokus penelitian tersebut, dan bertujuan untuk efisiensi maka penulisan Taman kanak-kanak selanjutnya akan ditulis TK.

Lebih rinci, penjelasan mengenai TK diatur dalam Undang-undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab VI bagian keenam Pasal 28: (3) Pendidikan anak usia dini pada



jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.

Lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah, Bab 1 Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa TK merupakan salah satu bentuk pendidikan dini yang diperuntukkan bagi anak usia empat tahun sampai enam tahun yang merupakan persiapan untuk memasuki pendidikan dasar.

Selain itu, TK sebagai sebuah institusi pendidikan formal perlu menjaga kualitas baik dari sisi layanan akademik, administratif, maupun dari sisi pengelolaan. Dengan kualitas yang baik, TK akan menghasilkan lulusan yang diharapkan dan memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Morrison (1988: 259-260) memberikan ciri-ciri TK berkualitas yang memiliki program pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan tahapan perkembangan anak sebagai berikut.

- (1) *Parents and school personnel work cooperatively to build a partnership between home and school that will support the child throughout the school experiences;*
- (2) *Children experience a planned, child centered environment that encourages learning through exploration and discovery;*
- (3) *Children have access to multilevel experiences and activities of varying degrees of complexity;*
- (4) *Children can make choices and decisions within the limits of the materials provided;*
- (5) *Children learn there is more often than one right answer. Divergent thinking is developed and encouraged;*
- (6) *The children's own language, experiences, and stages of development form the basis of reading and writing activities;*
- (7) *Children learn to enjoy books and the appreciate literacy language through a daily storytime, creative dramatic, and repeated opportunities to listen and learn simple rhymes and other poems;*
- (8) *Children participate in daily, planned activities fostering both gross and fine motor development;*
- (9) *Children develop mathematical understanding through use of familiar materials such as sand, water, unit blocks and counters;*
- (10) *Children's curiosity*

*about natural, familiar elements forms the basis of scientific observations, experimentation and conclusions; (11) Experimentation, enjoyment, and appreciation of varied forms of music are encouraged on daily basis; (12) Art expression is encouraged through the use of a wide assortment of media integrated within the daily curriculum; (13) All the activities are planned to promote a positive self image and attitude toward school and peers; and (14) Play is respected for its value as an appropriate learning medium for children of this age.*

Dengan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, Taman Kanak-kanak akan mampu menjadi landasan yang kokoh bagi anak untuk mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang memadai serta mendorong pemerolehan pengetahuan, kemampuan baru seperti mereka memperolehnya sebelum usia lima tahun dan sebelum memasuki proses pendidikan di TK.

Gardner (dikutip Suyata, 2010) mengingatkan bahwa usia dini merupakan tahapan belajar yang paling berhasil. Gardner menyarankan agar setiap guru mampu mengambil hikmah dari keberhasilan belajar anak usia dini sebelum mereka mencapai usia lima tahun. Mengapa anak-anak usia sebelum lima tahun mampu belajar dengan baik? Jawabannya adalah karena adanya belajar dan mengajar informal, hubungan antar personal yang hangat, kegiatan bermotivasi tinggi, umpanbalik secara langsung, dan *learning by doing and reflecting*. Setiap anak belajar dalam lingkungan budaya keseharian yang mereka kenali.

Taman Kanak-kanak selayaknya mampu mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki anak atau dalam bahasa Gardner disebut dengan Kecerdasan Majemuk. Karenanya, TK harus mampu menyediakan suasana dan lingkungan yang memadai agar seluruh potensi anak dapat berkembang secara optimal. Guru TK



memegang peranan kunci untuk memberikan fasilitasi agar seluruh potensi anak berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhannya.

Agar penyelenggara TK memiliki pedoman dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan kualitas institusinya, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan standar PAUD berbentuk Permendiknas nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini. Standar PAUD 2009 terdiri dari empat kelompok standar, yaitu (1) standar tingkat pencapaian perkembangan peserta didik, (2) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (3) standar isi, proses, dan penilaian, dan (4) standar sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.

### **C. Tipe Taman Kanak-kanak**

Orangtua harus menyediakan pola pengasuhan dan lingkungan yang kondusif bagi anak agar semua potensi yang dimilikinya dapat berkembang secara seimbang. Haywood (1986: 75-76) menambahkan bahwa pendidik harus memahami pengaruh faktor lingkungan terhadap tumbuh kembang anak. Selain memahami dan menyiapkan lingkungan, Kelly & Melograno (2004) menyatakan bahwa prasyarat setiap usaha untuk memaksimalkan belajar siswa adalah pengetahuan tentang kesiapan siswa untuk belajar. Siswa harus siap secara jasmani, sosial, emosional, dan kognitif untuk belajar.

Selain harus menyiapkan lingkungan dan memperhatikan kesiapan siswa, pendidikan di TK tidak boleh hanya mementingkan salah satu kecerdasan saja. Penyelenggaraan pendidikan di TK harus menjadi upaya untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Agar dapat mewadahi tumbuh kembang anak dan memberikan kesempatan



bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam pendidikan TK, berbagai tipe TK berkembang.

Pengelompokan Tipe TK bukanlah pekerjaan mudah untuk dilaksanakan apabila tidak dibekali dengan persyaratan yang jelas karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Karenanya, pengklasifikasian tipe TK akan dilakukan berdasarkan penyelenggara, sumber dana dan pengelolaannya, waktu penyelenggaraan pembelajaran, dan pengemasan bahan ajar dan metode pembelajarannya. Berdasarkan persyaratan pengklasifikasian tersebut terdapat enam tipe TK sebagai berikut.

#### 1) Tipe Negeri

TK Negeri adalah tipe TK yang diselenggarakan dan dikelola oleh pemerintah. Sumber utama pembiayaan penyelenggaraan dan pengelolaan TK ini berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sebagian kecil berasal dari orangtua siswa dan masyarakat. Karenanya, hampir seluruh anggaran operasional TK Negeri berasal dari pemerintah, dana masyarakat biasanya sebagai pelengkap saja.

Pengimplementasian Kurikulum dan pembelajaran di TK Negeri mengikuti secara patuh seluruh kebijakan pemerintah. Seluruh pengelola dan guru merupakan pegawai negeri atau pegawai yang digaji oleh pemerintah. TK Negeri biasanya tidak terlalu bebas untuk melakukan inovasi penyelenggaraan karena sudah dipagari dengan kebijakan yang agak ketat, serta diawasi oleh pengawas yang memegang aturan teknis-mekanis.

#### 2) Tipe Swasta

TK Swasta, sesuai namanya, diselenggarakan dan dikelola oleh masyarakat. Walaupun layanan pendidikannya

diselenggarakan masyarakat, tetapi pemerintah akan tetap membantu TK tersebut dari segi kebijakan dan pembiayaan jika memenuhi persyaratan. TK ini mengandalkan sumber pembiayaan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan berasal dari masyarakat atau sponsor tertentu. Pengelola dan pendidiknya sebagian besar pegawai yayasan atau pegawai yang digaji oleh yayasan atau swasta, namun ada pula pendidik berstatus pegawai negeri yang diperbantukan ke TK tipe ini.

Di dalam TK Swasta, terdapat dua jenis yayasan pengelola, yaitu pengelola berbasis umum, dan pengelola berbasis keagamaan. Seiring dengan peningkatan kesadaran orangtua akan pentingnya penanaman nilai-nilai keagamaan sejak dini, banyak bermunculan TK Swasta berbasis keagamaan. Selain pengelolaannya, terdapat dua jenis penyelenggaraan pembelajaran, yaitu TK *Half Day*, dan TK *Full Day*.

Pengelola TK Swasta lebih luwes dalam penyelenggaraan pendidikan. Biasanya, TK swasta yang berkecukupan banyak melakukan inovasi pembelajaran sehingga mereka memiliki kualitas penyelenggaraan pendidikan lebih baik dari TK Negeri. TK Swasta dapat mengerjakan kegiatan inovasi karena mereka tidak dipagari dengan aturan yang kaku dan didukung dengan dana yang memadai. Hasil inovasi pembelajaran yang dikerjakan TK Swasta merupakan salah satu daya tarik bagi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya.

### 3) Tipe *Half Day*

Berdasarkan jenis waktu penyelenggaraan TK dapat dikelompokkan TK *Half Day* dan *Full Day*. Penyelenggara TK *Half Day* berkeyakinan bahwa pendidikan TK berfungsi untuk



menghantarkan anak untuk mengenal budaya sekolah karenanya penyelenggaraan pendidikan tidak boleh terlalu menyita waktu anak. Dengan demikian, proses pembiasaan dan pengembangan kemampuan dasar diselenggarakan setengah hari atau disebut *half day*. Morrison (1988: 262) menjelaskan TK *Half Day* sebagai berikut.

*A school district that operates a half day program usually offers one session in the morning and one in the afternoon, so that one teacher can teach two classes. Although many kindergartens are half day programs, there is not general agreement as to whether this system is best. Those who argue for the half day session say that this is all the schooling the five year old child is ready to experience and that it provides an ideal transition to all day first grade.*

#### 4) Tipe *Full Day*

Selain tipe *Half Day*, berdasarkan jenis waktu penyelenggaraan TK dapat dikelompokkan menjadi TK *Full Day*. TK tipe ini diselenggarakan selain alasan mengenalkan anak dengan budaya sekolah dan membekali anak dengan kemampuan yang dibutuhkan, juga membantu anak untuk memanfaatkan waktu yang kosong manakala tidak ada pendamping karena orangtua mereka belum berada di rumah pada siang hari. Karenanya, anak-anak akan berada di sekolah sepanjang hari sambil menunggu orangtua mereka pulang dari tempat kerjanya.

Morrison (1988: 262) menjelaskan TK *Full Day* sebagai berikut.

*A school district that operates a full day program usually offers two sessions in the morning until the afternoon. Those in favor of full day sessions generally feel that not only is the child ready for and capable of a program of this length, but that it also allows for a more comprehensive program. We also find other patterns of*

*kindergraten programs, particularly where attendance is not compulsory. Of the various attendance patterns in kindergarten programs, we might find these possibilities in a full day session.*

5) Tipe Reguler atau Umum

Berdasarkan pengemasan bahan ajar dan metode pembelajarannya, TK dapat dibagi menjadi TK Reguler dan TK Terpadu atau TK Umum dan TK Khusus. TK Reguler atau Umum biasanya memberikan pengasuhan berdasarkan kurikulum nasional, dan biasanya dikerjakan oleh TK Negeri atau TK Swasta Umum.

TK Reguler biasanya menyelenggarakan pendidikan seperti apa yang dilakukan oleh TK Paruh Waktu. TK Reguler memfokuskan perhatian pada pembekalan kemampuan dasar dan pembiasaan yang dipersyaratkan oleh kurikulum nasional. Selain itu, TK Reguler lebih menonjolkan pengenalan budaya sekolah dan pembekalan kemampuan akademis dasar kepada peserta didiknya.

6) Tipe Terpadu

TK Terpadu merupakan salah satu perwujudan dari upaya pembaharuan terhadap TK model Froebel atau model klasik lainnya. Para perintis TK Terpadu berkeinginan agar TK benar-benar dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan, menggembirakan, menarik, dan menumbuhkembangkan keingintahuan anak agar anak mengalami tumbuh-kembang sesuai dengan potensi yang dimiliki.

TK Terpadu biasanya memadukan pendidikan akademik dengan pendidikan moral, dan sosial. Anak-anak tidak hanya dibekali dengan berbagai kemampuan akademik, tetapi juga



memperoleh pembiasaan nilai-nilai moral (keagamaan) dan sosial. Seluruh potensi anak berupaya untuk dikembangkan secara selaras dan serasi. Anak akan memperoleh kesempatan untuk mengalami proses pendidikan dengan suasana belajar yang menyenangkan, ramah, dan hangat, sehingga anak berada dalam suasana belajar yang tidak membosankan dan berinteraksi secara informal dengan gurunya.

#### **D. Tokoh yang Berpengaruh terhadap Penyelenggaraan TK**

Selain Froebel, menurut Morrison (1988: 35-60) banyak ahli melakukan upaya pengembangan pemikiran dan teori pendidikan TK. Hasil pergulatan pemikiran mereka sangat mempengaruhi perjalanan dan perkembangan TK.

##### **1) Marthin Luther (1483-1546)**

Marthin Luther adalah seorang bapak reformasi pendidikan pada era *Renaissance*. Ia mengubah otoritas hirarki gereja Katholik menjadi otoritas Injil. Luther berkeyakinan bahwa orang belajar sesuai dengan bahasa ibunya. Luther percaya bahwa keluarga merupakan institusi yang sangat penting bagi pendidikan anak, sehingga ia berharap dan mendorong orangtua untuk menyediakan pengajaran keagamaan dan kejuruan (*vocational*) di rumah.

Martin Luther juga percaya bahwa sistem pendidikan perlu didukung oleh negara secara kuat agar Gereja Katholik tidak terlalu kuat mengendalikan pelaksanaan pendidikan. Karenanya, ia percaya bahwa reformasi pendidikan perlu didukung oleh gereja yang reformis.

## 2) John Locke (1632-1704)

John Locke seorang ahli pendidikan dari Inggris, ia mengembangkan Teori *Environmentalism* yang sangat mempengaruhi PAUD. Ia meyakini bahwa lingkungan bukanlah sifat-sifat bawaan yang akan menentukan jadi apa seseorang di kemudian hari. Bagi Locke, lingkungan akan membentuk pikiran seseorang, karenanya pengalaman yang diperoleh akan membentuk sifat seseorang, dan pelatihan sensori menjadi suatu instrumen yang penting dari aplikasi teori pendidikannya.

Teori yang dikembangkan John Locke disebut pula Teori "Tabula Rasa" yang memandang anak yang dilahirkan bak kertas putih. Kertas yang putih tersebut akan berubah warna akan sangat bergantung kepada lingkungannya. Karenanya, proses pembentukan kemampuan dan karakter anak sangat dipengaruhi oleh lingkungannya.

## 3) John Amos Comenius (1692-1670)

Comenius adalah seorang pembela pendidikan universal. Comenius menegaskan bahwa pendidikan harus dimulai sejak usia dini dan terus berlangsung sampai usia senja. Ia percaya bahwa pada dasarnya setiap orang memiliki sifat baik, karenanya sifat baik tersebut perlu dikembangkan melalui pendidikan.

Agar sifat baik dapat berkembang, pendidikan yang diberikan berupa pengalaman belajar yang positif, seperti kebebasan, kegembiraan, dan kesenangan. Konsep tersebut sangat berlawanan dengan konsep pendidikan berdisiplin tinggi, cenderung beratmosfir belajar yang kaku dan otoriter. Sebagian ahli berpendapat bahwa kekakuan dan otoriterian



diperlukan untuk mengendalikan kehendak alamiah anak berbuat jelek.

Selain itu, Comenius percaya bahwa proses pendidikan berlangsung selaras dengan urutan alami. Urutan alamiah adalah serangkaian urutan pertumbuhan dan perkembangan berdasarkan kronologis. Seseorang harus memperhatikan urutan tersebut agar terhindar dari pelaksanaan pembelajaran yang prematur karena anak belum memiliki kemampuan untuk menerimanya, atau anak belum memerlukannya.

#### 4) Jean Jacques Rousseau (1712-1778)

Rousseau mendorong gerakan kembali ke alam (*back to nature*) dan pendekatan alamiah untuk mendidik anak, disebut dengan *naturalism*. Bagi Rousseau, naturalisme berarti menghindari masyarakat yang pura-pura dan jadi-jadian. Pendidikan naturalistik akan mendorong pertumbuhan tanpa memedulikan larangan dan ketergangguan. Ia akan berargumen untuk menentang praktik modern seperti kode etik berpakaian, wajib hadir, kompetensi dasar minimal, pengujian yang terstandar, pengelompokan berbasis kemampuan karena semuanya tidak alami.

Rousseau menyatakan bahwa pendidikan naturalistik mendorong perkembangan kualitas kehidupan seperti kegembiraan, spontanitas, dan *inquisitiveness* bagi anak-anak. Orang tua dan guru mendorong anak untuk berkembang sesuai dengan bakatnya dan tidak diganggu dengan perkembangan yang dipaksakan. Rousseau percaya bahwa pendidikan berasal dari tiga sumber yaitu bakat, orang, dan benda. Walaupun pendidikan dari masyarakat dan pengalaman sensori dapat dikendalikan, tetapi perkembangan bakat bawaan tidak dapat

dikendalikan, dan disebut dengan *Unfolding*. Artinya, anak-anak bebas berkembang sesuai dengan tahapan perkembangannya. Orangtua dan guru harus memperhatikan perkembangan anak dan menyediakan pengalaman yang tepat dan sesuai dengan tahapan perkembangannya.

5) Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827)

Pestalozzi adalah pengagum konsep *back to nature* Rousseau pada awalnya, kemudian ia mengembangkan Teori Pedagogi yang disebut dengan *object lessons* (pelajaran melalui objek). *Pestalozzi* berkeyakinan bahwa cara terbaik untuk mempelajari berbagai konsep dilakukan melalui dukungan alat bantu dengan memanfaatkan pengalaman manipulatif, seperti menghitung, mengukur, merasakan, dan menyentuh/mraba.

Seluruh proses pendidikan akan berhasil dengan baik apabila didasari oleh *sensory impression* (kesan sensoris), dan karenanya melalui pengalaman sensoris yang tepat, potensi keberbakatan alami anak dapat berkembang dengan baik. Untuk menyebarkan hasil pemikirannya, *Pestalozzi* menulis dua buku yaitu *How Gertrude Teaches Their Children* dan *Book for Mothers* (Morrison, 2012: 63), keduanya berpengaruh cukup besar terhadap pendidikan TK.

6) Robert Owen (1771 – 1858)

Owen percaya bahwa lingkungan anak berpengaruh terhadap keyakinan, perilaku, dan prestasi mereka. Ia percaya bahwa masyarakat dapat menggunakan lingkungan untuk membentuk karakter anak. Dengan mengendalikan lingkungan dan hasil didikan anak, maka masyarakat baru yang lebih baik akan terbentuk. Berbekal pandangan ini, ia menyusun pola



pengasuhan anak dengan menggunakan kondisi lingkungan sebagai kekuatan yang dominan dalam mengarahkan dan menentukan perilaku anak.

Untuk mempraktikkan keyakinannya, ia membuka sekolah anak pada tahun 1816 di New Lanack, Scotlandia yang dirancang untuk mengasuh sekitar seratus anak usia delapan belas bulan hingga sepuluh tahun. Pemikiran dan gerakan Owen tentang pentingnya PAUD dan hubungan perkembangan masyarakat dengan pendidikan, serta pemanfaatan pendidikan sebagai sarana mereformasi masyarakat dan sebagai cara untuk membuat dunia lebih baik bagi semua orang, kemudian menyebar dan mempengaruhi dunia pendidikan (Morrison, 2012: 64-65).

#### 7) Friedrich Wilhelm Froebel (1782 – 1852)

Froebel dikenal sebagai “Bapak Taman kanak-kanak”, karena ia-lah yang menciptakan dan memperkenalkan istilah “Kindergarten” atau Taman Kanak-kanak. Konsep pendidikan Froebel pada awalnya dikembangkan berdasarkan pandangan Comenius dan Pestalozzi. Menurut pandangan Froebel, peran pendidik adalah mengamati proses kedewasaan anak secara alami dan memberikan kegiatan yang membuat mereka mempelajari apa yang siap mereka pelajari dalam suasana bebas dan merdeka.

Froebel berkeyakinan bahwa perkembangan anak akan terjadi melalui kegiatan individual dan permainan. Untuk meningkatkan kegiatan individual, Froebel mengembangkan kurikulum sistematis dan terencana bagi pendidikan TK berdasarkan “mainan”, “kegiatan”, lagu, dan permainan edukatif (Morisson, 2012: 66).

8) John Dewey (1859-1952)

Dewey sangat mempengaruhi arah pendidikan Amerika dan Dunia. Teori Pendidikan Dewey disebut dengan Progresivisme. Pendidikan menurut aliran Progresivisme lebih menekankan pada anak dan minatnya daripada muatan bidang studi. Progresivisme Dewey memunculkan istilah kurikulum berpusat pada anak (*child-centered curriculum*), dan sekolah berpusat pada anak (*child-centered school*).

Progresivisme mendorong sekolah untuk menyiapkan siswa mampu menghadapi realitas saat ini bukan sesuatu yang samar di masa depan. Seperti tergambar dalam buku "*My pedagogical creed*," Dewey berkeyakinan bahwa pendidikan merupakan proses kehidupan dan bukan persiapan untuk kehidupan di masa yang akan datang, dan kehidupan sehari-hari harus menjadi sumber aktivitas dimana anak dapat belajar tentang kehidupan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam hidup (Morrison, 2012: 68).

9) Maria Montessori (1870-1952)

Pada awalnya, Montessori mengembangkan sistem pendidikan bagi para penyandang keterbelakangan mental karena ia sangat terpengaruh oleh Edward Seguin dan Jean Itard. Kemudian, ia mengembangkan metode pembelajaran bagi anak normal berdasarkan keteguhan religiusitasnya. Montessori dipercaya mengelola *Casa dei Bambini* atau rumah anak-anak. Kesempatan tersebut ia manfaatkan untuk menguji, dan memperbaiki metodenya.

Metode Montessori merupakan sistem pendidikan di PAUD dan SD, menitikberatkan pada kegiatan mandiri siswa, dan observasi klinis guru. Sistem tersebut menunjukkan bahwa



proses pendidikan berlangsung dalam lingkungan belajar yang disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak, memanfaatkan aktivitas jasmani untuk memfasilitasi anak menguasai konsep dan keterampilan praktik, serta menggunakan fasilitas otodidak (koreksi diri) untuk mengenalkan beragam konsep.

10) Ki Hadjar Dewantara (1889-1959)

Ki Hadjar Dewantara meyakini bahwa manusia memiliki daya jiwa, yaitu cipta, karsa, dan karya. Proses pendidikan berkewajiban untuk mengembangkan seluruh daya jiwa secara utuh dan seimbang. Manusia dididik agar menjadi lebih berbudaya dan merdeka. Manusia akan benar-benar menjadi manusia jika ia hidup dalam budayanya sendiri. Manusia merdeka adalah insan yang mampu mengembangkan secara utuh dan selaras seluruh aspek kemanusiaannya dan mampu menghargai dan menghormati kemanusiaan orang lain, sehat fisik dan mental, cerdas, menjadi anggota masyarakat yang berguna, dan bertanggungjawab atas kebahagiaan dirinya dan kesejahteraan orang lain.

Metode pendidikan yang sesuai bagi TK adalah sistem among. Sistem among merupakan metode pembelajaran berlandaskan pada asih, asah, dan asuh. Pembelajaran tidak bersifat paksaan, tetapi bersifat ngemong atau among. Bahan ajar utama adalah pendidikan budi pekerti. Bentuknya bukan mata ajar budi pekerti, tetapi penanaman nilai, harkat dan martabat manusia, nilai moral watak, dan pembentukan manusia yang berkepribadian sebagai tujuan akhirnya. Pendekatan pembelajaran yang paling tepat adalah memberikan contoh teladan, cerita atau dongeng, dan

permainan. Pendidikan memiliki tiga lingkungan yang saling mendukung, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan sosial (masyarakat).

11) Jean Piaget (1896-1980)

Piaget selalu tertarik dengan cara manusia belajar dan berkembang secara intelektual, dimulai dari lahir dan berlanjut di sepanjang hayat. Ia mendedikasikan hidupnya untuk melakukan eksperimen, mengamati anak-anak (termasuk anak-anak kandungnya), dan mengembangkan serta menulis tentang teori perkembangan kognitif dalam pembelajaran.

Piaget mengembangkan teori perkembangan kognitif anak. Teori Piaget banyak mempengaruhi perkembangan pendidikan. Berlandaskan Teori Piaget, para ahli mengembangkan berbagai teori perkembangan anak, seperti perkembangan bahasa dan moral. Bahasan secara rinci dari teori belajar yang dikembangkan oleh Piaget disajikan pada bagian peserta didik dari kajian teoritik ini.



### BAB III

## PARADIGMA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

### A. Pendahuluan

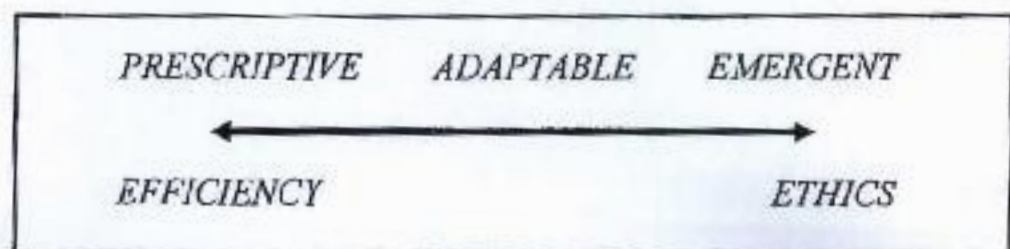
Pembahasan tentang paradigma pendidikan TK akan dimulai dengan deskripsi paradigma. Menurut Tilaar (2004: 62) paradigma merupakan suatu model berpikir yang dianut oleh sekelompok manusia, baik pemimpin, sekelompok ilmuwan, maupun masyarakatnya dalam melihat suatu perkembangan. Kamus online The Merriam-Webster mendefinisikan paradigma sebagai "*a philosophical and theoretical framework of a scientific school or discipline within which theories, laws, and generalizations and the experiments performed in support of them are formulated; broadly: a philosophical or theoretical framework of any kind.*"

Riegle (2008) menambahkan bahwa paradigma merupakan model mental atau cara berpikir tentang sesuatu. Sebagai contohnya, paradigma pendidikan dipengaruhi oleh budaya masyarakatnya (contohnya, sekolah meliburkan siswa pada musim panas agar anak dapat membantu orangtuanya untuk mengerjakan pertanian), atau dipengaruhi oleh budaya industri (contohnya: kurikulum yang bertahap dan jadwal sekolah ditandai oleh lonceng, sehingga pendidikan dapat berjalan seperti ban berjalan dalam industri).

Nivala dan Hujala (2002) menyatakan bahwa dalam pendidikan, paradigma merupakan suatu bentuk model atau pola pikir yang mengarahkan tindakan. Biasanya, paradigma menyediakan suatu model tindakan yang berkaitan dengan seni, ideologi/agama, dan kehidupan sehari-hari. Paradigma makro merupakan artikulasi dari (1) sifat realitas, (2) impresi pengetahuan yang mampu menjelaskan sifat realitas, (3) cara

menerima pengetahuan, dan (4) cara menjelaskan pengetahuan. Hal ini berarti bahwa setiap paradigma memiliki ontologi, epistemologi, metodologi dan sistem simbolik.

Schwab (Heydon & Ping Wang, 2006) menyatakan bahwa paradigma dalam pendidikan TK memiliki tiga model atau tiga seni eklektik. Pertama, kemampuan memadukan teori-teori yang diresepkan dengan persoalan yang ada. Kedua, mengadaptasi teori agar sesuai dengan situasi yang dihadapi. Ketiga, menemukan solusi baru yang sesuai dengan situasi yang dihadapi. Ketiga pendekatan tersebut merupakan paradigma yang dikenal dengan paradigma *prescriptive, adaptable, dan emergent*. Setiap paradigma merupakan ikatan seperangkat pola pikir, nilai, dan aturan yang luwes yang mengatur pelaksanaan penelitian, cara-cara penginterpretasian data, dan cara-cara memandang dunia (Schubert dalam Nivala & Hujala, 2002). Paradigma tersebut membentuk "*a continuum of opportunities for efficiency through to ethics*", seperti terlihat pada Gambar 1 sebagai berikut.



Gambar 1.  
*Continuum of Curricular Paradigms and Opportunities  
for Efficiency and Ethics Forms*

Sejalan dengan Schubert, Mansur Faqih (O'neil, 2001: xii-xiii) menyatakan bahwa terdapat tiga paradigma pendidikan, yaitu konservatif, liberal, dan kritis. Paradigma Konservatif dikembangkan berdasarkan keyakinan bahwa masyarakat pada



dasarnya tidak dapat merencanakan perubahan atau mempengaruhi perubahan sosial, hanya Tuhanlah yang merencanakan keadaan masyarakat dan Dia yang tahu makna dibalik itu semua. Paradigma Liberal berakar dari suatu pandangan yang menekankan pada pengembangan kemampuan, perlindungan hak dan kebebasan, serta pengidentifikasian masalah dan upaya perubahan sosial secara instrumental demi menjaga stabilitas jangka panjang. Paradigma Kritis menghendaki perubahan struktur secara fundamental dalam politik ekonomi masyarakat di mana pendidikan berada. Pendidikan bertugas untuk menciptakan ruang agar sikap kritis terhadap sistem dan struktur ketidakadilan, serta melakukan dekonstruksi dan advokasi menuju sistem sosial yang lebih adil.

Woodhead (2006) menyatakan bahwa dalam pendidikan TK yang berkualitas, paradigma merupakan landasan untuk menyelenggarakannya. Karenanya, paradigma merupakan pola pikir yang menjadi landasan bagi para guru dan pengelola dalam penyelenggaraan pendidikan TK. Lebih lanjut, Woodhead (2006) menyatakan bahwa terdapat empat paradigma atau perspektif pendidikan TK, yaitu Paradigma Perkembangan, Paradigma Ekonomi dan Politik, Paradigma Sosial dan Budaya, Paradigma Hak Asasi Manusia, dan Ki Hadjar Dewantara menambahkan Paradigma Among Siswa. Kelima paradigma dijelaskan secara rinci sebagai berikut.

#### **B. Paradigma “Perkembangan”**

Paradigma pendidikan TK “Perkembangan” memandang bahwa pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikososial anak mengalami keteraturan selama masa usia dini. Selama masa pembentukan, anak-anak mengalami ketergantungan dan

perkembangan yang menakutkan. Paradigma “Perkembangan” dilandasi oleh Teori Perkembangan. Teori ini percaya bahwa pembentukan pada masa awal kehidupan merupakan momen penting yang akan menentukan keberhasilan kehidupan selanjutnya.

Anak mengalami proses perkembangan yang utuh. Setiap aspek perkembangan saling berkaitan dalam satu kesatuan. Perkembangan pada satu aspek akan mempengaruhi perkembangan pada aspek yang lain. Perkembangan berlangsung secara berurutan dan bertahap. Perkembangan berlangsung dengan irama yang bervariasi, baik intra individu, maupun antar individu.

Perkembangan memiliki pengaruh kumulatif, baik positif maupun negatif terhadap perkembangan selanjutnya. Bila tidak memperoleh stimulasi yang memadai, anak akan mengalami hambatan dalam perkembangannya. Anak memiliki masa sensitif dalam proses perkembangannya. Masa sensitif merupakan kondisi potensial yang berada dalam kepekaan yang tinggi untuk mengalami perkembangan.

Dalam belajar, anak adalah manusia pembangun pengetahuan yang aktif melalui pengalaman konkret, interaksi sosial, dan refleksi. Setiap anak memiliki gaya belajar yang khas. Anak lebih senang belajar melalui bermain. Proses belajar akan berlangsung secara efektif manakala anak merasa aman dan nyaman. Kematangan dan lingkungan mempengaruhi proses belajar yang dialami anak. Pendidikan harus memperhatikan minat, kebutuhan, dan tahapan perkembangan anak.

Salah satu model kurikulum yang mempergunakan paradigma “Perkembangan” adalah *Developmentally Appropriate Practices (DAP)*. Kurikulum DAP dikembangkan oleh the US



National Association for the Educational of Young Children (NAEYC) pada tahun 1980-an. Kurikulum DAP disusun berdasarkan teori bermain dan pendidikan informal bagi anak usia dini. Kurikulum DAP dipengaruhi oleh teori Piaget yang menekankan pada penghargaan terhadap tahapan perkembangan anak secara universal, karakteristik bermain anak secara alamiah, belajar berbasis aktivitas dan eksplorasi, dan bimbingan dan dukungan dari guru yang ahli (Woodhead, 2006: 17).

Memperhatikan deskripsi Paradigma "Perkembangan" di atas, Taman Kanak-kanak yang memanfaatkan Paradigma "Perkembangan" sebagai landasan dalam penyelenggaraan pendidikannya memiliki karakteristik sebagai berikut.

1. Proses pertumbuhan dan perkembangan anak sangat diperhatikan, dan distimuli oleh guru agar perhatian dan rangsangan tersebut memberikan dampak positif bagi perkembangan anak selanjutnya;
2. Proses pendidikan TK sangat memperhatikan usia perkembangan anak, dan materi pengembangan dan pembiasaan disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak;
3. Minat, kebutuhan, dan karakteristik setiap anak sangat diperhatikan dalam setiap proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh sekolah;
4. Anak dianggap sebagai pembelajar yang aktif, dan memiliki gaya belajar yang unik;
5. Belajar sambil bermain, bermain sambil belajar. Sekolah menyediakan tempat yang indah, menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi anak, sehingga anak kerasan dan senang belajar di sekolah; dan

6. Percaya bahwa lingkungan dan kematangan mempengaruhi proses belajar anak.

### C. Paradigma “Ekonomi dan Politik”

Woodhead (2006: 4) percaya bahwa Paradigma “Ekonomi dan Politik” dilandasi oleh prinsip-prinsip teori perkembangan yang dilanjutkan dengan pembekalan pendidikan dan sosial, dan diperkuat dengan Teori Ekonomi tentang modal manusia (*human capital*). Berdasarkan pandangan tersebut, pendidikan TK berupaya untuk menyiapkan seluruh sistem persekolahan agar dapat memberikan layanan yang memadai bagi kelompok lemah, memberikan kesempatan yang seimbang bagi seluruh kelompok, dan mempromosikan keadilan sosial.

Intervensi pendidikan sejak awal diyakini dapat mengubah kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Pendidikan anak usia dini merupakan periode penting dalam upaya mengubah kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Agar tujuan tersebut dapat dicapai, maka pendidikan perlu menyediakan program kompensasi bagi kelompok lemah, kesempatan yang seimbang dan menyediakan program pendidikan bagi anak-anak untuk tumbuh dengan baik.

Intervensi pendidikan tersebut perlu dibarengi dengan upaya kesehatan preventif dan pemberantasan penyakit. Selain itu, perubahan sosial dan ekonomi masyarakat melalui pendidikan akan berhasil bila diperkuat oleh pemanfaatan ilmu pengetahuan karena kekuatan ilmu pengetahuan diyakini dapat mereformasi kondisi sosial masyarakat. Selain kesehatan dan kekuatan ilmu pengetahuan, kebijakan pemerintah yang kuat diperlukan untuk menyukseskan program pendidikan.

Karena dilandasi oleh Teori Ekonomi tentang modal manusia, maka keberhasilan pendidikan akan diukur dengan



bahasa Ekonomi, seperti seberapa besar keuntungan yang diperoleh dari modal Ekonomi yang telah dikeluarkan, dan biaya-biaya kesehatan yang dapat dihemat. Selain sangat memperhatikan modal manusia (potensi intelegensi anak, kemampuan komunikatif dan kompetensi lainnya), pembelajaran juga mengembangkan modal sosial (seperti keberlangsungan hubungan anak dengan lingkungan sosial, penempatan ke kelas dan kelompok yang memiliki sikap dan harapan yang positif), dan pembelajaran perlu didukung oleh layanan yang layak, staf dan sumber daya yang memadai bagi semua anak, terutama anak dengan resiko tinggi, dan adanya jaminan keberlanjutan pendidikan yang bermutu.

Memperhatikan pembahasan di atas, TK yang memanfaatkan Paradigma "Ekonomi dan Politik" sebagai landasan dalam penyelenggaraan proses pendidikannya memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

- 1) Pendidikan merupakan intervensi sosial, oleh karena itu keberhasilannya akan ditentukan oleh karakteristik anak, guru, keluarga, dan masyarakat. Selain itu, keberlangsungan hubungan antar anak, guru, keluarga, dan masyarakat mempengaruhi tingkat keberhasilan pendidikan;
- 2) Pembelajaran dilaksanakan dalam rombongan belajar yang berjumlah relatif kecil agar interaksi berjalan dengan efektif dan efisien;
- 3) Kurikulum dirancang dan dikembangkan secara terencana dan secara khusus untuk memberikan layanan bagi kelompok lemah agar mereka mampu mengejar ketertinggalan dari kelompok lainnya;
- 4) Perkembangan prestasi siswa, terutama potensi intelektual sangat diperhatikan karena dipandang sebagai salah satu indikator keberhasilan program pendidikan;
- 5) Keadaan ruang kelas, rasio guru dan siswa, dan kurikulum sangat diperhatikan dalam proses pembelajaran,

- 6) Karena dilandasi oleh teori ekonomi tentang modal manusia, maka keberhasilan pendidikan akan diukur dengan bahasa ekonomi, seperti seberapa besar keuntungan yang diperoleh dari modal ekonomi yang telah dikeluarkan, dan biaya-biaya kesehatan yang dapat dihemat;
- 7) Selain sangat memperhatikan modal manusia (potensi intelegensi anak, kemampuan komunikatif dan kompetensi lainnya), pembelajaran juga mengembangkan modal sosial (seperti keberlangsungan hubungan anak dengan lingkungan sosial, penempatan ke kela dan kelompok yang memiliki sikap dan harapan yang positif), dan pembelajaran perlu didukung oleh layanan yang layak, staf dan sumber daya yang memadai bagi semua anak, terutama anak dengan resiko tinggi, dan adanya jaminan keberlanjutan pendidikan yang bermutu; dan
- 8) Para pengelola TK sangat memperhatikan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

#### **D. Paradigma “Sosial dan Budaya”**

Pandangan Sosial dan Budaya merupakan aliran pendidikan yang berkeyakinan bahwa masa usia dini merupakan masa pembentukan status bagi anak. Paradigma “Sosial dan Budaya” merupakan hasil perbaikan para ahli atas Paradigma “Perkembangan”. Mereka kecewa karena DAP tidak terlalu memperhatikan keberagaman budaya yang dimiliki oleh anak dan kenyataan keseharian yang dihadapi oleh anak-anak. Berdasarkan kondisi tersebut, para ahli menyusun *Contextually Appropriate Practice (CAP)*. Model *CAP* menyarankan agar kebijakan, layanan, kurikulum, dan praktik PAUD perlu memperhitungkan kondisi kehidupan anak, sumber daya material-kultural yang tersedia bagi orangtua dan masyarakat, dan harapan serta aspirasi orangtua dan masyarakat terhadap anak-anak.



Kurikulum *CAP* dikembangkan dengan menggunakan teori perkembangan sebagai landasan konseptualnya. Kemudian, kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan tiga komponen lingkungan anak, yaitu: kondisi sosial dan fisik tempat anak tinggal; kebiasaan yang diatur secara kultural dan praktik yang dilakukan anak; dan keyakinan guru, orangtua, orang-orang yang bertanggungjawab terhadap perawatan dan perkembangan anak-anak.

Selain ketiga komponen lingkungan anak, Teori Ekologi Perkembangan Manusia dari Bronfenbrenner memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam penyusunan kurikulum *CAP*. Kerangka ekologi Bronfenbrenner akan dapat mengungkapkan kegunaan berbagai *setting* dan pengaruhnya terhadap kehidupan anak, walaupun pembahasannya masih disederhanakan. Kenyataan menunjukkan bahwa masih ada kesulitan berbagai model teori untuk mengungkapkan kerumitan kehidupan anak-anak, termasuk penjelasan tentang rentang hubungan dan pengaruh perubahan keadaan keluarga, urbanisasi dan keberagaman kultur yang dimiliki anak-anak.

Memperhatikan diskusi tentang pandangan "Sosial dan Budaya" di atas, TK yang mencrapkan Paradigma "Sosial dan Budaya" sebagai landasan dalam penyelenggaraan pendidikannya memiliki karakteristik sebagai berikut.

- 1) Pembelajaran merupakan proses untuk membantu perkembangan anak. Karena perkembangan anak dipandang sebagai proses sosial, maka pembelajaran dikondisikan agar anak berpikir, berperasaan, berkomunikasi dan bertindak dalam kerangka hubungan sosial yang memiliki konteks *setting* dan praktik kultur tertentu. Praktik tersebut dilandasi oleh keyakinan mengenai bagaimana anak-anak harus diperlakukan

dan apa maknanya menjadi anak-anak, juga kapan masa anak-anak bermula dan berakhir;

- 2) Pembelajaran merupakan proses yang dikonstruksi secara sosial. Anak-anak belajar, tumbuh, dan menghabiskan waktu dalam ruang kelas, arena bermain, lingkungan yang dikondisikan. Kondisi tersebut merupakan ciptaan manusia untuk mengatur kehidupan anak-anak;
- 3) Kultur anak usia dini sangatlah sosial, terekspressikan melalui bermain dalam kelompok sebaya, gaya berpakaian dan berperilaku, pola konsumsi dan pembelian alat-alat permainan, TV, dan media lainnya;
- 4) Pembelajaran perlu memberikan kesempatan kepada anak untuk mengeksplorasi keberagaman pengalaman dan budaya, seperti kontras dan kontradiksi yang ada dalam konteks multi etnik, dan budaya; dan
- 5) Penetapan kualitas pendidikan TK tidak dapat dilakukan secara sepihak, tetap (*fixed*), dan hanya diresepkan oleh ilmu dan teori perkembangan, walaupun ilmu pengetahuan secara nyata memiliki peran yang penting dalam proses pembentukan perkembangan kualitas. Dalam proses tersebut, umat manusia harus berbagi keyakinan mengenai apa yang normal dan alami dan layak bagi anak-anak. Namun, konsensus universal tidak akan membuat keyakinan tersebut, atau mengatur pelaksanaannya, tanpa memperhatikan aspek budaya.

#### **E. Paradigma "Hak Asasi Manusia"**

Paradigma "Hak Asasi Manusia" mengubah pendekatan konvensional tentang teori, riset, kebijakan, dan praktik pendidikan TK menjadi paradigma yang sangat menghargai nasib dan keberuntungan, dan kapabilitas anak-anak untuk ikut menentukan perkembangan mereka sendiri, dan layanan pendidikannya. Paradigma ini didasarkan pada penghormatan atas hak asasi anak secara universal, termasuk anak-anak yang masih



muda. *The UN Convention on the Right of the Child (UNCRC)* menetapkan empat prinsip hak asasi bagi anak, yaitu hak untuk hidup dan berkembang; hak untuk tidak didiskriminasi; hak untuk dihormati pandangan dan perasaannya; dan minat utama anak-anak merupakan pertimbangan utama.

Penetapan konvensi hak anak oleh PBB mempengaruhi kebijakan PAUD di seluruh Negara anggota PBB. Menurut Woodhead (2006: 25) salah satu Negara yang menerapkan konvensi tersebut dalam kebijakan pembangunannya adalah Inggris. Kebijakan pembangunan Inggris sangat dipengaruhi oleh perspektif kesejahteraan bertumpu pada kerja filantropi dan kedermawanan, terbentuk berdasarkan wacana kebutuhan anak-anak (dan keluarga) dan hasil dari kesehatan, pembangunan, dan pendidikan yang diinginkan. Pemerintahan Inggris berketetapan untuk membantu anak-anak, apapun latarbelakangnya atau apapun keadaannya, agar memperoleh kebutuhan untuk: selalu sehat; senantiasa selamat; bergembira dan berprestasi; memberikan sumbangan yang positif; dan mencapai kesejahteraan secara ekonomis.

Walaupun pengimplementasian hak anak dalam kebijakan dan praktik PAUD masih dalam tahap awal, tetapi pergerakan kegiatan ini terus menuju ke arah yang diharapkan. Dalam praktik PAUD, minat dan kebutuhan anak benar-benar diperhatikan dan dijadikan dasar untuk menyusun kurikulum. Anak-anak tidak lagi dipandang sebagai sosok yang terilosasi dan egosentris, sedikit berperasaan dan kurang logis, tetapi mereka adalah sosok yang kaya akan potensi, kuat, berkekuasaan, kompeten, dan hampir seluruhnya berkaitan dengan orang dewasa dan anak-anak yang lainnya.

Paradigma “Hak Asasi Manusia” sangat menghormati hak anak untuk menentukan nasibnya sendiri, termasuk dalam proses pendidikan. Dalam proses pembelajaran, anak tidak hanya dipandang sebagai “subject of study and concern”, tetapi juga sebagai “subjects with concerns”. Pembelajaran merupakan hak dan proses pengembangan kapasitas anak secara berkelanjutan. Pengembangan kapasitas anak secara berkelanjutan (*evolving capacities*) dapat diinterpretasikan dari tiga konsep, yaitu: konsep perkembangan – pemenuhan hak anak untuk mengalami perkembangan kapasitas secara optimal; konsep emansipatori – memahami dan menghormati kapasitas anak yang berlangsung secara terus menerus; konsep protektif – melindungi anak dari pengalaman yang melebihi kapasitas mereka.

Paradigma “Hak Asasi Manusia” sangat menghormati hak anak untuk menentukan nasibnya sendiri, termasuk dalam proses pendidikan. Praktik pendidikan TK yang menerapkan paradigma ini sebagai landasan penyelenggaraannya memiliki karakteristik sebagai berikut.

- 1) Setiap penetapan kegiatan pendidikan perlu dirundingkan dengan anak-anak, dan diimplementasikan sedini mungkin. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan cara yang layak bagi kapasitas anak, minat terbaik anak, dan hak untuk terlindungi dari pengalaman yang berbahaya;
- 2) Sekolah memberikan kesempatan bagi anak untuk mengekspresikan pandangan dan perasaan dalam setiap proses pembelajaran yang dilaksanakan;
- 3) Semua sumber daya yang ada akan dikerahkan agar proses pembelajaran menjamin keberlangsungan perwujudan hak anak untuk menjadi dirinya sendiri;
- 4) Dalam proses pembelajaran, anak tidak hanya dipandang sebagai “*subject of study and concern*”, tetapi juga sebagai “*subjects with concerns*”; dan



- 5) Pembelajaran merupakan hak dan proses pengembangan kapasitas anak secara berkelanjutan. Pengembangan kapasitas anak secara berkelanjutan (*evolving capacities*) dapat diinterpretasikan dari tiga konsep, yaitu: konsep perkembangan-pemenuhan hak anak untuk mengalami perkembangan kapasitas secara optimal; konsep emansipatori-memahami dan menghormati kapasitas anak yang berlangsung secara terus menerus; konsep protektif-melindungi anak dari pengalaman yang melebihi kapasitas mereka.

Selain empat paradigma pendidikan TK yang dikemukakan oleh Woodhead (2006) tersebut, satu paradigma pendidikan TK yang dikembangkan oleh Ki Hadjar Dewantara adalah Paradigma "Among Siswa". Bahasan tentang Paradigma "Among Siswa" disajikan sebagai berikut.

#### **F. Paradigma "Among Siswa"**

Ki Hadjar Dewantara (2009: 147) menyatakan bahwa:

... pengajaran di taman anak dikonsentrasikan pada pelajaran latihan panca indra. Sebab, mendidik anak kecil itu bukan atau belum memberikan pengetahuan, akan tetapi baru berusaha akan menyempumakan rasa pikiran. Segala tenaga dan tingkah laku lahir yang mereka miliki sebenarnya besar pengaruhnya bagi kehidupan batin mereka dan demikian pula sebaliknya. Jalan perantaraan pendidikan lahir ke dalam batinnya tersebut melalui panca indra. Maka dari itu, latihan panca indra adalah pekerjaan lahir untuk mendidik batin (pikiran, rasa, kemauan, nafsu, dan lain-lain).

Lebih lanjut, Ki Hadjar Dewantara (2009: 148) menyatakan bahwa dalam proses pengajaran TK, tidak hanya mengkonsentrasikan pada latihan panca indra, tetapi memasukkan permainan anak sebagai kultur. Kita dapat membandingkan

metode Froebel, Montessori, dan Taman Siswa mengenai pengaruh tenaga batin terhadap perkembangan batin.

1. Montessori mementingkan pelajaran panca indra, hingga ujung jaripun dihidupkan rasanya, menghadirkan beberapa alat untuk latihan panca indra dan semua itu bersifat pelajaran. Anak diberi kemerdekaan secara luas, tetapi permainan tidak dipentingkan.
2. Froebel juga menjadikan panca indra sebagai konsentrasi pengajarannya, tetapi yang diutamakan adalah permainan anak-anak, kegembiraan anak, sehingga pelajaran panca indra juga diwujudkan dalam barang-barang yang menyenangkan anak. Namun, dalam proses pengajarannya anak masih diperintah.
3. Taman siswa dapat dikatakan memakai kedua metode tersebut, akan tetapi pelajaran panca indra dan permainan anak-anak itu tidak dipisah, yaitu dianggap satu. Sebab dalam Taman Siswa terdapat kepercayaan bahwa dalam segala tingkah laku dan segala kehidupan anak tersebut sudah diisi Sang Maha Among (Pemelihara) dengan segala alat yang bersifat mendidik si anak.

Para guru dapat memanfaatkan berbagai "dolan anak" untuk mengembangkan berbagai panca indera anak. Dolan anak tersebut, seperti: *sumbar, gateng, dan unclang*, yang mendidik anak agar seksama (*titis pratilis*), cekatan, menjernihkan penglihatan, dan lain-lain. Kemudian juga permainan, seperti: *dakon, cublak-cublak suweng, dan kibuk* yang mendidik anak mengenai pengertian perhitungan dan perkiraan (taksiran). Selain itu, permainan *gobak, trembung, raton, cu, geritan, obrog, panahan, si, jamuran, jehungan*, dan dolan lainnya yang bersifat olahraga yang tentunya akan mendidik anak dalam hal: kekuatan dan kesehatan badan, kecekatan dan keberanian, ketajaman



penglihatan, dan lain-lain. Ada juga permainan seperti: mengupas bunga (*meronce*), menyulam daun pisang atau janur, atau membuat tikar, dan pekerjaan anak lainnya yang dapat menjadikan mereka memiliki sikap tertib dan teratur.

Selanjutnya, Ki Hadjar Dewantara menyatakan bahwa sesungguhnya bangsa Indonesia memiliki metode sejenis Metode Montessori dan Metode Froebel yaitu Metode Kodrat Iradat (Natur dan Evolusi), bisa juga dinamakan Metode Among Siswa. Metode Among Siswa merupakan metode yang mengedepankan pengembangan panca indera anak dengan wahana permainan tradisional yang sesuai dengan budaya anak. Penjelasan tersebut bertujuan agar para pendidik TK dapat mempergunakan metode pengajaran TK yang khas dan selaras dengan kehidupan bangsa Indonesia.

Memperhatikan pembahasan di atas, TK yang menerapkan paradigma "Among Siswa" sebagai landasan dalam penyelenggaraan pendidikannya memiliki karakteristik sebagai berikut.

- 1) Pengajaran dikonsentrasikan pada pengembangan dan pembiasaan latihan panca indra.
- 2) Mendidik anak kecil bukan atau belum memberikan pengetahuan, akan tetapi mulai berusaha untuk menyempurnakan rasa pikiran yang dimiliki anak-anak.
- 3) Latihan panca indra adalah pekerjaan lahir untuk mendidik batin (pikiran, rasa, kemauan, nafsu, dan lain-lain).
- 4) Proses pengajaran TK, tidak hanya mengkonsentrasikan pada latihan panca indra, tetapi memasukkan permainan anak sebagai kultur.
- 5) Pelajaran panca indra dan permainan anak-anak itu tidak dipisah, tetapi dianggap satu.

Woodhead (2006: 33) menyatakan bahwa setiap paradigma tak terbantahkan dibatasi oleh ketersediaan konsep, dan

keterbagian makna yang mereka sampaikan kepada komunitas ahli yang memiliki kesamaan minat terhadap pendidikan anak usia dini. Penting untuk diingat bahwa masa usia dini adalah konsep yang terkonstruksi secara kultural, dan mempertanyakan bagaimana teori, riset dan kebijakan tentang masa usia dini terhubung dengan anak-anak yang harus dideskripsikan, dijelaskan, dilindungi dan dipromosikan melalui aturan dan layanan yang ada. Paradigma yang dikemukakan di atas hanya memaparkan sedikit pengetahuan, keyakinan dan kontroversi yang tersedia dalam buku-buku, hasil riset yang terpublikasikan secara terbuka dalam media cetak dan elektronik.

Memperhatikan diskusi paradigma pendidikan TK di atas, maka paradigma pendidikan TK dapat didefinisikan sebagai suatu model berpikir yang mengarahkan tindakan yang akan dikerjakan atau kerangka pikir ilmiah yang menjadi landasan untuk menyelenggarakan pendidikan TK. Paradigma pendidikan TK sebagai pola pikir dan kerangka pikir ilmiah yang melandasi pelaksanaan layanan pendidikan TK seyogyanya dipegangteguh oleh para guru dan pengelola TK. Layanan pendidikan TK yang dilandasi oleh paradigma pendidikan yang kokoh akan menghasilkan proses pendidikan yang memiliki tujuan yang jelas dan terarah.

Selanjutnya, Morrison (1988: 465) menyatakan bahwa guru harus mengembangkan falsafah mengajar atau paradigma mengajar sebagai pedoman dalam praktik belajar mengajar dalam kelas. Paradigma harus berdasarkan keyakinan guru terhadap anak-anak dan proses belajar, pikiran guru tentang materi yang harus diajarkan kepada anak, dan nilai-nilai atau norma-norma yang dimiliki oleh para guru. Mengajar berlandaskan pada paradigma akan menghasilkan proses pembelajaran yang



berkualitas, menyediakan bantuan bagi siswa untuk belajar, dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk mampu mengembangkan potensinya secara penuh.

## BAB IV TEORI PENDIDIKAN TK

### A. Pendahuluan

Selain mempergunakan paradigma pendidikan sebagai landasan, penyelenggaraan pendidikan TK perlu mempertimbangkan teori-teori pendidikan. Banyak teori pendidikan hasil pemikiran para pakar pendidikan, namun tidak semua teori pendidikan akan dibahas. Bahasan hanya akan memilih beberapa teori, menurut peneliti, sangat berkaitan dengan pendidikan TK. Sebelum membahas lebih lanjut tentang teori pendidikan, perlu dibahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Teori. Karenanya, paparan akan mencoba membahas berbagai definisi Teori menurut pendapat para ahli, kemudian membahas Teori Pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli.

Imam Barnadib (1996: 6) menyatakan bahwa teori adalah suatu ilmu yang terstruktur secara konseptual dan merangkum pengetahuan empiris sebanyak mungkin. Teori bukanlah pengetahuan praktis. Menurut Pratte, teori mempunyai sifat logis, deskriptif, dan menerangkan. Ditambahkan oleh O'Connor bahwa teori memiliki fungsi tambahan, yaitu menjelaskan dan meramalkan (*prediction*). Dalam bahasa yang sederhana Noeng Muhadjir (2006: 9) menyatakan bahwa teori itu merupakan hukum keteraturan yang merentang dari hukum keteraturan eksperimental (misal: hukum Boyle) sampai ke hukum keteraturan kalkulus formal (misal: Teori Evolusi Darwin, Teori Relativitas Einstein).

Deskripsi teori yang lebih luas dikemukakan oleh Nola & Irzik. Secara lengkap, Nola & Irzik (2005: 200 – 201) menyatakan bahwa:



The term "theory" has several senses. We talk of Newton's theory, Darwinian theory, Plate tectonic theory, even theory of knowledge and the like. Minimally, "theory" simply means any (usually a small number of) interconnected set of principles (statements) about a certain domain. We needed to distinguish between two senses: a wide and a narrow (technical) sense of theory. In the wide sense, "theory" in science means a set of interconnected fundamental law statements. Thus, when we speak of Newton's theory, we mean Newton's three laws of motion and the inverse square law. These laws are interrelated in several ways. We define "theory" in the narrow, technical sense in terms of the notion of model. A (theoretical) model is a system of idealized objects, with idealized properties and obeying idealized laws. Accordingly, a theory consists of theoretical statements and a family of models specified by them.

Bila teori dihubungkan dengan pendidikan, Imam Barnadib (1996: 8-9) menyatakan bahwa pendidikan selalu dapat dibedakan menjadi teori dan praktik. Teori pendidikan adalah pengetahuan tentang makna dan bagaimana seyogyanya pendidikan dilaksanakan, sedangkan praktik pendidikan adalah pelaksanaan pendidikan secara nyata. Keduanya seyogyanya tidak dapat dipisahkan, dan perlu dikuasai oleh orang yang menggelutinya. Teori mengandaikan praktik, dan praktik berlandaskan teori.

Menurut *Unification Thought Institute* (1992) teori pendidikan biasanya memiliki dua aspek. Aspek pertama mengenai falsafah, tujuan, metode pendidikan, dan berkaitan dengan apa yang disebut dengan filsafat pendidikan. Aspek kedua berkaitan dengan pendidikan sebagai suatu tujuan, fenomena yang dapat diamati, dan disebut dengan ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan menyelidiki kurikulum sekolah, evaluasi dan



pengujian siswa, teknik belajar, bimbingan siswa, administrasi sekolah, dan manajemen pendidikan. Ketika ilmu pendidikan menunjukkan kemajuan yang membanggakan karena didukung oleh kecenderungan pemikiran modern yang sangat ilmiah, Filsafat Pendidikan sering dihindari dan secara perlahan mengalami kemunduran. Saat ini, kenyataan menunjukkan bahwa pendidikan seperti kehilangan arah, hal ini terjadi karena kekurangmampuan Filsafat Pendidikan menyokongnya.

Definisi Teori Pendidikan yang dideskripsikan oleh *Unification Thought Institute* diperkuat oleh Wikipedia (2012) yang menggolongkan Teori Pendidikan menjadi dua klasifikasi. Secara lengkap, Wikipedia menyatakan bahwa:

A theory of education can be "*normative* (or prescriptive) as in philosophy, or *descriptive* as in science." In the first case, a theory means a postulation about what ought to be. It provides the "goals, norms, and standards for conducting the process of education." In the second case, it means "a hypothesis or set of hypotheses that have been verified by observation and experiment." Whereas a normative educational theory provided by a philosopher might offer goals of education, descriptive "theory provides concrete data that will help realize more effectively the goals suggested by the philosopher." A descriptive theory of education can be thought of as a conceptual scheme that ties together various "otherwise discrete particulars. For example, a cultural theory of education shows how the concept of culture can be used to organize and unify the variety of facts about how and what people learn."

Knight (2007: 144 – 206) menggolongkan Teori Pendidikan berdasarkan akar filosofisnya menjadi (1) Teori Progresivisme, (2) Teori Humanisme, (3) Teori Perennialisme, (4) Teori Esensialisme, (5) Teori Rekonstruksionisme, dan (6) Teori Behaviorisme. Walaupun Knight menggolongkan Teori Pendidikan menjadi enam, tetapi sesungguhnya penggolongan itu tidak jauh berbeda dengan apa yang dihasilkan oleh Imam Barnadib.



Imam Barnadib (1996: 16) menyatakan bahwa terdapat tiga teori pendidikan yang dapat diterapkan dalam pendidikan di Indonesia, yaitu (1) Teori Sumberdaya Manusia, (2) Teori Revitalisasi Budaya, dan (3) Teori Rekonstruksionisme.

#### **B. Teori Sumberdaya Manusia**

Pendidikan memandang manusia sebagai objek dan subjek. Manusia sebagai objek karena manusia merupakan sasaran dari pendidikan, terutama kapasitasnya sebagai makhluk yang sedang tumbuh dan berkembang. Karenanya, ciri dan sifat pertumbuhan dan perkembangan menjadi sasaran pendidikan untuk dipengaruhi dan diarahkan. Manusia sebagai subjek karena memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi insan yang berkepribadian dan berwatak. Langeveld menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang membentuk diri pribadi.

Teori Sumberdaya Manusia berlandaskan penempatan manusia sebagai latar depan pendidikan, sehingga dapat dimaknai bahwa manusia adalah sumberdaya yang dikembangkan melalui upaya pendidikan. Filsafat yang memperbincangkan pola pendidikan seperti itu adalah Progresivisme dengan pendukungnya liberalisme dan pragmatisme serta strukturalisme fungsional. Progresivisme memiliki dua komponen pendukung utamanya, yaitu seleksi natural dan eksperimentalisme. Seleksi natural memberikan pandangan bahwa pendidikan adalah penyesuaian manusia terhadap alam, dan eksperimentasi pendidikan merupakan percobaan, pengupayaan, atau perjuangan manusia untuk bertahan hidup.

Selain itu, teori ini diwarnai oleh Filsafat Liberalisme dan Pragmatisme. Bila progresivisme memfokuskan diri pada pandangan tentang pentingnya kedudukan dan peran manusia

dalam kehidupan, maka Liberalisme berada di balik pandangan tersebut. Pratte (Imam Barnadib, 1996: 21) menyatakan bahwa Liberalisme adalah sistem perasaan yang menumbuhkan perangai yang menerima dan suka bekerja secara teratur dengan perubahan yang meningkat dan terencana ke arah evolusi sosial. Liberalisme menghendaki adanya evolusi dan perubahan berkelanjutan. Manusia sebagai insan yang aktif, kreatif, dan memiliki tujuan hidup akan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya untuk membentuk diri, dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik, serta lebih meningkat secara terus menerus.

Eksperimentalisme berkaitan erat dengan Pragmatisme, bahkan Pratte (Imam Barnadib, 1996: 21-22) menguatkan bahwa Pragmatisme mewarnai Eksperimentalisme. Pragmatisme merupakan tanggapan intelektual terhadap Teori Evolusi Darwin atau ekspresi sejenis dengan Aliran Empirisme di Inggris. Pragmatisme merupakan suatu pemberontakan terhadap Formalisme. Imam Barnadib (1996: 22) menambahkan bahwa Pragmatisme sebagai aliran yang tidak formalitas memandang kenyataan bukanlah sesuatu yang abstrak. Kemampuan manusia sebagai makhluk yang kreatif memberikan kemampuan untuk menjadikan kenyataan sebagai fungsi dan kegunaan. Berdasarkan Pragmatisme, pendidikan menekankan pada pembekalan kemampuan kreatif untuk menjadikan kenyataan sebagai fungsi dan kegunaan.

Imam Barnadib (1996: 26-29) menyatakan bahwa berdasarkan Teori Sumberdaya Manusia, praktik penyelenggaraan pendidikan memiliki karakteristik sebagai berikut.



- 1) Peserta didik memiliki kebebasan yang melekat dalam dirinya bersama potensinya untuk dikembangkan agar menjadi kreatif dan dinamis.
- 2) Pembelajaran merupakan kegiatan yang berlandaskan pada konsep rasionalitas, kebebasan, dan kesamaan.
- 3) Pendidikan dipandang sebagai distribusi yang demokratis untuk mengembangkan rasionalitas dengan perlakuan yang seimbang antara kebebasan dan kesamaan pada subjek didik.
- 4) Proses pendidikan memiliki keseimbangan perlakuan antara hak dan kewajiban peserta didik, dan tidak membedakan status peserta didik.
- 5) Suasana pembelajaran berorientasi kepada kepentingan peserta didik (*student centered*);
- 6) Kurikulum disusun agar berfungsi sebagai sarana pengembangan potensi, bakat, dan kecerdasan peserta didik yang muatan materinya diberikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang sedang berkembang.
- 7) Pendidik berperan untuk menuntun dan membantu pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dengan cara yang demokratis agar mencapai kemandirian untuk menjadi mandiri.

### **C. Teori Revitalisasi Budaya**

Seperti Teori Sumberdaya Manusia, Teori Revitalisasi Budaya menempatkan perhatian pada manusia sebagai subjek didik, namun memandangnya dari sudut yang berbeda. Bila Teori Sumberdaya Manusia memandang manusia sebagai insan yang bebas, kreatif, dan mandiri, maka Teori Revitalisasi Budaya meninjau manusia dari konteks budaya secara umum, dan nilai-nilai atau norma-norma secara khusus. Manusia tidak dapat dipisahkan dari budaya dan nilai-nilai yang mewarnai kehidupannya. Karena manusia merupakan insan yang berdiri dan berjalan di atas budayanya, maka pendidikan pada hakikatnya

merupakan upaya melestarikan atau mengkoservasikan dan mengembangkan nilai dan norma kebudayaan yang telah ada.

Menurut Teori Revitalisasi Budaya, pendidikan merupakan kegiatan yang pasti dan tidak mudah mengalami perubahan karena keadaan. Pandangan tersebut tercermin dari Aliran Esensialisme dan Perennialisme. Esensialisme menghendaki agar pendidikan bersandikan atas norma dan nilai yang telah teruji oleh waktu, dan menempatkan guru atau pendidik sebagai penentu dalam proses pendidikan. Kedudukan pendidik demikian penting karena mereka mengenal dengan baik tujuan yang ingin dicapai dan pengetahuan atau materi yang akan diajarkan.

Kehidupan menempati ruang budaya dan sosial yang dibangun secara bersama-sama, kemudian kehidupan bersama menghasilkan norma-norma dan nilai-nilai. Manusia sebagai individu dan kelompok memiliki kewajiban untuk mentaati dan menggunakannya sebagai pegangan dalam kehidupannya. Norma adalah kaidah yang mengikat, sedangkan nilai adalah konsep tentang baik dan buruk yang dijadikan pedoman dan pegangan hidup bagi masyarakat (Imam Barnadib, 1996: 32).

Bila Esensialisme berkehendak agar kehidupan saat ini selalu berpijak pada unsur-unsur budaya yang telah terpola dan diusahakan penerapannya, maka Perennialisme berkeinginan agar pendidikan dapat merevitalisasi *Liberal Arts*. Perennialisme berasal dari perennial yang bermakna hal-hal yang ada sepanjang masa. Perennialisme berpijak dari tradisi perkembangan intelektual yang hidup pada zaman Yunani dan abad pertengahan. Hal-hal yang ada sepanjang masa inilah yang perlu dipergunakan untuk menatap kehidupan sekarang yang penuh dengan dinamika. Perennialisme bersifat regresif, artinya kembali kepada kebenaran yang sesungguhnya sebagaimana telah diletakkan dasarnya oleh para



filsuf yang hidup pada abad tersebut di atas (Imam Barnadib, 1996: 33).

Pendidikan berdasarkan Teori Revitalisasi Budaya pada hakikatnya merupakan konservasi dan pengembangan nilai dan norma kebudayaan yang telah ada. Bilamana hal yang telah ada dijadikan pegangan, maka pendidikan akan menjadi pasti dan tidak mudah goyah dalam menghadapi keadaan yang selalu mengalami perubahan. Keaktifan dan kreativitas peserta didik dikembangkan dengan bersendikan atas pengetahuan dan keterampilan yang benar. Pendidikan persekolahan seyogyanya sama bagi setiap orang karena pendidikan pada hakikatnya merupakan pengembangan akal budi. Akal budi adalah potensi utama yang dimiliki oleh setiap manusia, dan perlu dikembangkan untuk menghadapi kehidupan.

Imam Barnadib (1996: 34-38) menyatakan bahwa praktik penyelenggaraan pendidikan yang bersendikan Teori Revitalisasi Budaya memiliki karakteristik sebagai berikut.

1. Subjek didik adalah manusia bebas yang memiliki tugas pengembangan potensi dalam konteks budaya, tetapi masih memerlukan tuntunan dari orang yang lebih ahli.
2. Pendidikan merupakan proses pengkonversian dan pengembangan nilai dan norma kebudayaan yang telah ada dan teruji oleh waktu.
3. Pendidikan akan menghasilkan subjek didik yang tahan uji dan mampu menemukan pengetahuan baru apabila prosesnya dilandasi oleh pengetahuan yang mantap secara tradisional.
4. Kurikulum pendidikan merupakan wahana pengembangan subjek didik yang muatan materinya (*content*) ditentukan terlebih dahulu.
5. Pendidikan berpusat pada guru, guru menentukan arah dan isi pendidikan serta mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik.

#### D. Teori Rekonstruksionisme

Teori Rekonstruksionisme menilai bahwa manusia memiliki potensi yang memungkinkan ia menjadi luwes dan kokoh (*firm*) dalam bersikap dan bertingkah laku. Selain itu, pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang diperoleh dari pendidikan. Karenanya, rekonstruksionisme berkeyakinan bahwa pembentukan manusia merupakan perpaduan antara potensi yang dimiliki dan pengaruh yang berasal dari luar. Terbentuknya manusia seperti itu dimungkinkan terjadi karena adanya kebudayaan. Manusia adalah makhluk pencipta kebudayaan dan sebaliknya kebudayaan membentuk manusia dan masyarakat. Rekonstruksionisme berkeyakinan bahwa nilai tertinggi dimiliki manusia bila ia memperoleh kesempatan untuk mengembangkan potensinya secara alami dan secara penuh.

Teori Rekonstruksionisme berasal dari analisis refleksi pendidikan terhadap perkembangan sosial ekonomi di Amerika Serikat pada saat itu. Menghadapi situasi kekacauan pada masa itu, Counts (Imam Barnadib, 1996: 45) mengharapkan adanya rekonstruksi sosial karena adanya kekurangteraturan kehidupan masyarakat Amerika yang disebabkan oleh berkecamuknya Liberalisme dengan *laissez faire-nya*. Ia menghendaki agar pendidikan menumbuhkan asas kooperatif dalam berbagai kehidupan, terutama dalam bidang ekonomi.

Teori Rekonstruksionisme memandang bahwa pendidikan merupakan institusi sosial dan sekolah pun merupakan bagian dari masyarakat. Karenanya, pendidikan diharapkan dapat berperan sebagai instrumen rekonstruksi masyarakat. Masyarakat yang direkonstruksi hendaknya lebih mengutamakan kebersamaan daripada kepentingan individual. Pendidikan bukan hanya mentransferkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi ia



mentransformasikan pengetahuan dan keterampilan menjadi kemampuan untuk memecahkan masalah, sehingga pengetahuan dan keterampilan tidak hanya dikuasai tetapi dijadikan bekal untuk membangkitkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif (Imam Barnadib, 1996: 49 – 50).

Peserta didik perlu dimotivasi agar mampu membayangkan kehidupan di masa yang akan datang. Selain itu, peserta didik dilatih berpikir kritis, memecahkan masalah, berbuat secara realistis dan berupaya untuk mengembangkan hal-hal terpuji yang bermanfaat untuk masa mendatang. Pendidik hendaknya menjadi pendidik yang transformatif, ia tidak hanya menerima dan menjalankan kurikulum yang ada, tetapi juga secara kritis mampu mengembangkan relevansi materi kurikulum tersebut dengan masyarakat dan permasalahannya.

Imam Barnadib (1996: 45-49) menyatakan bahwa praktik pendidikan yang memanfaatkan Teori Rekonstruksionisme sebagai landasannya memiliki karakteristik sebagai berikut.

- 1) Peserta didik adalah individu yang bebas, namun kebebasan dan perkembangan peserta didik dibatasi oleh ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik sehingga yang memilikinya masih sebatas kelompok menengah dan atas.
- 2) Pendidikan merupakan wahana rekonstruksi masyarakat untuk menumbuhkan asas kooperatif dalam berbagai bidang kehidupan.
- 3) Guru memiliki kemampuan untuk mentransformasikan pengetahuan dan keterampilan
- 4) Kurikulum merupakan wahana untuk mengembangkan kepribadian dan rasa percaya diri untuk mencegah individualistik dan alienasi, serta mencegah budaya hegemoni bercorak teknologi dan industri

**KEBIJAKAN PENDIDIKAN TK****A. Pengantar**

Selain paradigma dan teori pendidikan, landasan yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan TK adalah kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah diharapkan dapat memberikan dukungan yang memadai bagi pengembangan kreativitas dan inovasi para guru yang dibutuhkan oleh sekolah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Walaupun didisain untuk menangani seluruh pendidikan TK, tetapi kebijakan pendidikan pada tataran implementatif masih bersifat elitis karena masih mengatur sebagian kecil sektor pendidikan TK atau bagian kecil dari kelompok pendidikan TK.

Secara umum pada tingkat disain, kebijakan pendidikan TK sebuah Pemkab telah secara lengkap mengatur kewenangan pengelolaan pendidikan TK yang telah dilimpahkan dari Pemkab kepada Dinas Dikpora. Dinas Dikpora mengeluarkan kebijakan pendidikan untuk mengatur penyelenggaraan pendidikan TK adalah (1) perencanaan dan pembangunan pendidikan TK, (2) pembinaan kurikulum dan kesiswaan, (3) pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, dan (4) pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Keempat substansi kebijakan pendidikan TK tersebut dijadikan landasan oleh para pengelola TK untuk menyelenggarakan pendidikan TK.

Namun demikian, pada tingkat implementasi kebijakan tersebut belum mampu menyentuh semua bagian pendidikan TK. Karenanya, kebijakan masih bersifat elitis karena hanya menyentuh sebagian kecil kelompok yang harus dilayani oleh



pendidikan TK. Kebijakan pendidikan TK lebih memprioritaskan keberlanjutan program rutin dengan alokasi dana yang terbatas. Belum ada kebijakan yang dinamis dan memiliki adaptasi yang tinggi terhadap perubahan yang terjadi. Misalnya, ketika struktur organisasi di tingkat pusat mengalami perubahan dengan masuknya urusan TK ke dalam Direktorat PAUD, maka Dinas Dikpora tidak segera menyesuaikan perubahan tersebut tetapi masih menyatukan urusan TK dengan SD. Mungkin ada pertimbangan lain yang tidak diketahui oleh peneliti, tetapi kebijakan untuk tidak segera menyesuaikan struktur organisasi tersebut menimbulkan dampak kegamangan koordinasi di tingkat akar rumput.

Cooper, Fusarelli, dan Randall (2004: 43 - 45) menyatakan bahwa upaya untuk memahami kebijakan pendidikan dapat dilakukan dengan menganalisis kebijakan tersebut menggunakan empat dimensi teori kebijakan pendidikan. Empat dimensi teori kebijakan pendidikan adalah yaitu normatif, struktural, konstituen, dan teknikal. Dengan mengadopsi dan menerapkan keempat dimensi tersebut untuk menganalisis kebijakan, maka kebijakan pendidikan yang dihasilkan diharapkan mampu meningkatkan kualitas persekolahan.

Empat dimensi normatif, struktural, konstituen, dan teknikal membentuk kerangka konseptual teori kebijakan pendidikan. Kerangka kerja ini menjadi dasar untuk memahami kebijakan pendidikan melalui berbagai perspektif. Dimensi normatif sebuah kebijakan pendidikan akan mengungkapkan apakah kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki landasan ideologi yang layak, menggambarkan norm-norma yang berlaku dalam masyarakat, memberikan manfaat yang besar, dan melanjutkan atau memperluas kebijakan yang lalu.

Dimensi struktural sebuah kebijakan pendidikan akan menuntun kita untuk memahami struktur organisasi, sistem kelembagaan, bentuk dan jenis kebijakan pendidikan. Pengkajian kebijakan pendidikan menggunakan dimensi struktural akan menghasilkan refleksi hubungan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Selain itu, pengkajian kebijakan pendidikan menggunakan dimensi struktural akan mengungkap pertentangan antar program pemerintah pusat dan provinsi dengan program pemkab bagi institusi pendidikan. Bentuk kebijakan pendidikan dapat berupa peraturan makro, meso, dan mikro, dimana pelaksanaan suatu kebijakan makro akan efektif bila kebijakan turunannya (meso dan mikro) telah ditetapkan.

Dengan menggunakan dimensi konstituen, analisis atas kebijakan pendidikan akan menghasilkan pemahaman terhadap siapa saja yang terlibat dalam penyusunan, implementasi, dan penilaian kebijakan, upaya apa yang dilakukan kelompok kepentingan untuk mempengaruhi muatan dan implementasi kebijakan tersebut, dan bagaimana peran konstituen dalam penyusunan, pengimplementasian, dan penilaian kebijakan. Ketika konstituen menyepakati muatan kebijakan pendidikan atau selaras dengan kepentingan kelompoknya, ia akan mendukungnya dengan sepenuh hati. Di sisi lain, bila kebijakan tersebut tidak sesuai dengan kepentingannya atau mengancam keberadaannya, konstituen akan berupaya menolak atau menghambat implementasi kebijakan tersebut. Oleh karena itu, konstituen tidak mengkaji secara mendalam hasil evaluasi kebijakan pendidikan, tetapi memaksakan evaluasi dan kecukupan kebijakan agar sesuai dengan keinginannya.

Berdasarkan dimensi teknis, analisis kebijakan pendidikan akan berupaya mengungkap keterkaitan antara perencanaan,



penerapan, dan penilaian kebijakan pendidikan. Analisis perlu memperhatikan pengaruh kebijakan lembaga pendidikan, seperti waktu, pendidik, sumber daya, dan instruksi terhadap proses pendidikan. Dimensi ini akan memaknai kenyataan apa yang akan terjadi sebagai dampak dari implementasi kebijakan. Siapa dan bagaimana penilaian kebijakan akan dilaksanakan? Penilaian kebijakan dapat dilakukan untuk mengetahui pengaruh formatif jangka pendek atau pengaruh sumatif berjangka panjang. Penilaian pengaruh formatif suatu kebijakan meliputi implementasi, penerimaan, keterlibatan pemangku kepentingan dalam kebijakan. Penilaian pengaruh sumatif merupakan evaluasi untuk mengetahui pengaruh jangka panjang. Namun, penilaian sumatif jangka panjang dapat menimbulkan beberapa masalah, seperti data yang hilang, keusangan minat yang terungkap, dan evaluasi yang terlalu lambat untuk mengubah kebijakan yang tidak berjalan.

Berlakah kebijakan pendidikan dapat meningkatkan kualitas persekolahan? Pengkajian terhadap data yang diperoleh menunjukkan bahwa pernyataan tersebut mengandung kebenaran. Kebijakan pendidikan Pemerintah memiliki dampak positif terhadap perkembangan kualitas pendidikan TK baik negeri maupun swasta. Kebijakan perijinan dan akreditasi, misalnya, memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas TK. Cooper, Fusarelli, dan Randall (2004: 46) menyatakan bahwa Teori sistem bermanfaat untuk memahami perkembangan dimensi ini karena kita dapat menelusuri dampak teknis dan instrumental dari kebijakan pendidikan. Karena masalahnya harus diurai secara rinci, maka tidak ada analisis kebijakan pendidikan yang lengkap tanpa memeriksa dampak dan konsekuensi dari kebijakan yang berlaku.

Woodhead (2006: 4 - 5) menyatakan bahwa kebijakan dan praktik PAUD dibentuk oleh pergulatan pemikiran dan wacana dunia anak-anak. Peningkatan kualitas kehidupan anak-anak merupakan prioritas dunia internasional saat ini, hal ini ditunjukkan dengan adanya penelitian dan inisiatif kebijakan PAUD oleh berbagai pemerintah. Berbagai negara berupaya untuk meningkatkan program PAUD, diskusi dan penelitian tentang paradigma dan teori pendidikan anak usia dini, serta praktik PAUD terus digalakkan.

Hasil analisis Woodhead yang menyatakan bahwa praktik pendidikan dipengaruhi oleh kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah terungkap dalam wawancara dengan para guru, kepala sekolah dan pengawas di ketiga TK yang diteliti. Ketika ditanyakan empat faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan TK, mereka menjawab bahwa salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Penyelenggaraan pendidikan TK tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tentu saja, kebijakan pendidikan yang dikeluarkan dapat berpengaruh secara positif atau negatif terhadap keberadaan TK. Namun, kebijakan pendidikan TK yang dikeluarkan oleh Pemerintah dirancang agar mampu meningkatkan kualitas persekolahan yang berada di bawah kendalinya. Tujuan tersebut sejalan dengan Cooper, Fusarelli, dan Randal] (2004: 161) yang menyatakan bahwa sebuah kebijakan pendidikan dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Perbaikan tersebut dilakukan melalui cara penyediaan program dan staf yang lebih baik, standar dan kurikulum yang lebih kuat, dan hasil tes siswa dan angka kelulusan yang lebih tinggi agar persckolah menjadi lebih baik.



Memperhatikan diskusi yang dipaparkan di atas, bahasan kebijakan pendidikan TK diawali dengan mendeskripsikan hakikat kebijakan terlebih dahulu, kemudian mendeskripsikan Hakikat Kebijakan Pendidikan, Bentuk Kebijakan, Landasan Kebijakan, Arah Kebijakan, dan diakhiri dengan paparan tentang Substansi Kebijakan kebijakan pendidikan TK.

#### **B. Hakikat Kebijakan Pendidikan**

*The section of ECE and Inclusive Education, UNESCO (2007)* mendefinisikan kebijakan sebagai berikut.

*The American Heritage Dictionary of the English Language (1969)* has two definitions of policy. Policy is "Any plan or course of action adopted by a government, political party, business organization or the like designed to influence and determine decisions, actions and other matter," and policy is "A course of action, guiding principle or procedure considered to be expedient, prudent or advantageous."

Dalam buku "*The Dynamics of Education Policymaking*" Wadi Haddad (1994), mendefinisikan kebijakan sebagai berikut.

*Policy is: A set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and means of achieving them within a specified situation where those decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve (Jenkins 1993).*

Pengertian kebijakan secara ringkas dikemukakan oleh Evans (2007) bahwa kebijakan dapat berupa kumpulan konstitusi atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif dan legislatif tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan kota, dan pengelola pendidikan.

Kebijakan pendidikan perlu ditetapkan secara cermat dan penuh kehati-hatian. Imoto (2005: 98) menyatakan bahwa

kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kepentingan masyarakat dan Negara yang lebih luas. Dengan demikian, kebijakan pendidikan sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan Negara. Ketiganya tidak dapat dipisahkan dan saling mempengaruhi. Para pembuat kebijakan harus memperhatikan kondisi masyarakat ketika akan membuat kebijakan agar implementasi kebijakan pendidikan dapat berjalan dengan efektif.

Tilaar & Riant Nugroho (2008) menyatakan bahwa kebijakan pendidikan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kebijakan pendidikan sebagai bagian dari kebijakan publik, dan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik. Kebijakan pendidikan berada dalam tataran normatif dan tatanan deskriptif. Kebijakan publik memiliki ciri-ciri (1) kebijakan yang dibuat lembaga negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, (2) kebijakan yang mengatur kehidupan bersama, masalah bersama, semua yang berada di wilayah publik, dan (3) memiliki tingkat pemanfaatan baik oleh pengguna langsung maupun tidak langsung.

Kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan suatu bangsa, bahkan mempertaruhkan eksistensi negara bangsa dalam kanvas persaingan global, karenanya kebijakan pendidikan harus mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi. Pendidikan TK, sebagai bagian dari sistem pendidikan secara keseluruhan, perlu memiliki kebijakan yang memadai dan unggul. Mengingat pendidikan TK merupakan landasan bagi pendidikan selanjutnya, maka kebijakan pendidikan TK harus mendapatkan perhatian dan prioritas utama untuk ditetapkan dan diterapkan secara cermat dan cerdas. Lebih lanjut, Riant Nugroho (2008: 35-37) menyatakan bahwa kebijakan pendidikan adalah kebijakan



publik dalam bidang pendidikan berupa kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, dan tercakup di dalamnya tujuan pendidikan, serta bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai.

Memperhatikan berbagai pendapat tentang kebijakan Pendidikan TK yang dipaparkan di atas dapat didefinisikan bahwa kebijakan pendidikan TK adalah kebijakan publik dalam bidang pendidikan berupa kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, dan tercakup di dalamnya tujuan pendidikan, serta bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai.

Yuliani N. Sujiono (2009: 47-51) menganjurkan agar pemerintah berperan dan bertanggungjawab terhadap pengembangan dan keberlanjutan pendidikan TK dengan mewujudkan berbagai kebijakan pendidikan TK secara nasional. Pemerintah telah bertindak lebih dari anjuran Yuliani N. Sujiono tersebut, yaitu selain membuat berbagai kebijakan pendidikan nasional, pemerintah telah memutuskan untuk melakukandesentralisasi pendidikan mulai tahun 2001.

Sejak kebijakan itu bergulir, banyak tanggung jawab dan kewenangan administrasi bidang pendidikan didelegasikan dari Kemendikbud dan cabang-cabang regional kepada pemerintah Kota dan Kabupaten. Kebijakan ini mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan TK. Menurut Tilaar (2004: 85 - 117) sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat terjadi desentralisasi pendidikan. Desentralisasi pendidikan merupakan suatu pendelegasian sebagian kewenangan penetapan kebijakan pendidikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Lebih lanjut, Arif Rohman & Teguh Wiyono (2010: 30-31) menyatakan bahwa penerapan desentralisasi pendidikan menekankan kepada pemberian kewenangan lebih besar bagi pemerintah kabupaten dan kota untuk mengelola sektor pendidikan, terutama pendidikan pra-sekolah sampai pendidikan menengah. Secara konseptual, desentralisasi pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu: Pertama, desentralisasi kewenangan di sektor pendidikan. Artinya, pendelegasian sebagian kewenangan dalam bidang pendidikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kedua, desentralisasi pendidikan yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pihak sekolah untuk melaksanakan manajemen peningkatan mutu pendidikan.

Berkaitan dengan adanya desentralisasi atau otonomi pendidikan seperti telah dipaparkan di atas, penelitian tentang kebijakan pendidikan akan difokuskan pada berbagai kebijakan pendidikan TK yang telah ditetapkan oleh Pcmkab Sleman. Kajian akan difokuskan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Pcmkab Sleman. Dengan demikian, kebijakan pendidikan TK yang dikeluarkan oleh Pcmkab Sleman seyogyanya (1) mempunyai bentuk kebijakan yang sesuai dengan sistem yang dianut, (2) mempergunakan landasan yang kokoh, (3) memiliki arah kebijakan yang jelas, dan (4) mengandung substansi kebijakan agar mencapai tujuan yang ditetapkan.

### **C. Bentuk Kebijakan**

Riant Nugroho (2011: 104) secara sederhana mengkategorikan bentuk kebijakan publik menjadi tiga, yaitu:

- 1) Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, seperti hasil survei dalam kasus kebijakan publik di kabupaten Sleman dapat berupa peraturan daerah (Perda). Contoh: Peraturan



Daerah Kabupaten Sleman nomor 8 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

- 2) Kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah, atau penjabar pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Bupati (Perbup), atau Surat Keputusan Bupati (SK Bupati). Contoh: Peraturan Bupati Sleman nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah; Peraturan Bupati Sleman nomor 30 tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah; dan
- 3) Kebijakan publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Bupati. Contoh: Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman Nomor 02/2011 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan bagi Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman Tahun Pelajaran 2011/2011; Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman Nomor 01 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman Tahun Pelajaran 2011/2012.

Selanjutnya, Riant Nugroho (2011: 31) menyatakan bahwa Indonesia menganut sistem kebijakan publik yang berpola kontinentalis. Menurut aliran kontinentalis, hukum adalah salah



satu kebijakan publik, baik dari sisi wujud, maupun produk, proses, atau dari sisi muatan. Dari sisi produk atau wujud, kebijakan publik dapat berupa hukum, dapat pula berupa konvensi atau kesepakatan. Dari sisi proses, hukum merupakan produk dari suatu Negara atau pemerintah, sehingga posisi rakyat atau publik lebih sebagai pencrma produk atau penerima akibat dari perilaku Negara

Dampak dari pola kontinentalis adalah sebuah kebijakan akan dapat sepenuhnya diimplementasikan secara efektif apabila telah tersedia sekian banyak kebijakan pelaksanaannya. Artinya, setiap Peraturan bupati, misalnya, akan dapat dilaksanakan secara efektif apabila telah tersedia peraturan pelaksanaannya berupa peraturan Kepala Dinas. Contohnya: Perbup Sleman nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah diikuti dengan penetapan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Sleman Nomor 01 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah di Lingkungan Dinas Dikpora Sleman Tahun Ajaran 2011/2012. Dari bahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Pemkab Sleman menganut sistem kontinentalis dalam penyusunan kebijakan Pendidikan. Kebijakan pendidikan Pemkab Sleman memiliki 3 bentuk, yaitu kebijakan bersifat makro, kebijakan bersifat meso, dan kebijakan bersifat mikro.

#### **D. Landasan Kebijakan**

Sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan pendidikan, Pemkab. Sleman menetapkan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten Sleman. Urusan pemerintahan yang



menjadi kewenangan Pemkab Sleman berjumlah 31 urusan pemerintahan. Dua urusan dari 31 urusan tersebut adalah bidang pendidikan, dan bidang kepemudaan dan olahraga. Bidang pendidikan dirinci menjadi subbidang (1) kebijakan, (2) pembiayaan, (3) kurikulum, (4) sarana dan prasarana, (5) pendidik dan tenaga kependidikan, (6) pengendalian mutu pendidikan. Bidang kepemudaan dan olahraga dirinci menjadi subbidang (1) kepemudaan, dan (2) olahraga (Lampiran Perda nomor 8 tahun 2008).

Untuk melengkapi Perda nomor 8 tahun 2008, Pemkab Sleman menetapkan Perda nomor 9 tahun 2009 tentang organisasi perangkat daerah. Perda ini menetapkan bahwa yang dimaksud dengan Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu dinas yang dibentuk berdasarkan Perda Sleman nomor 9 Tahun 2009 adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dinas Dikpora). Pasal 9 mengatur kedudukan, tugas, dan fungsi Dinas Dikpora. Pasal 10 mengatur Susunan Organisasi Dinas Dikpora.

Uraian rinci tentang tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Dinas Dikpora diatur dalam Perbup Sleman nomor 30 tahun 2009. Berdasarkan Perbup ini, struktur organisasi Dinas Dikpora didasarkan pada pembagian tugas dan fungsi lembaga, bukan berdasarkan jenjang pendidikan. Perbup Sleman nomor 30 tahun 2009, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 3, ayat (1) mengatur susunan organisasi Dinas Dikpora sebangun dengan ketentuan pada Pasal 10 ayat (1) Perda Sleman nomor 9 Tahun 2009 seperti tersebut di atas.

Memperhatikan ketentuan Perda Sleman nomor 9 Tahun 2009 dan Perbup Sleman nomor 30 Tahun 2009, menunjukkan bahwa urusan pendidikan TK berada dalam tiga bidang yang

berbeda, yaitu (1) Bidang Pembinaan Kurikulum dan Kesiswaan; (2) Bidang Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan; dan (3) Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan. Pengelolaan Pendidikan TK terpisah dari pengelolaan PAUD yang berada dalam koordinasi Bidang Pemberdayaan Pendidikan Nonformal dan Informal.

Setiap bidang memiliki tiga seksi yang menangani tugas dan fungsinya sesuai dengan jenjang sekolah, yaitu jenjang TK dan SD, SMP, dan SMA/SMK. Dengan demikian, urusan pendidikan TK ditangani oleh tiga seksi berbeda yang berada di bawah 3 bagian berbeda, yaitu (1) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan TK dan SD, (2) Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan TK dan SD, dan (3) Seksi Sarana dan Prasarana TK dan SD.

Secara lengkap, tugas dan fungsi Seksi Kurikulum dan Kesiswaan TK dan SD diatur dalam Perbup nomor 30 Tahun 2009 Pasal 17. Tugas dan fungsi Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan TK dan SD diatur dalam Perbup nomor 30 Tahun 2009 Pasal 25. Tugas dan fungsi Seksi Sarana dan Prasarana TK dan SD diatur dalam Perbup Nomor 30 Tahun 2009 Pasal 25.

Memperhatikan pengaturan tugas kewenangan setiap seksi yang ditetapkan dalam Perbup Sleman Nomor 30 Tahun 2009 menunjukkan bahwa setiap seksi telah memiliki tugas dan fungsi yang lengkap. Kelengkapan tugas dan fungsi tersebut ditandai dengan adanya tugas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian. Karena setiap seksi berada di bidang yang berbeda maka koordinasi antara bidang sangat diperlukan agar pelaksanaan tugas dan fungsi setiap seksi dapat berjalan dengan efektif dan efisien, dan tidak terjadi ego sektoral di setiap seksi.



### **E. Arah Kebijakan**

Arah kebijakan pembangunan pendidikan kabupaten Sleman termaktub dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2011 – 2015 yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Dikpora Sleman nomor 402/KPTS/2010. Renstra Dinas Dikpora menetapkan arah kebijakan pembangunan pendidikan yang harus diacu oleh para pemangku kepentingan bidang pendidikan di kabupaten Sleman adalah:

- 1) meningkatnya kesempatan belajar bagi anak usia prasekolah, sekolah dan masyarakat melalui jalur pendidikan formal dan nonformal;
- 2) meningkatnya kualifikasi kompetensi dan profesionalitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lainnya;
- 3) meningkatnya pendidikan karakter dan pemahaman budaya;
- 4) tersedia dan terlaksananya kurikulum dalam pembelajaran yang berwawasan lingkungan, budaya, dan mitigasi bencana;
- 5) meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan;
- 6) tersedianya data lembaga pendidikan yang valid;
- 7) meningkatnya transparansi publik dalam pengelolaan lembaga; dan
- 8) meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan bidang pendidikan.

Berdasarkan Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan agar arah pembangunan daerah tidak boleh bertentangan dengan arah pembangunan nasional. Karenanya, arah pembangunan pendidikan di daerah

merupakan penjabaran atau rincian dari arah pembangunan pendidikan nasional.

Selain itu, Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 mengamanatkan agar arah kebijakan pembangunan pendidikan setiap kabupaten dirumuskan secara padat, jelas, dan mudah dipahami. Ketentuan tersebut bertujuan agar arah kebijakan tersebut dapat diacu dan dipedomani oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan di kabupaten Sleman. Bila arah kebijakan dijadikan acuan atau pedoman dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan, maka diharapkan hasil pembangunan pendidikan akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

#### **F. Substansi Kebijakan**

Karena kebijakan pendidikan merupakan salah satu faktor yang penting dan menentukan bagi kemajuan suatu Negara-bangsa, maka kebijakan pendidikan harus memiliki substansi yang jelas (Riant Nugroho, 2011: 20 - 24). Kejelasan substansi menjadi penting agar kebijakan dapat diimplementasikan oleh semua pemangku kepentingan.

Berdasarkan logika Perbup Sleman nomor 30 tahun 2009, substansi kebijakan pendidikan mengatur dan mengelola empat bidang, yaitu: perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pendidikan, pembinaan kurikulum dan kesiswaan, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, dan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Keempat kebijakan pendidikan TK tersebut disajikan sebagai berikut.

- 1) Kebijakan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Pendidikan TK



Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 6 dokumen perencanaan pembangunan daerah yang saling berkaitan, yaitu (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), (2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD), (3) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), (4) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), (5) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), dan (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Secara substantif, keenam dokumen memiliki keterkaitan yang sangat erat dan memiliki hubungan hirarkis. Keterkaitan yang bersifat hirarkis berarti bahwa dokumen perencanaan dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen perencanaan dengan jangka waktu yang lebih pendek.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sleman 2011 – 2015 Bab VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah menetapkan salah satu urusan wajib pembangunan adalah bidang pendidikan. Kebijakan pembangunan pendidikan dalam RPJMD Sleman 2011-2015 tersebut di atas diturunkan ke dalam RenstraSKPD atau Renstra Dinas Dikpora Sleman 2011 – 2015. Untuk pembangunan pendidikan TK selama 5 tahun, Renstra Dinas Dikpora 2011 – 2015 menetapkan program:

- (1) Peningkatan kualitas pembelajaran, SDM, sarana dan prasarana PAUD,

- (2) Peningkatan kualitas pembelajaran, SDM, sarana dan prasarana wajar dikdas 9 tahun,
- (3) Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan,
- (4) Pengembangan kreativitas siswa dan guru, dan
- (5) Manajemen pelayanan pendidikan.

Selain dijabarkan ke dalam Renstra SKPD, RPJMD juga dijabarkan ke dalam RKPD Sleman Tahun 2011. RKPD Sleman 2011 memuat perencanaan kinerja pembangunan yang harus dicapai selama kurun waktu 1 tahun. RKPD Sleman 2011 ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati Sleman nomor 9 tahun 2010. RKPD Sleman Tahun 2011 merupakan pelaksanaan tahun pertama dari RPJMD Sleman 2011-2015.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sleman 2011 Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah menetapkan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Urusan Wajib Pendidikan. Tidak semua program pembangunan urusan wajib pendidikan mengalokasikan program untuk pembangunan pendidikan TK. Program dan kegiatan pembangunan pendidikan TK yang termuat dalam RKPD Sleman 2011 adalah sebagai berikut.

- 2.1. Program pendidikan anak usia dini
- 2.2. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
- 2.3. Fasilitasi operasional TK-SD Model;
- 2.4. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
- 2.5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
- 2.6. Program Pengembangan Kreativitas Siswa dan Guru.

Pembangunan Pendidikan yang terdapat dalam RKPD Sleman 2011, kemudian dijadikan pedoman oleh Dinas Dikpora untuk menyusun Renja SKPD Dinas Dikpora. Renja 2011 disusun sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Dikpora 2011 – 2015 dan RPJMD Sleman 2011 – 2015. Salah satu kegiatan



pembangunan yang terdapat dalam Renja 2011 adalah kegiatan pembangunan pendidikan TK.

RPJMD Sleman 2011 – 2015, Renstra SPKD 2011 – 2015, Renja SKPD 2011, dan RKPD Sleman 2011 dijadikan dasar untuk menyusun RAPBD 2011. RAPBD diundangkan menjadi APBD 2011 dalam bentuk Perda nomor 15 Tahun 2010. Secara garis besar, anggaran dan belanja pembangunan ditetapkan sebagai berikut.

1. Pendapatan	Rp.1,026,877,000,000
2. Belanja	Rp.1,073,315,000,000
3. Pembiayaan	Rp. 46,438,000,000

Dari komponen Belanja dalam APBD Sleman 2011 tersebut di atas, dan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PKKD Sleman Nomor:21/1.01.01/Kep.Ka.DPKKD/DPA-SKPD/2011 Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Dinas Dikpora Tahun Anggaran 2011, Urusan Wajib Pendidikan yang dikelola Dinas Dikpora memperoleh alokasi dana sejumlah Rp. 469.713.601.883,61

Dari Alokasi Belanja Langsung tersebut di atas, Urusan pendidikan TK mendapatkan program dan kegiatan:

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Rp.1.177.183.000
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 142.500.000
15. Program PAUD	Rp. 449.751.000
16. Program Wajar Dikdas 9 Tahun	Rp. 404.079.796
45.16.82. Fasilitasi Operasional TK/SD Model	Rp. 226.000.000
20. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 586.300.100
22. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rp.2.494.325.100

23. Program Pengembangan Kreativitas Siswa dan Guru	- Rp 1.135.261.000
---	--------------------

Dari data di atas menunjukkan bahwa pendidikan TK mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 2.357.796.200,00. Anggaran sebesar itu dialokasikan untuk delapan program yang diuraikan menjadi 13 kegiatan. Bila dirunut secara hirarkis, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pendidikan TK dalam RPJMD 2011 – 2015 memiliki lima program. RPJMD belum merinci program pembangunan pendidikan ke dalam subbidang pembangunan pendidikan TK, barulah Rentsra Dinas Dikpora 2011 – 2015 mengalokasikan 5 program pembangunan pendidikan TK, dan RKPD Sleman 2011 menetapkan lima program, dan 16 kegiatan pembangunan pendidikan TK. Renja Dinas Dikpora 2011 menetapkan enam program yang diuraikan menjadi 12 kegiatan pembangunan pendidikan TK. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Dikpora 2011 menetapkan tujuh program yang diuraikan menjadi 13 kegiatan pembangunan pendidikan TK.

Salah satu kebijakan pembangunan pendidikan TK yang cukup visioner dari Pemkab Sleman adalah pendirian TK-SD Model. Pendirian TK-SD Model ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sleman Nomor 185/ Kep.KDH/A/2008 tentang Pendirian TK-SD Model Kabupaten Sleman. Pendirian TK-SD Model dimaksudkan agar tersedia sekolah percontohan atau model TK-SD bagi persekolahan atau pendidikan di wilayah kabupaten Sleman, sehingga dapat meningkatkan kualitas PAUD dan pendidikan dasar yang berlandaskan budaya bangsa dan wawasan global.

Pendirian TK-SD Model yang dicanangkan oleh Pemkab Sleman periode yang lalu, masih didukung dan diteruskan oleh



Pemkab Sleman periode saat ini. Kebijakan untuk meneruskan pengembangan TK-SD Model oleh Pemkab Sleman periode saat ini perlu mendapat dukungan dan apresiasi dari masyarakat kabupaten Sleman. Penetapan kebijakan tersebut terlihat dari pemunculan pengalokasian secara khusus pada kegiatan fasilitasi operasional TK-SD Model sebesar Rp. 226.000.000. Dengan dukungan tersebut, pengembangan TK-SD Model diharapkan berjalan menuju arah dan tujuan yang ditetapkan.

## 2) Kebijakan Pembinaan Kurikulum dan Kesiswaan TK

Selain menetapkan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pendidikan TK, Pemkab Sleman menetapkan berbagai kebijakan dalam pembinaan, pengembangan, dan pengawasan kurikulum dan kesiswaan TK, yang meliputi:

- a) Peraturan Bupati Sleman nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah. Perbup ini berisi mengenai kebijakan tentang (1) ketentuan umum; (2) tujuan dan azas; (3) pelaksanaan penerimaan peserta didik baru; (4) hari masuk sekolah; (5) biaya pendaftaran; (6) penerimaan peserta didik pindahan; (7) seragam sekolah; (8) rencana kerja dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja sekolah; (9) seleksi; dan (10) penutup;
- b) Untuk melaksanakan Perbup nomor 10 tahun 2009, Pemkab Sleman menetapkan petunjuk pelaksanaannya berupa Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman Nomor 01 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman Tahunan Ajaran

- 2011/2012. Peraturan ini berisi mengenai (1) pengertian; (2) tujuan dan azas; (3) tahapan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru; (4) persyaratan dan waktu pelaksanaan: TK, SD, SMP, SMA dan SMK; (5) seleksi: umum, seleksi sekolah andalan, penerimaan siswa pindahan; (6) biaya pendaftaran; (7) seragam sekolah; (8) jumlah peserta setiap rombongan belajar; (9) prestasi akademik atau prestasi non akademik; (10) rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah; (11) hari-hari awal masuk sekolah, dan lain-lain; (12) sanksi; dan (13) penutup;
- c) Melengkapi kebijakan penerimaan peserta didik baru, dan agar terjadi pengaturan rentang waktu pembelajaran yang cukup untuk meningkatkan layanan pendidikan yang baik, tertib, dan teratur, Dinas Dikpora Sleman mengeluarkan peraturan tentang pedoman penyusunan kalender pendidikan berupa Peraturan Kepala Dinas Dikpora Sleman nomor 02 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan bagi Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman. Peraturan ini berisi (1) pengertian; (2) tahun pelajaran; (3) persiapan tahun pelajaran; (4) minggu efektif belajar sekolah; (5) kegiatan awal pembelajaran; (6) proses pembelajaran; (7) hari libur sekolah; (8) lain-lain; dan (9) penutup;
- d) Dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan melalui pendirian satuan pendidikan, Pemkab Sleman menetapkan Keputusan Kepala Dinas Dikpora nomor 369/KPTS/2010. Peraturan ini berisi tentang persyaratan pendirian satuan pendidikan dan



tatacara pendirian satuan pendidikan oleh masyarakat atau swasta;

- e) Pengelolaan pembiayaan sekolah diatur dengan Perbup Sleman nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS). Perbup ini dikeluarkan untuk efektivitas dan kelancaran pengelolaan, serta untuk mewujudkan tertib administrasi penatausahaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Karenanya, Perbup ini berisi (1) ketentuan umum; (2) maksud, tujuan, dan asas; (3) pengelolaan APBS: pengelolaan APBS, pengelola APBS; (4) struktur anggaran pendapatan dan belanja sekolah; (5) rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah: penyusunan rencana kerja dan anggaran sekolah, penetapan APBS, pengesahan APBS; (7) pengelolaan APBS: pelaksanaan APBS, penatausahaan APBS; (8) perubahan APBS; (9) pelaporan; (10) pengawasan; (11) sanksi; dan (12) penutup;
- f) Untuk menjaga mutu kurikulum dan kesiswaan TK, Pemkab Sleman mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 58 tahun 2009 tentang Standar PAUD. Menurut Permendiknas ini, mutu yang berkaitan dengan kurikulum dan kesiswaan meliputi: standar tingkat pencapaian perkembangan peserta didik; standar isi, standar proses, dan standar penilaian; dan
- g) Pemantauan terhadap mutu pendidikan TK dilakukan melalui proses akreditasi. Pelaksanaan akreditasi TK berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan diperkuat dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 52

Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA).

3) Kebijakan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kebijakan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh Pemkab Sleman dengan mengimplementasikan berbagai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Berbagai peraturan perundangan tersebut, meliputi:

- a) Untuk melengkapi Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah RI mengeluarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-undang ini mengatur (1) Kedudukan, Peran, dan Tujuan Guru dan Dosen; (2) Prinsip Profesionalitas Guru dan Dosen; (3) Guru: Kompetensi, Kualifikasi, dan Sertifikasi; Hak dan Kewajiban; Wajib Kerja dan Ikatan Dinas; Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian; Pembinaan dan Pengembangan; Penghargaan; Perlindungan; Cuti; Organisasi Profesi dan Kode Etik; (4) Dosen: Kompetensi, Kualifikasi, Sertifikasi, dan Jabatan Akademik; Hak dan Kewajiban; Wajib Kerja dan Ikatan Dinas; Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian; Pembinaan dan Pengembangan; Penghargaan; Perlindungan; Cuti; (5) Sanksi bagi Guru, Dosen, dan Penyelenggara Pendidikan; dan (6) Ketentuan Peralihan dan Penutup;
- b) Untuk mengelola dan mengatur para guru, Undang-undang Guru dan Dosen dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru. PP ini mengatur tentang (1) Kompetensi yang harus dimiliki oleh Guru; (2) Proses Sertifikasi yang perlu diikuti oleh



Guru; (3) Anggaran Peningkatan Kualifikasi Akademik dan Sertifikasi Pendidik bagi Guru dalam Jabatan; (4) Tunjangan Profesi; (5) Tunjangan Fungsional dan Subsidi Tunjangan Fungsional; (6) Tunjangan Khusus; (7) Kesetaraan Tunjangan; (8) Maslahat Tambahan; (9) Penghargaan dan Promosi; (10) Penilaian, Penghargaan, dan Sanksi oleh Guru kepada Peserta Didik; (11) Perlindungan dalam Melaksanakan Tugas dan Hak atas Kekayaan Intelektual; (12) Akses Memanfaatkan Sarana dan Prasarana Pembelajaran; (13) Kebebasan untuk Berserikat dalam Organisasi Profesi Guru; (14) Kesempatan Berperan dalam Penentuan Kebijakan Pendidikan; (15) Pengembangan dan Peningkatan Kualifikasi Akademik, Kompetensi, dan Keprofesionalan Guru; (16) Cuti; (17) Beban Kerja; (18) Wajib Kerja dan Pola Ikatan Dinas; (19) Pengangkatan dan Penempatan pada Satuan Pendidikan, pada Jabatan Struktural; (20) Pemindahan; dan (21) Sanksi;

- c) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Sebagian peraturan ini berisi tentang (1) Kualifikasi Guru TK yaitu Guru pada PAUD/TK/RA harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi; dan (2) Standar kompetensi guru PAUD/TK/RA mencakup kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional;
- d) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang

Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya. Permen ini mengatur tentang: (1) Rumpun Jabatan, Jenis Guru, Kedudukan, dan Tugas Utama; (2) Kewajiban, Tanggungjawab, dan Wewenang; (3) Instansi Pembina dan Tugas Instansi Pembina; (4) Unsur dan Sub unsur Kegiatan; (5) Jenjang Jabatan dan Pangkat; (6) Rincian Kegiatan dan Unsur yang Dinilai; (7) Penilaian dan Penetapan Angka Kredit; (8) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Guru; (9) Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali, dan Pemberhentian dari jabatan Fungsional Guru; (10) Sanksi dan Ketentuan Peralihan. Kebijakan yang terdapat dalam Permen ini akan berjalan secara efektif mulai tahun 2013 setelah dilakukan sosialisasi dan penyiapan berbagai perangkat pendukung penilaian kinerja, seperti penyiapan guru senior yang berhak melakukan penilaian terhadap angka kredit yang diajukan oleh guru;

- e) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan. Permendiknas ini merupakan penjabaran dan pelaksanaan Pasal 52, 53, dan 54 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Permendiknas ini mengatur cara pemenuhan beban kerja guru.

Memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang di lapangan, Pemerintah mengubah Pasal 5 Permendiknas 39/2009 dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan. Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Menteri Pendidikan



Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan.

- f) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2011 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan. Permendiknas ini merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Pasal 12 ayat (6) yang berbunyi "Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kompetensi dan penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri". Permendiknas ini mengatur pelaksanaan Sertifikasi guru dalam jabatan yang dilaksanakan melalui (a) penilaian portofolio; (b) pendidikan dan latihan profesi guru; (c) pemberian sertifikat pendidik secara langsung; atau (d) pendidikan profesi guru;
- g) Sebagai bentuk penghargaan bagi guru PNS yang belum memperoleh tunjangan profesi, Pemerintah RI mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil. Perpres ini menetapkan tambahan penghasilan sebesar Rp. 250.000 per bulan bagi guru PNS yang belum menerima tunjangan profesi;
- h) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah. Permendiknas ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 38 ayat (5) "Kriteria kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri".

Menurut Permendiknas ini, seorang guru dapat menjadi kepala TK apabila ia memiliki kualifikasi sebagai berikut: (1) kualifikasi umum: (a) Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau nonkependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi; (b) berusia setinggi-tingginya 56 tahun pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah; (c) Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA; dan (d) Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang; (2) Kualifikasi Khusus: (a) Berstatus sebagai guru TK/RA; (b) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru TK/RA; dan (c) Memiliki sertifikat kepala TK/RA yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah. Selain memiliki kualifikasi umum dan khusus, ia juga harus memiliki kompetensi (1) kepribadian; (2) manajerial; (3) kewirausahaan; (4) supervisi; dan (5) sosial.

- i) Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil. Peraturan bersama ini mengatur penataan dan pemerataan guru antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan, antarkabupaten/kota, dan/atau antarprovinsi dalam upaya mewujudkan peningkatan dan pemerataan



mutu pendidikan formal secara nasional dan pencapaian tujuan pendidikan nasional, guru pegawai negeri sipil dapat dipindahtugaskan pada satuan pendidikan di kabupaten/kota, dan provinsi lain;

- j) Permendiknas Nomor 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah. Permendiknas ini mengatur penugasan guru sebagai kepala sekolah/madrasah. Penugasan sebagai kepala sekolah/madrasah merupakan tugas tambahan dan berdurasi 4 tahun, serta dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya jika memiliki prestasi kerja yang baik. Permendiknas ini mengandung (1) Ketentuan Umum; (2) Syarat-syarat Guru yang Diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah/Madrasah; (3) Penyiapan calon Kepala Sekolah/Madrasah; (4) Proses Pengangkatan Kepala Sekolah/Madrasah; (5) Masa Tugas; (6) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan; (7) Penilaian Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah; (8) Mutasi dan Pemberhentian Tugas Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah; dan (9) Ketentuan Peralihan dan Penutup.
- k) Selain mengatur pengelolaan guru dan kepala sekolah, kebijakan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan mengatur pula tenaga administrasi pendidikan TK. Pengaturan standar tenaga administrasi diatur dalam Permendiknas nomor 58 tahun 2009 Bagian IV Butir B.4 yang berbunyi: Tenaga Administrasi PAUD memiliki kualifikasi akademik minimum Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat, dan memiliki kompetensi kepribadian, professional, sosial, dan manajemen;

l) Selain menetapkan kebijakan tentang persyaratan, pembinaan, serta pengawasan pendidik dan tenaga kependidikan TK dengan mengimplementasikan berbagai peraturan perundangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat seperti tersebut di atas, Pemkab Sleman menetapkan kebijakan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan TK, seperti tercantum dalam RKPD Dinas Dikpora 2011 Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah menetapkan Kebijakan Umum urusan Wajib Pendidikan berupa: .... (b) meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan....; dan Program Pembangunan urusan Wajib Pendidikan, berupa: (a) Program pendidikan anak usia dini, .... (e) program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan,.... (9) program pengembangan kreativitas siswa dan guru.

#### 4) Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan TK

Pemkab Sleman menetapkan berbagai kebijakan untuk menyelenggarakan, membina, dan mengawasi pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan TK. Kebijakan tersebut diatur oleh Pemkab Sleman dengan mengimplementasikan berbagai peraturan perundangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Peraturan perundangan yang mengaturnya, meliputi:

a) Pengaturan standar sarana dan prasarana pendidikan TK dilaksanakan dengan menggunakan Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD. Lampiran Permendiknas bagian V. Menyebutkan bahwa:

.... Standar sarana dan prasarana meliputi jenis, kelengkapan, dan kualitas fasilitas yang digunakan dalam penyelenggaraan proses penyelenggaraan PAUD.... Sarana dan Prasarana adalah perlengkapan untuk mendukung



penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan. Pengadaan sarana dan prasarana perlu disesuaikan dengan jumlah anak, kondisi sosial, budaya, dan jenis layanan PAUD.

Prinsip sarana dan prasarana: (1) aman, nyaman, terang, dan memenuhi kriteria kesehatan bagi anak, (2) sesuai dengan tingkat perkembangan anak, (3) memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar, termasuk barang limbah/bekas layak pakai.

Persyaratan sarana dan prasarana PAUD Formal: (1) Luas lahan minimal 300 m<sup>2</sup>, (2) Memiliki ruang anak dengan rasio minimal 3 m<sup>2</sup> per peserta didik, ruang guru, ruang kepala sekolah, tempat UKS, jamban dengan air bersih, dan ruang lainnya yang relevan dengan kebutuhan kegiatan anak, (3) Memiliki alat permainan edukatif, baik buatan guru, anak, dan pabrik, (4) Memiliki fasilitas permainan baik di dalam maupun di luar ruangan yang dapat mengembangkan berbagai konsep, dan (5) Memiliki peralatan pendukung keaksaraan.

- b) Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana pendidikan TK dapat mengacu kepada Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Milik Negara/Daerah. PP ini dapat diacu untuk pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan TK karena tidak mewajibkan pengelola TK Swasta menggunakan PP ini sebagai acuan untuk mengelola sarana dan prasarana

yang dimilikinya. PP ini berlaku bagi institusi negara dan daerah.

- c) Kebijakan Pengadaan Sarana dan Prasarana pendidikan TK diatur dalam Keputusan Kepala Dinas PKKD Kabupaten Sleman Nomor: 21/1.01.01/Kep.Ka.DPKKD/DPA-SKPD/2011 Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Dikpora Tahun Anggaran 2011.
- d) Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan oleh sekolah diatur dalam Perbup Sleman nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) Pasal 11 menyatakan bahwa:  
"Belanja sekolah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf b dikelompokkan menjadi (1) belanja investasi; dan (2) belanja operasional terdiri dari: (a) belanja pegawai, dan (b) belanja barang dan jasa, adalah pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan sekolah".

Dari bahasan di atas menunjukkan bahwa Pemkab Sleman, terutama Dinas Dikpora telah mengeluarkan berbagai kebijakan pendidikan TK untuk mengelola pembinaan kurikulum dan kesiswaan, pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, dan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Untuk kebijakan pembinaan kurikulum dan kesiswaan TK, Dinas Dikpora telah melaksanakan desentralisasi karena semua kegiatan pembinaan telah diatur dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemkab Sleman. Kebijakan pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan serta kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan masih mengandalkan kebijakan dari pemerintah



pusat karena hampir semua pengaturannya masih memanfaatkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pemkab Sleman telah menetapkan berbagai kebijakan pendidikan TK. Kebijakan pendidikan yang paling menonjol dan akan mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan TK adalah (1) penetapan dan pendirian TK-SD Model. Pendirian TK-SD Model ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sleman Nomor 185/ Kep.KDH/A/2008 tentang Pendirian TK dan SD Model Kabupaten Sleman;(2) pengaturan pendirian satuan pendidikan oleh masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Dikpora nomor 369/KPTS/2010; (3) pengelolaan pembiayaan sekolah diatur dengan Perbup Sleman nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS); (4)penjaminan mutu kurikulum dan kesiswaan TK, Pemkab Sleman mengimplementasikan Permendiknas nomor 58 tahun 2009 tentang Standar PAUD, dan pemantauan terhadap mutu pendidikan TK dilakukan melalui proses akreditasi. Pelaksanaan akreditasi TK berdasarkan pada Permendiknas Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan diperkuat dengan Permendiknas Nomor 52 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA); (5) Permendiknas nomor 11 Tahun 2011 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan. Permendiknas ini merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru; (6) pengimplementasianPerpres nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil yang belum memperoleh tunjangan profesi; dan (7)

pelaksanaan Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, dan Permendiknas Nomor 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah sebagai tugas tambahan dan berdurasi 4 tahun, serta dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya jika memiliki prestasi kerja yang baik.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Pengantar**

Setelah memperbincangkan landasan penyelenggaraan pendidikan TK berupa paradigma, teori, dan kebijakan pendidikan TK, sebagai bagian penutup akan didiskusikan mengenai apa yang dimaksud dengan penyelenggaraan pendidikan TK, dan bagaimana kaitan antara paradigma, teori, kebijakan pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan TK. Penyajian bahasan tentang penyelenggaraan pendidikan TK dan kaitan antara paradigma, teori, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan TK dimaksudkan agar pembaca memiliki pemahaman yang jelas dan benar tentang kedua hal tersebut.

Dengan kata lain, pembaca akan mengetahui bagaimana implementasi atau pengaruh paradigma pendidikan, teori pendidikan, dan kebijakan pendidikan terhadap penyelenggaraan pendidikan TK.

#### **B. Penyelenggaraan Pendidikan TK**

Setelah membahas paradigma, teori, dan kebijakan pendidikan sebagai landasan penyelenggaraan pendidikan TK seperti disajikan di atas, selanjutnya akan dibahas mengenai penyelenggaraan pendidikan TK sebagai praktik pengelolaan pendidikan. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 menetapkan bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Pedoman Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan TK yang dikeluarkan Pemda DKI Jaya (2002) menyatakan bahwa penyelenggaraan Pendidikan TK bertujuan untuk membantu peserta didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral dan nilai-nilai agama, sosial, emosional, kognitif, bahasa, fisik/motorik, kemandirian dan seni untuk siap memasukipendidikan dasar.

Penyelenggaraan pendidikan TK merupakan suatu aktivitas atau kegiatan untuk mengelola dan menjalankan operasionalisasi komponen sistem pendidikan di TK agar memperoleh hasil yang telah ditetapkan. Jasa Ungguh Muliawan (2009: 64 – 65); A. Martuti (2009: 56-61); Buku "Pengelolaan Taman Kanak-kanak (Direktorat Pembinaan TK dan SD, 2010: 15-25); dan Buku Pctunjuk Teknis Penyelenggaraan TK (Direktorat Pembinaan PAUD, 2011: 14 - 24) menyatakan ada 7 komponen penyelenggaraan sistem pendidikan, yaitu (1) peserta didik, (2) pendidik dan tenaga kependidikan, (3) kurikulum, (4) pembelajaran, (5) sarana dan prasarana, (6) pembiayaan, dan (7) pengelolaan.

#### **1. Peserta Didik TK**

##### **a. Usia Peserta Didik**

Secara umum, aturan tentang usia anak yang diperbolehkan masuk TK telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah, Bab III, Pasal 4 ayat (2), (4), dan (5) mensyaratkan bahwa anak didik TK adalah anak usia 4-6 tahun, dan lama pendidikan di TK 1 tahun atau 2 tahun. Kegiatan belajar anak TK dikelompokkan menjadi dua, yaitu (1) kelompok A untuk usia 4 – 5 tahun, dan (2) kelompok B untuk usia 5 – 6 tahun.



b. Pertumbuhan dan Perkembangan Fisik Motorik

Morrison (1988: 186) menyatakan bahwa antara usia 3 sampai 5 tahun, anak-anak masih mengalami pertumbuhan secara cepat dan mulai mengembangkan keterampilan motorik halus. Ketika berusia 5 tahun, sebagian besar anak menunjukkan kemampuan pengendalian yang cukup baik terhadap pensil, crayon, dan gunting. Pencapaian keterampilan motorik kasar ditandai dengan penguasaan gerakan melompat dan menahan keseimbangan dengan satu kaki. Pertumbuhan jasmani mengalami pelambatan antara usia 5 sampai 8 tahun, sedangkan proporsi tubuh dan keterampilan motorik anak menjadi semakin baik.

Payne & Isaacs (1995: 15-17) menyatakan bahwa ada dua istilah pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik anak, yaitu gerakan motorik kasar dan halus. Gerakan motorik kasar dikendalikan oleh otot atau kelompok otot besar. Salah satu kelompok otot yang relatif besar adalah otot tungkai bagian atas. Otot-otot tersebut merupakan bagian yang menghasilkan serangkaian gerakan seperti berjalan, berlari, dan melompat. Gerakan motorik halus biasanya dilakukan oleh otot atau kelompok otot kecil. Banyak gerakan dilakukan dengan tangan dianggap sebagai gerakan motorik halus karena otot-otot lebih kecil pada jari-jari, tangan, dan telapak tangan mempunyai peranan penting untuk menghasilkan gerakan jari dan tangan.

Lebih lanjut, Morrison (1988: 186-187) menyatakan bahwa perkembangan motorik manusia berlangsung berdasarkan prinsip-prinsip:

a) *Motor development is sequential.*

- b) Maturation of the motor system proceeds from gross behaviors to fine motor. When learning to reach, for example, an infant sweeps toward an object with the whole arm, as a result of development and experience, gross reaching gives way to specific reaching and grasping.*
- c) Motor development is from the cephalo to the caudal - from head to foot (tail). The head is the most developed part of the body at birth; infants hold their heads erect before they sit, and sitting precedes walking.*
- d) Motor development proceeds from the proximal (midline or central part of the body) to the distal (extremities). Infants can control their arm movements before they can finger movements.*

c. Perkembangan Kognitif

Pertumbuhan jasmaniah dan perkembangan kemampuan motorik anak usia dini disertai dengan perkembangan kognitif dan bahasa. Sejak lahir, anak-anak memanfaatkan seluruh inderanya untuk mengenali lingkungannya, dan mereka mulai mencoba memaknai hubungan sebab-akibat antara tindakannya dengan respon dari pengasuhnya. Bagaimana orang dewasa merespon tindakan anak dan bagaimana anak memanfaatkan otonomi yang dimilikinya akan menentukan bagaimana anak-anak memperoleh hasil pertumbuhan-perkembangan dan mampu menguasai peristiwa kehidupan yang menunggu mereka. Rangsangan peristiwa tersebut menyebabkan kemampuan kognitif anak mengalami peningkatan yang signifikan.

Salah satu penjelasan tentang perkembangan kognitif anak usia dini dideskripsikan dalam Teori Perkembangan Kognitif Piaget. Tahapan perkembangan kognitif menjelaskan bagaimana cara berpikir anak-anak mengalami



perkembangan manakala mereka tertarik dengan dunia sekelilingnya. Cara bayi dan anak-anak memahami dunia berbeda dengan cara orang dewasa memahaminya. Saat anak-anak bermain dan bereksplorasi, pikiran anak-anak belajar bagaimana cara mengolah informasi sesuai dengan realitas yang dihadapinya.

Piaget membagi perkembangan kognitif menjadi empat tahapan, yaitu sensorimotorik, preoperasional, operasi konkrit, dan operasi formal. Pada tahap sensorimotorik, berlangsung dari lahir sampai usia 2 tahun, anak-anak mulai belajar bagaimana cara belajar. Mereka melakukan dan mengalami berbagai kejadian dengan memanfaatkan kelima indranya, disebut dengan "sensory". Anak-anak belajar merangkak dan kemudian berjalan, menunjuk dan menggenggam, disebut dengan "motorik". Oleh karena itu, tahapan ini disebut dengan sensorimotorik.

Pada tahap Praoperasional, yang berlangsung dari usia 2 sampai 7 tahun, anak-anak mulai menggunakan simbol mental untuk memahami dan berinteraksi dengan dunia, dan mereka mulai belajar bahasa dan bersemangat untuk bermain pura-pura. Menurut Crain (2007: 198), Piaget berpendapat bahwa pikiran anak-anak selama periode pra-operasional sangat berbeda dengan pikiran anak yang lebih besar atau orang dewasa. Pikiran pra-operasional ditandai oleh egosentrisme, animisme, heteronomi moral, memandang mimpi sebagai peristiwa di luar dirinya, kurang kemampuan mengklasifikasi, kurang kemampuan untuk pengkonversian, dan banyak lagi atribut lain yang tidak dapat dibahas di sini.

Pada tahap berikutnya, yaitu tahap operasi konkrit, berlangsung pada usia 7 sampai 11 tahun, dan tahap operasi formal, yang sering berlangsung setelah usia 11 tahun. Kedua tahapan ini tidak akan dibahas secara rinci karena tidak berkaitan langsung dengan pendidikan TK (Oswalt, 2010).

#### d. Perkembangan Bahasa

Selain perkembangan jasmani, motorik, dan intelektual, anak-anak mengalami perkembangan kemampuan bahasa. Hayakawa (Morrison, 1988: 194) mendefinisikan bahasa sebagai berikut.

*Of all forms of symbolism, language is the most highly developed, most subtle, and most complicated. It has been pointed out that human beings, by agreement, can make anything stand for anything. Now, human beings have agreed, in the course of centuries of mutual dependency, to let the various noises that they can produce with their lungs, throats, tongue, teeth, and lips systematically stand for specified happenings in their nervous system. We call that system of agreements language.*

Bahasa merupakan alat sosial untuk mengenalkan anak kepada masyarakat. Anak akan kesulitan bersosialisasi bila tidak memiliki kemampuan bahasa. Dengan demikian, orang tua dan sekolah harus bertanggungjawab untuk menyediakan kesempatan optimal bagi pemerolehan bahasa.

Selain mengalami peningkatan pengetahuan morfologi, pengetahuan mereka tentang semantik atau makna juga bertambah cepat. Kosakata dari anak usia 6 tahun berkisar 8.000 sampai 14.000 kata. Dengan asumsi bahwa kata dipelajari sejak usia 12 bulan, maka anak



menguasai 5 – 8 kata baru setiap harinya. Setelah 5 tahun belajar kata, penyerapan anak usia 6 tahun tidak melambat. Menurut perkiraan, rerata anak pada usia ini menguasai sekitar 22 kata baru per hari.

Santrock (2007: 72) menyatakan bahwa perbedaan paling mencolok antara kemampuan berbahasa anak usia 2 tahun dan kemampuan berbahasa anak usia 6 tahun adalah kemampuan pragmatiknya. Anak usia 6 tahun jauh lebih lancar berbicara ketimbang anak usia 2 tahun. Beberapa perubahan dalam aspek pragmatis terjadi pada masa usia prasekolah. Pada usia 3 tahun, anak mengalami peningkatan kemampuan untuk berbicara tentang sesuatu yang tidak hadir secara fisik di hadapannya. Lebih lanjut, Santrock (2009: 73 – 74) menyatakan bahwa kemajuan dalam berbahasa di masa kanak-kanak akan memberikan landasan yang kokoh bagi keberlanjutan perkembangan kemampuan berbahasa pada anak usia sekolah dasar.

e. Perkembangan Psikososial

Dari sisi perkembangan psikososial, Erikson, seorang pengikut Freud, menyusun suatu teori yang mengaitkan antara tahapan perkembangan anak dengan beragam budaya yang ada di lingkungan anak. Erikson mensintesakan Teori Freud dan teorinya sendiri menjadi suatu teori yang disebut *the "psychosocial" stages of human development*.

Crain (2007: 428-429) menyatakan bahwa Erikson memetakan delapan tahapan kehidupan manusia dan menunjukkan bagaimana tahapan-tahapan tersebut bekerja dengan cara yang berbeda dan dalam budaya yang berbeda-beda pula. Tahapan perkembangan manusia meliputi (1) lahir – 1 tahun (tahapan harapan: rasa percaya – tidak

percaya), (2) 1 – 3 tahun (tahapan kehendak: otonomi – rasa malu), (3) 3 – 6 tahun (tahapan tujuan: inisiatif – rasa bersalah), (4) 6 – 11 tahun (tahapan kompetensi: kegigihan/industri – inferioritas), (5) masa remaja (tahapan kesetiaan: identitas – kebingungan peran), (6) dewasa muda (tahapan cinta: keintiman – isolasi), (7) dewasa (perhatian: semangat berbagi – penyerapan diri dan stagnasi), dan (8) usia senja (tahapan hikmat: integritas ego – rasa putus asa).

Erikson (Oswalt, 2010) menyatakan bahwa setelah melewati masa bayi (usia 1 sampai 3 tahun) yang berada dalam tahapan otonomi versus malu dan ragu-ragu, anak memasuki tahapan initiative versus guilt (usia 3 to 6 tahun), anak-anak mengalami perkembangan semangat yang sehat untuk mengatasi tugas baru, ikutserta dalam kegiatan dengan teman sebaya, dan mencoba sesuatu tanpa bantuan orangtua; atau mereka mengalami perkembangan pengontrolan diri dan merasa bersalah yang berlebihan atas tindakannya, dan pendekatan keragu-raguan dan ketakutan. Pada tahapan industry versus inferiority (usia 6 to 11 tahun), anak-anak mengalami peningkatan rasa percaya diri terhadap kemampuan untuk melakukan tugas di sekolah atau dengan teman sebaya; atau mereka merasa tidak nyaman pada berbagai lingkungan, termasuk sekolah, keluarga, dan teman sebaya.

Rentang usia 2-7 tahun merupakan masa yang penting dalam perkembangan anak manakala perkembangan akan dikaitkan dengan pengaruh lingkungan dan budaya. Bronfenbrenner menjelaskan bahwa faktor genetika anak yang dipengaruhi secara biologis oleh sifat-sifat kepribadian berinteraksi dengan faktor lingkungan akan mempengaruhi



seberapa jauh anak-anak berkembang. Semakin banyak dorongan dan pengasuhan lingkungan akan semakin mengoptimalkan penyusunan profil kedewasaan seseorang. Selain itu, bagaimana anak bertindak atau bereaksi terhadap lingkungan akan mempengaruhi bagaimana orang lain memperlakukan anak tersebut.

f. Perkembangan Sosioemosional

Selain mempertimbangkan perkembangan psikososial anak, pendidikan TK perlu memanfaatkan konsep perkembangan sosioemosional anak. Santrock (2007: 112-114) menjelaskan bahwa anak-anak mengalami perkembangan diri dan moralitas. Dramawan Italia abad ke-20, Ugo Betti, menyatakan bahwa saat anak mengatakan "Aku", maka yang mereka maksudkan adalah sesuatu yang unik, tidak bercampur dengan makna yang lain. Psikolog sering menyebut "aku" ini sebagai "diri" (*self*). Ada dua aspek penting dari diri ini, yakni harga diri (*self-esteem*) dan identitas diri.

Harga diri adalah pandangan keseluruhan dari individu tentang dirinya sendiri. Penghargaan diri juga kadang dinamakan martabat diri (*self worth*) atau citra diri (*self image*). Para peneliti telah menemukan bahwa perasaan harga diri siswa berubah saat mereka berkembang. Dalam satu studi, baik untuk anak laki-laki maupun perempuan mempunyai perasaan harga diri yang tinggi saat anak-anak tetapi kemudian menurun pada masa remaja awal. Perhargaan diri anak gadis turun dua kali lebih besar daripada anak laki-laki selama masa remaja. Penurunan tersebut disebabkan oleh gejolak selama perubahan fisik dan pubertas, meningkatnya tuntutan untuk berprestasi, dan

kurangnya dukungan dari sekolah dan orangtua (Crawford & Unger dikutip Santrock, 2007: 113).

g. Perkembangan Moral

Perkembangan moral berhubungan dengan aturan dan konvensi tentang interaksi yang adil antarorang. Aturan ini bisa dipelajari dalam tiga domain: kognitif, behavioral, dan emosional. Piaget mengusulkan dua tahap pemikiran moral: *heteronomous morality* (usia empat sampai tujuh tahun) dan *autonomous morality* (usia sepuluh atau lebih). Piaget percaya bahwa hubungan timbal balik dalam relasi teman sebaya akan memajukan perkembangan moral. Kohlberg, seperti Piaget, menekankan bahwa kunci untuk memahami perkembangan moral adalah penalaran moral dan bahwa penalaran ini melewati beberapa tahapan.

Kohlberg (Santrock, 2007: 129) mengidentifikasi tiga level perkembangan moral (prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional), dengan dua tahap di setiap levelnya. Saat individu melewati tiga level tersebut, pemikiran moral mereka menjadi semakin terinternalisasikan. Tiga tipe pendidikan moral yang dibutuhkan anak adalah pendidikan karakter, klarifikasi nilai, dan pendidikan moral kognitif. Pembelajaran berbentuk layanan terpadu semakin penting diberikan oleh sekolah.

Berkaitan dengan perkembangan moral, anak-anak mengalami perkembangan nilai-nilai keagamaan. Mansur (2009: 46) menyatakan bahwa ada pendapat yang mengatakan bahwa anak dilahirkan bukanlah sebagai makhluk yang religius, bayi sebagai manusia dipandang dari segi bentuk dan bukan kejiwaannya. Namun, ada pula yang



menyatakan bahwa anak sejak lahir telah membawa fitrah keagamaan. Fitrah itu baru berfungsi di kemudian hari melalui proses bimbingan dan latihan setelah berada pada tahap kematangan.

Lebih lanjut Mansur (2009: 48-49) menyatakan bahwa belum terlihat adanya tindak keagamaan pada diri anak karena beberapa fungsi kejiwaan yang menopang kematangan berfungsinya instink tersebut belum sempurna. Dengan demikian, pendidikan agama perlu diperkenalkan kepada anak jauh sebelum anak-anak berusia 7 tahun. Artinya, jauh sebelum anak mencapai usia 7 tahun, nilai-nilai keagamaan perlu ditanamkan kepada anak-anak. Nilai-nilai keagamaan itu sendiri dapat berupa perbuatan yang menunjukkan hubungan antara Tuhan dan manusia atau hubungan antar sesama manusia.

Perkembangan agama anak dapat melalui beberapa tahapan, yaitu (1) *the fairy tale stage*, pada tahap ini, anak usia 3 – 4 tahun mengenal konsep Tuhan lebih banyak dipengaruhi oleh fantasi dan emosi, (2) *the realistic stage*, pada masa ini, ide ketuhanan anak sudah mencerminkan konsep-konsep yang berdasarkan kepada kenyataan. Ide keagamaan anak didasarkan atas dorongan emosional, sehingga anak-anak dapat melahirkan Tuhan yang formalis, (3) *the individual stage*, anak pada tingkat ini memiliki kepekaan emosi yang paling tinggi sejalan dengan perkembangan usia mereka.

Permendiknas nomor 58 tahun 2009 tentang Standar PAUD mengatur rombongan belajar di TK, yaitu jumlah maksimal peserta didik setiap rombongan belajar di PAUD jalur pendidikan formal atau TK/RA sebanyak 20 peserta

didik dengan satu orang guru TK/RA dan satu guru pendamping.

## **2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan pendidikan TK adalah Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Direktorat Pembinaan PAUD (2011: 14 – 21) menetapkan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan TK meliputi: (1) guru TK dan guru pendamping, (2) kepala sekolah, (3) tenaga tata usaha, (4) pesuruh sekolah, dan (5) penjaga sekolah.

Syarat dan kualifikasi pendidik TK diatur dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, dan Permendiknas nomor 58 Tahun 2009. Pendidik TK harus memenuhi persyaratan: (1) memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi; dan (2) memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Guru Pendamping harus memiliki (1) kualifikasi DII PGTK, dan (2) kompetensi kepribadian, profesional, pedagogik, dan sosial.

Persyaratan kepala sekolah TK diatur dalam Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, yaitu seorang guru dapat menjadi kepala TK apabila ia memiliki kualifikasi sebagai berikut: (1) kualifikasi umum: (a) Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau nonkependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi; (b) berusia setinggi-tingginya 56 tahun pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah; (c) memiliki pengalaman mengajar



sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA; dan (d) memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang; (2) Kualifikasi Khusus: (a) berstatus sebagai guru TK/RA; (b) memiliki sertifikat pendidik sebagai guru TK/RA; dan (c) memiliki sertifikat kepala TK/RA yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah. Selain memiliki kualifikasi umum dan khusus, ia juga harus memiliki kompetensi (1) kepribadian; (2) manajerial; (3) kewirausahaan; (4) supervisi; dan (5) sosial.

Persyaratan standar tenaga administrasi diatur dalam Permendiknas nomor 58 tahun 2009 Bagian IV Butir B.4 yang berbunyi: Tenaga Administrasi PAUD memiliki kualifikasi akademik minimum Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat, dan memiliki kompetensi kepribadian, professional, sosial, dan manajemen. Pesuruh sekolah dan penjaga sekolah minimal berijazah SMP.

### **3. Kurikulum**

Pembelajaran di TK merupakan proses pembiasaan dalam rangka pengembangan moral, agama, disiplin, perasaan dan emosi, kemampuan bermasyarakat, dan kemampuan dasar yang meliputi: kemampuan bahasa, daya pikir, daya cipta, keterampilan, dan jasmani. Menurut Moeslichatoen (2004: 4-5) tugas perkembangan yang harus dijalani anak usia TK adalah (1) berkembang menjadi pribadi yang mandiri, (2) belajar memberi, berbagi, dan memperoleh kasih sayang, (3) belajar bergaul dengan anak lain, (4) mengembangkan pengendalian diri, (5) belajar bermacam-macam peran orang dalam masyarakat, (6) belajar untuk mengenal tubuh masing-masing,

(7) belajar menguasai keterampilan motorik kasar dan halus, (8) belajar mengenal lingkungan fisik dan mengendalikannya, (9) belajar menguasai kata-kata baru untuk memahami orang lain, dan (10) mengembangkan perasaan positif dalam berhubungan dengan lingkungan.

Direktorat Pembinaan TK-SD (2010) menyatakan bahwa tujuan khusus dari PAUD formal adalah mengembangkan potensi kecerdasan fisik, kognitif, sosioemosional dan spiritual melalui proses Pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAKEM).

Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD menetapkan bahwa struktur program kegiatan TK mencakup bidang pengembangan pembentukan perilaku dan bidang pengembangan kemampuan dasar melalui kegiatan bermain dan pembiasaan. Lingkup pengembangan meliputi: (1) nilai-nilai agama dan moral, (2) fisik: motorik kasar, motorik halus; kesehatan fisik, (3) kognitif: pengetahuan umum dan sains; konsep bentuk, warna, ukuran, dan pola; konsep bilangan, lambing bilangan, dan huruf; (4) bahasa: menerima bahasa; mengungkapkan bahasa; dan keaksaraan, dan (5) sosial emosional. Kegiatan pengembangan suatu aspek dilakukan secara terpadu dengan aspek yang lain, dan menggunakan pendekatan tematik.

Agar siap disampaikan kepada peserta didik, guru harus menerjemahkan kurikulum menjadi perencanaan pembelajaran berupa (1) Perencanaan Semester, (2) Rencana Kegiatan Mingguan (RKM), (3) Rencana Kerja Harian (RKH). Dalam pelaksanaan kurikulum, guru perlu memperhatikan (1) prinsip-prinsip pelaksanaan, (2) pengaturan ruangan/kelas, dan (3) pengaturan alat dan sumber belajar.



#### 4. Pembelajaran

Proses pembelajaran di TK menitikberatkan pada pembiasaan atau pengembangan pembentukan perilaku dan pengembangan kemampuan dasar, serta pengenalan budaya sekolah. Agar mencapai fungsi tersebut, pembelajaran di TK perlu memperhatikan (1) bidang pengembangan, (2) lama dan waktu pembelajaran, (3) pendekatan dan pengorganisasian belajar, (4) teori belajar, dan (5) penilaian. Kelima aspek pembelajaran tersebut dibahas sebagai berikut.

##### a. Bidang Pengembangan

Pembelajaran di TK mencakup dua bidang pengembangan, yaitu pengembangan perilaku dan pengembangan kemampuan dasar. Keduanya dilaksanakan melalui kegiatan bermain yang bertahap, berkesinambungan, dan bersifat pembiasaan. Menurut Direktorat Pembinaan PAUD (2011: 26), bidang pembentukan perilaku merupakan aktivitas yang dilakukan secara berkelanjutan dan ada dalam kehidupan keseharian anak. Bidang ini melingkupi perkembangan nilai-nilai agama dan moral, serta pengembangan sosial, emosional dan kemandirian. Bidang pengembangan kemampuan dasar merupakan kegiatan yang dirancang oleh pendidik dalam rangka peningkatan kemampuan dan kreativitas sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Bidang ini meliputi perkembangan Agama dan Moral, Fisik Motorik, Kognitif, Bahasa, dan Sosial Emosi.

##### b. Lama dan Waktu Pembelajaran

Lama program pembelajaran di TK dapat berlangsung satu tahun atau dua tahun. Pembelajaran satu tahun diperuntukkan bagi penyelenggaraan satu kelompok A atau

B, sedangkan pembelajaran dua tahun diperuntukkan bagi penyelenggaraan kelompok A dan B secara berurutan. Waktu belajar efektif dalam satu tahun pelajaran (2 semester) adalah 34 minggu, dengan jam belajar adalah satu kali pertemuan sebanyak 150 – 180 menit untuk 6 atau 5 hari per minggu dengan jumlah pertemuan 30 jam @ 30 menit.

c. Pendekatan dan Pengorganisasian Pembelajaran

Pendekatan pembelajaran di TK dilakukan secara aktif dialogis dan kritis, melalui pendekatan tematik dan terintegrasi serta mengacu pada ciri-ciri program pembelajaran TK. Pengorganisasian kegiatan pembelajaran dilaksanakan (1) di dalam ruang/kelas atau di luar ruang/kelas, (2) dalam suasana yang menyenangkan, (3) pengelolaan kegiatan pembelajaran usia 4 – 6 tahun secara individu, kelompok kecil dan kelompok besar meliputi tiga kegiatan pokok, yaitu pembukaan, inti, dan penutup (Direktorat Pembinaan PAUD, 2011: 29 – 30).

d. Teori Belajar

Guru perlu memperhatikan dan memahami teori belajar agar proses pembelajaran berlangsung sesuai dengan kebutuhan anak. Beberapa Teori belajar dibahas sebagai berikut.

1) Teori Belajar Motorik

Paul Fitts & Michael Posner (1967); dan Jack Adams (1971) mengembangkan teori belajar motorik. Menurut Magill (1993: 59-60) Fitts & Posner membagi belajar motorik menjadi tiga tahapan. Pertama, tahap kognitif yang ditandai dengan sejumlah kesalahan dalam melakukan gerak dan biasanya kesalahan yang dilakukan berupa gerakan motorik kasar. Kedua, tahap asosiatif



yang ditandai dengan perubahan kemampuan gerak. Ketiga, tahap otomatis ditandai dengan kemampuan melakukan gerakan secara otomatis.

Kontras dengan model Fitts & Posner, Adams mengajukan sebuah model tahapan belajar motorik hanya terdiri dari dua tahapan, yaitu (1) tahap motorik-verbal, sebenarnya, tahap ini sama dengan tahapan kognitif dan asosiatif Fitts & Posner, dan (2) tahap motorik yang sama dengan tahap otomatisnya Fitts & Posner.

Teori lain yang perlu dipertimbangkan dalam belajar motorik adalah *transfer of learning*. *Transfer of learning* biasanya didefinisikan sebagai pengaruh kepemilikan pengalaman berlatih keterampilan dan keterampilan lama terhadap belajar keterampilan baru atau terhadap kemampuan melakukan keterampilan pada situasi yang baru.

## 2) Teori Kognitif (Konstruktivistik)

Piaget membuat istilah *schema* untuk menjelaskan bagaimana perkembangan kemampuan memahami dan mengorganisasikan pengalaman anak. Piaget (Santrock, 2007: 46) menyatakan bahwa dalam memahami dunia secara aktif, anak-anak menggunakan *schema* (kerangka kognitif atau kerangka referensi). Menurut Cherry (2010) Piaget mendefinisikan *schema* sebagai berikut:

*A schema describes both the mental and physical actions involved in understanding and knowing. Schemas are categories of knowledge that help us to interpret and understand the world. In Piaget's view, a schema includes both a category of knowledge and the process of obtaining that knowledge. As experiences*

*happen, this new information is used to modify, add to, or change previously existing schemas.*

Piaget (1952) mengatakan bahwa ada dua proses yang bertanggungjawab atas cara anak mempergunakan dan mengadaptasi skema mereka, yaitu: asimilasi (*assimilation*) dan akomodasi (*accommodation*). Asimilasi terjadi manakala seorang anak memasukkan pengetahuan baru ke dalam pengetahuan yang sudah ada. Akomodasi terjadi ketika anak menyesuaikan diri terhadap informasi baru.

Piaget juga menyatakan bahwa untuk memahami dunia yang dihadapinya, anak-anak mengorganisasikan secara kognitif pengalaman yang dimilikinya. Organisasi adalah konsep Piaget untuk menjelaskan usaha anak-anak mengelompokkan perilaku yang terpisah-pisah ke dalam urutan yang teratur, ke dalam sistem fungsi kognitif. Setiap level pemikiran akan diorganisasikan. Perbaikan terus menerus terhadap organisasi ini merupakan bagian inheren dari perkembangan anak. Setelah mempelajari cara menggunakan suatu alat, anak-anak akan mengaitkan-ngaitkan penggunaan alat tersebut dengan penggunaan alat yang lain, atau mengorganisasikan pengetahuannya, agar mereka menguasai keahlian menggunakan alat tersebut. Dengan cara yang sama, anak-anak terus mengintegrasikan dan mengoordinasikan banyak cabang pengetahuan lainnya yang sering berkembang secara independen.

Untuk menjelaskan bagaimana anak bergerak dari satu tahap pemikiran ke tahap pemikiran selanjutnya, Piaget menggunakan istilah ekuilibrisasi



(*equilibration*). Ekuilibrasi adalah suatu mekanisme pergeseran pemikiran untuk menciptakan keseimbangan. Pergeseran ini terjadi manakala anak mengalami konflik kognitif atau disequilibrasi dalam upaya memahami dunia. Pada akhirnya, anak akan mampu memecahkan konflik tersebut dan mendapatkan keseimbangan atau equilibrium pemikiran. Piaget percaya bahwa ada gerakan kuat antara keadaan equilibrium kognitif dan disequilibrium saat asimilasi dan akomodasi bekerja sama dalam menghasilkan perubahan kognitif. Dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak terus menerus menghadapi kasus yang berlawanan dan ketidakkonsistenan.

Vygotsky mengembangkan Teori *Scaffolding* dan *Zona of Proximal Development (ZPD)* yang menjelaskan perkembangan belajar anak yang dikaitkan dengan bantuan orangtua dan pengaruh lingkungan. Santrock (2007: 61) menyatakan bahwa untuk memahami belajar dan perkembangan anak perlu diperhatikan tiga klaim, yaitu (1) kemampuan kognitif anak dapat dipahami apabila kemampuan tersebut dianalisis dan diinterpretasikan secara *developmental*; (2) kemampuan kognitif dimediasi dengan kata, bahasa, dan bentuk wacana, yang berfungsi sebagai alat psikologis untuk membantu dan mentransformasikan aktivitas mental; dan (3) kemampuan kognitif berasal dari relasi sosial dan dipengaruhi oleh latar belakang sosiokultural.

Lebih lanjut, Santrock (2007: 62) menyatakan bahwa untuk melengkapi ketiga klaim dasarnya, Vygotsky mengajukan konsep *ZPD*. Zona

perkembangan proksimal adalah jarak antara tingkat kemampuan aktual anak untuk memecahkan masalah sendiri dan kemampuan anak untuk memecahkan masalah setelah dibantu oleh orang dewasa. Artinya, ZPD adalah serangkaian tugas yang terlalu sulit untuk dikuasai anak secara sendirian tetapi dapat dipelajari dengan bantuan orang dewasa atau anak yang lebih mampu. Dengan demikian, batas bawah ZPD adalah tingkat kesulitan masalah yang dapat dipecahkan oleh anak secara independen. Batas atasnya adalah tingkat tanggungjawab atau tugas tambahan yang dapat diterima anak dengan bantuan instruktur yang mampu. Vygotsky memiliki keyakinan bahwa instruksi atau pengajaran memiliki pengaruh kuat terhadap perkembangan kognitif anak.

Selain ZPD, Vygotsky mengembangkan teori *Scaffolding*, suatu teknik untuk mengubah level dukungan. Santrock (2007: 63) menyatakan bahwa selama sesi pengajaran, orang yang lebih ahli (guru atau siswa yang lebih mampu) menyesuaikan jumlah bimbingannya dengan level kinerja murid yang telah dicapai. Ketika tugas yang akan dipelajari siswa merupakan tugas baru, maka instruktur menggunakan teknik instruksi langsung. Proses tersebut merupakan pengembangan pengetahuan dan kemampuan baru berdasarkan pengetahuan dan kemampuan yang telah dimiliki anak dengan bantuan orangtuanya.

Vygotsky meyakini bahwa anak-anak menggunakan bahasa bukan hanya untuk berkomunikasi sosial, tetapi juga untuk merencanakan, dan memantau



perilakunya sendiri dengan caranya sendiri. Penggunaan bahasa untuk mengatur dirinya sendiri dinamakan “pembicaraan batin” (*inner speech*) atau “pembicaraan pribadi” (*private speech*). Pembicaraan pribadi adalah alat penting bagi pemikiran selama masa anak usia dini. Vygotsky percaya bahwa bahasa dan pikiran pada awalnya berkembang secara terpisah tetapi kemudian bergabung (Santrock, 2007: 63).

### 3) Teori Perilaku (Behavioristik)

Teori behavioristik berasal dari teorisi tradisi Lockean – yang menekankan pada proses tingkah laku dibentuk dari luar, oleh lingkungan eksternal. Crain (2007: 263-300) menyatakan bahwa bapak teori belajar modern adalah Ivan P. Pavlov. Pavlov memulai karyanya yang terkenal tentang reflex-refleks yang terkondisikan (*conditioned reflexes*). Minat ini menguat lewat penemuan tak sengaja tentang sifat liur pada anjing. Biasanya, anjing akan meneteskan air liur saat makanan menyentuh lidahnya – ini reflex bawaan. Namun Pavlov memerhatikan bahwa anjingnya juga mengeluarkan air liur bahkan sebelum makanan ada di mulut. Anjing berliur ketika melihat makanan datang, bahkan yang lebih jauh lagi, ketika mendengar langkah-langkah kaki mendekat.

Teori yang dikembangkan Pavlov disebut dengan pengkondisian klasik (*classical conditioning*). Dalam istilah Pavlov (1927), pemberian makanan merupakan stimulus yang tidak dikondisikan (*unconditioned stimulus, US*) – Pavlov tidak perlu mengondisikan si hewan untuk mengeluarkan air liur jika melihat

makan. Sebaliknya, cahaya lampu merupakan stimulus yang dikondisikan (*conditioned stimulus, CS*) – efeknya perlu dikondisikan terlebih dahulu. Air liur terhadap makanan disebut reflex yang tidak dikondisikan (*unconditioned reflex, UR*), sedangkan air liur terhadap cahaya disebut reflex yang dikondisikan (*conditioned reflex, CR*). Proses seperti ini disebut pengondisian klasik.

Teori Pavlov kemudian dikembangkan oleh John W. Watson (Crain, 2007: 268-270). Watson adalah seorang behavioris – ia menyatakan bahwa psikolog mestinya mempelajari hanya tingkah laku yang tampak atau dapat dilihat. Dia juga seorang environmentalis. Salah satu minat utama Watson adalah pengondisian emosi. Dia mengklaim bahwa sejak dulu, hanya ada tiga reaksi emosi yang belum dipelajari – rasa takut, rasa marah, dan rasa cinta. Sebenarnya, semua yang kita amati berasal dari tiga respon fisik yang berbeda ini, namun untuk sederhananya, kita bisa menyebut ketiganya emosi.

Salah satu eksperimen Watson dan Raynor yang sangat terkenal adalah pengondisian rasa takut. Anak kecil dibuat takut dengan tikus, kemunculan tikus dibarengkan dengan suara keras yang mengejutkan. Dampaknya, walaupun pemunculan tikus tidak dibarengi dengan suara mengejutkan tetapi anak kecil sudah ketakutan ketika melihat tikus. Akhirnya, rasa takut anak kecil yang dikondisikan kepada tikus merembet kepada segala sesuatu yang berbulu.

Sebaliknya dari pengkondisian rasa takut, dikenal dengan desensitisasi sistematik yang merupakan salah



satu modifikasi tingkah laku dari Jones. Subjek dibiarkan rileks dan secara bertahap dikenalkan dengan stimulus yang menakutkan. Peneliti memastikan bahwa subjek tidak merasa terlalu cemas setiap kali dihadapkan dengan stimulus yang menakutkan atau saat menjalani terapi. Secara bertahap, kalau demikian, subjek belajar untuk mengasosiasikan objek atau situasi tertentu dengan perasaan-perasaan rileks ini, melebihi rasa takutnya.

Para teorisi belajar terus mengembangkan model-model pengondisian, salah seorang yang paling berpengaruh adalah BF. Skinner (Crain, 2007: 276-278). Skinner adalah seorang behavioris yang ketat. Namun berbeda dengan Watson, model utama pengondisian Skinner bukan Pavlovian. Respons-respons yang dipelajari Pavlov, kata Skinner paling baik jika dianggap sebagai responden saja. Ini adalah respon-respon yang secara otomatis diperoleh lewat stimuli yang sudah dikenal. Contohnya, pencernaan makanan secara otomatis memunculkan air liur, dan suara bising otomatis memunculkan respon terkejut. Kebanyakan responden mungkin hanya reflek-reflek sederhana saja.

Justru kelas tingkah laku kedua yang paling menarik perhatian bagi Skinner adalah apa yang disebut dengan "operan". Di dalam tingkah laku operan, hewan percobaan tidak terkekang di dalam kurungan, seperti anjing-anjingnya Pavlov, melainkan bergerak bebas dan berkeliaran di lingkungannya. Untuk mempelajari pengondisian operan, Skinner membuat sebuah alat yang kemudian dikenal dengan "Kotak Skinner". Meskipun

kotak ini berukuran kecil, namun di dalamnya hewan dapat menjelajahi secara bebas.

Skinner tak diragukan lagi sudah memperluas jangkauan teori belajar. Setelah memerhatikan keterbatasan pengondisian klasik, dia mengeksplorasi sifat tingkah laku operan, dimana organisme bertindak bebas dan dikontrol oleh konsekuensi-konsekuensi tindakannya. Di dalam serangkaian studi yang cemerlang, Skinner menunjukkan bagaimana pengendalian semacam itu digunakan – melalui jadwal penguatan, pembentukan, pengaruh stimuli pembeda dan faktor-faktor lainnya. Lebih jauh lagi Skinner membuktikan dengan tegas pentingnya kepraktisan ide-idenya.

Dalam proses tersebut, Skinner banyak mengundang kontroversi atau tentangan dari berbagai pihak. Bagi sebagian pakar, metodenya dinilai mendukung praktik otoritarian – karena dia melegitimasi cara untuk mengontrol, memanipulasi, dan memprogram tingkah laku yang diinginkan atau tidak diinginkan. Skinner menjawabnya dengan menyatakan bahwa fakta menunjukkan bahwa lingkunganlah yang mengontrol tingkah laku, hanya saja bagaimana manusia memanfaatkan pengetahuan tentang lingkungan tersebut akan banyak tergantung pada dirinya sendiri.

#### 4) Teori Kematangan (*Maturation*)

Teori Kematangan dikembangkan oleh Arnold Gessel (1880 – 1961). Gessel (Crain, 2007: 30 – 32) menyatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan anak dipengaruhi oleh dua faktor utama. Pertama, anak adalah produk dari lingkungannya. Kedua, dan ini yang



lebih mendasar, perkembangan anak berasal dari dalam diri anak sendiri, yaitu berasal dari aksi gen-gen dalam tubuhnya. Proses tersebut disebut Gessel dengan *Kematangan*.

Ciri menakjubkan perkembangan kematangan selalu terjadi dalam urutan tertentu. Urutan perkembangan kematangan yang diarahkan oleh cetak biru genetik, tidak pernah berjalan terbalik. Jantung selalu menjadi organ pertama yang berkembang dan berfungsi. Sesudah itu, sel-sel yang berbeda-beda mulai membentuk system syaraf utama dengan cepat –yaitu otak dan syaraf tulang belakang. Perkembangan otak dan kepala secara utuh baru dimulai setelah bagian-bagian lain terbentuk seperti tangan dan kaki (Crain, 2007: 30).

Selain mengikuti prinsip urutan tertentu, kematangan dalam perkembangan pra-lahir dan pascalahir mengikuti prinsip *cephalocaudal*, yaitu kecenderungan perkembangan dari kepala-menuju-kaki. Setiap individu memiliki tingkat perkembangan yang berbeda-beda. Semua perbedaan tingkat perkembangan individu tersebut sebagian besar dikendalikan oleh mekanisme genetik internal. Perkembangan individu juga dipengaruhi oleh lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dan budaya.

Walaupun Gessel berkeyakinan bahwa lingkungan mempengaruhi perkembangan kematangan seseorang, namun ia sangat menentang upaya yang mengajarkan hal-hal yang jauh di luar jadwal pertumbuhan anak-anak. Anak-anak akan duduk, berjalan, dan berbicara bila

mereka telah siap, manakala sistem syaraf mereka telah cukup matang. Ketika saatnya tiba, anak-anak akan sanggup melaksanakan suatu tugas sesuai dengan desakan-desakan dari internal dirinya. Karenanya, pengajaran harus memperhatikan saat yang tepat agar memberikan dampak yang besar terhadap proses kematangan anak. Gessel memperingatkan agar jangan sampai terjadi ketidaktepatan pengajaran atau pengasuhan supaya tidak terjadi ketegangan antara guru dan anak.

Gessel (Crain, 2007: 35-39) selanjutnya menyatakan bahwa manusia memiliki prinsip perkembangan lainnya, yaitu jalinan timbalbalik, asimetri fungsional, dan pengaturan diri. Jalinan timbal balik menunjukkan bahwa manusia dibangun atas dasar yang bersifat bilateral; manusia memiliki dua belahan otak, dua mata, dua tangan, dua kaki dan seterusnya. Tindakan kita memiliki kualitas yang dualistik, contoh meluruskan dan melipat kaki. Asimetri fungsional adalah kemampuan manusia untuk berfungsi lebih efektif dari satu sudut pandang atau satu sisi. Melalui proses jalinan imbal-balik, manusia berupaya untuk mencapai keseimbangan dualitas sifatnya. Namun demikian, manusia jarang mampu mencapai keseimbangan sempurna atau simetris. Manusia lebih banyak memiliki kemampuan asimetris yang efektif.

Pengaturan diri merupakan mekanisme pengembangan intrinsik yang dimiliki oleh setiap individu. Berkat pengaturan dirinyalah, manusia memiliki kemampuan organisme untuk mempertahankan seluruh



integrasi kesetimbangannya. Karena proses pengaturan diri secara intrinsik yang dimilikinya, kadang-kadang menyebabkan anak-anak menolak untuk diajari hal-hal yang asing bagi mereka.

#### 5) Teori Kecerdasan Majemuk

Teori kecerdasan majemuk dikembangkan oleh Howard Gardner. Gardner (2003: 36-53) menyebutkan bahwa manusia memiliki berbagai potensi untuk dikembangkan. Pengembangan potensi perlu dilakukan agar manusia memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah atau menciptakan sesuatu yang bernilai dalam masyarakat. Keterampilan memecahkan masalah menyebabkan seseorang mampu mendekati situasi yang sarannya harus dicapai dan menemukan rute yang tepat menuju sasaran tersebut. Kemampuan tersebut disebut dengan kecerdasan, terdapat delapan kecerdasan yang teridentifikasi, yaitu kecerdasan (1) linguistik, (2) logika matematika, (3) musikal, (4) kinestesis tubuh, (5) spasial, (6) naturalis, (7) interpersonal, dan (8) intrapersonal.

Teori kecerdasan majemuk dikembangkan untuk menerangkan kemampuan belajar manusia yang dapat tergantung kepada pengujian empiris. Berdasarkan teori ini, kecerdasan seseorang berkembang secara bertahap, dimulai dengan kemampuan membuat pola dasar, misalnya kemampuan untuk membedakan tinggi-rendahnya nada dalam kecerdasan musikal. Semua kemampuan mentah ini muncul secara universal dan lebih mendominasi dalam tahun pertama kehidupan. Tahap berikutnya, kecerdasan dihadapi melalui sistem

simbol: musik lewat lagu, pemahaman ruang lewat lukisan, gerakan badan lewat tarian. Setelah mengalami perkembangan, setiap kecerdasan bersama dengan sistem simbol menuju sistem penulisan. Dalam budaya kita, sistem penulisan ini pada umumnya dikuasai melalui pengaturan pendidikan formal.

#### 6) Teori Pemerolehan Bahasa

Salah satu teori yang menyatakan bahwa manusia lahir dengan kemampuan untuk memperoleh bahasa dikemukakan oleh Noam Chomsky. Ia menyatakan bahwa seluruh anak memiliki suatu struktur atau mekanisme disebut *Language Acquisition Device (LAD)* yang memungkinkan mereka memperoleh bahasa. Dengan LAD, anak kecil menggunakan seluruh bahasa lisan yang didengarnya untuk memproses sebagian besar kalimat gramatikal, bahkan kalimat yang belum pernah didengar sebelumnya.

Anak mendengar suatu bahasa tertentu dan memprosesnya untuk menyusun aturan gramatikal. Fakta bahwa anak-anak mengembangkan kalimat yang belum pernah mereka dengar sebelumnya sering dikutip sebagai alat bukti adanya kemampuan bawaan (*innate ability*) (Crain, 2007: 521). Akan jadi apa suatu bahasa apabila kita hanya mampu mereproduksi kalimat dan kata-kata yang kita dengar?

Kemampuan anak-anak pada beragam budaya dan lingkungan sosial untuk memperoleh bahasa pada usia relatif muda mendukung tesis bahwa pemerolehan dan penggunaan bahasa bukan sekedar hasil peniruan atau pengajaran langsung. Sesungguhnya, anak-anak



belajar bahasa tanpa pengajaran formal. Adanya periode sensitif perkembangan bahasa pada anak-anak merupakan hal yang sangat masuk akal dan memperoleh perhatian dari Montessori, ia percaya bahwa anak-anak memiliki dua periode sensitif perkembangan bahasa. Periode sensitif pertama berlangsung sejak lahir sampai usia tiga tahun. Selama periode tersebut, anak tanpa sadar menyerap bahasa dari lingkungannya. Periode sensitif kedua berlangsung pada usia tiga tahun sampai usia 8 tahun. Selama periode ini, anak berpartisipasi secara aktif dalam pengembangan bahasanya dan belajar bagaimana menggunakan kekuatan berkomunikasi (Nichols, 2010).

#### 7) Teori Keterikatan (*Attachment*)

Teori *Attachment*, berawal dari karya John Bowlby dan dikembangkan oleh Mary Ainsworth, adalah suatu teori psikologis, evolusioner, dan ethologis yang menyediakan kerangka deskriptif dan eksplanatif untuk menjelaskan *interpersonal relationships* antar manusia. Bretherton (2010) menyatakan bahwa Teori *Attachment* merupakan penjelasan tentang konsep yang berasal dari ethologi, *cybernetics*, pemrosesan informasi, psikologi perkembangan, dan psikoanalisis. John Bowlby memformulasikan dasar-dasar teorinya. Bowlby mengubah cara berpikir kita tentang keterikatan anak dengan ibunya, dan ketergangguan anak karena pemisahan (*separation*), pencabutan (*deprivation*), dan kehilangan (*bereavement*). Inovasi metodologi dari Mary Ainsworth tidak hanya memungkinkan untuk menguji secara empirik beberapa pemikiran Bowlby, tetapi juga

memperluas jangkauan teori itu sendiri dan memungkinkan pengembangan teori baru yang dilakukan akhir-akhir ini.

Ainsworth menyumbangkan pengembangan konsep *the attachment figure* sebagai landasan yang kokoh bagi seorang bayi untuk mengeksplorasi dunia di sekelilingnya. Selanjutnya, ia memformulasikan konsep kepekaan seorang ibu terhadap isyarat dari bayi dan peranannya dalam perkembangan pola keterikatan ibu-anak.

Lebih lanjut, Bretherton (2010) menyatakan bahwa Bowlby adalah orang pertama kali yang mengeluarkan Teori Keterikatan secara formal. Teori ini dikembangkan dari konsep etologi dan psikologi perkembangan. Teori ini pertama kali dipresentasikan di *The British Psychoanalytical Society London*, dalam tiga makalah klasik, yaitu "*The Nature of the child's tie to his mother*" (1958); "*Separation anxiety*" (1959); dan "*Grief and mourning in Infancy and early childhood*" (1960). Bowlby melengkapi ketiga makalah tersebut dengan dua makalah berikutnya (yang tidak pernah dipublikasikan, 1962a dan b) mengenai proses pertahanan yang berkaitan dengan perkabungan. Kelima makalah tersebut merupakan cetak biru dari dasar-dasar Teori Keterikatan. Secara ringkas, Teori *Attachment* disajikan sebagai berikut.

*The most important tenet of attachment theory is that a young child needs to develop a relationship with at least one primary caregiver for social and emotional development to occur normally, or without this care, the*



*child will often face permanent psychological and social impairment.*

*Within attachment theory, infant behaviour associated with attachment is primarily the seeking of proximity to an attachment figure in stressful situations. Infants become attached to adults who are sensitive and responsive in social interactions with them, and who remain as consistent caregivers for some months during the period from about six months to two years of age. During the latter part of this period, children begin to use attachment figures (familiar people) as a secure base to explore from and return to. Parental responses lead to the development of patterns of attachment; these, in turn, lead to internal working models which will guide the individual's feelings, thoughts and expectations in later relationships. Separation anxiety or grief following the loss of an attachment figure is considered to be a normal and adaptive response for an attached infant. These behaviours may have evolved because they increase the probability of survival of the child.*

Studi yang dilakukan oleh Mari Ainsworth pada tahun 1960-an dan 70-an berhasil mengembangkan konsep dasar Teori Keterikatan, dengan mengenalkan konsep *the "secure base"* dan mengembangkan Teori Pola Keterikatan Bayi, yaitu: *secure attachment, avoidant attachment and anxious attachment*. Pola keempat adalah *disorganised attachment*, ditemukan kemudian.

#### 8) Teori Ekologi Perkembangan Manusia

Bronfenbrenner mengembangkan teori yang mengaitkan pengaruh budaya dan lingkungan terhadap perkembangan anak. Berns (2004: 14) menyatakan

bahwa Bronfenbrenner percaya bahwa interaksi dan pengalaman individu dalam konteks sosial mempengaruhi tingkat perkembangan kemampuan dan pemahaman individu terhadap potensi yang dimilikinya. Model teorinya menempatkan manusia dalam berbagai lingkungan sosial - disebut ekologi perkembangan manusia - yang memungkinkan manusia melakukan studi interaksi secara sistematis, dan menyediakan pedoman bagi penelitian di masa yang akan datang mengenai proses sosialisasi yang rumit.

Lebih lanjut, Berns (2004: 14) menyatakan bahwa ekologi mewadahi interkoneksi antar manusia dan lingkungannya, termasuk proses psikologis, sosial, dan kultural sepanjang waktu. Menurut Teori Bioekologi Bronfenbrenner, terdapat empat struktur dasar - *microsystem*, *mesosystem*, *exosystem*, dan *macrosystem* - tempat terjadinya hubungan dan interaksi untuk membentuk pola yang mempengaruhi perkembangan manusia. Kerangka konseptual tersebut memungkinkan kita mempelajari anak-anak, keluarganya, sekolah, dan masyarakat sebagai sistem yang bergerak secara dinamis dipengaruhi oleh perubahan (*chronosystem*), seperti ekonomi, politik, dan teknologi.

Sistem mikro adalah lingkungan kecil tempat anak hidup di dalamnya. Berns (2004: 15) menyatakan bahwa sistem mikro anak merujuk kepada kegiatan dan hubungan penting dengan pihak lain yang dialami oleh anak dalam lingkungan kecil khusus, seperti keluarga, sekolah, teman sejawat, atau masyarakat. Keluarga merupakan lingkungan yang memberikan pengasuhan,



pengaruh, dan berbagai kesempatan. Anak yang tidak diasuh atau disayangi secara memadai akan bermasalah dalam perkembangannya. Selain oleh keluarga, anak akan dipengaruhi oleh teman sebaya, masyarakat atau tetangga dalam skala yang kecil.

Struktur dasar kedua adalah sistem meso, merupakan relasi antara dua atau lebih sistem mikro, seperti hubungan sekolah dan keluarga, atau keluarga dengan teman sejawat. Dampak dari sistem meso terhadap anak tergantung kepada intensitas hubungan yang terjadi. Bronfenbrenner mencontohkan anak yang pergi sendirian pada saat pertama masuk akan mengalami hubungan tunggal antara sekolah dan rumah, yaitu anak sendiri. Keterkaitan yang kecil antara rumah dan sekolah dalam hal nilai-nilai, pengharapan, dan pengalaman sosialisasi akan menyebabkan prestasi akademik anak tidak baik. Sebaliknya, bila hubungan keduanya kuat, maka anak akan mencapai prestasi akademik tinggi (Berns, 2004: 16).

Struktur dasar ketiga adalah sistem ekso. Berns (2004: 16) menyatakan bahwa ekso berarti di luar (*outside*), yaitu lingkungan tempat anak-anak tidak berpartisipasi aktif di dalamnya, tetapi ia memiliki pengaruh terhadap salah satu sistem mikro anak-anak. Contohnya, pekerjaan orangtua, kebijakan bupati, atau jaringan dukungan sosial orangtua. Pengaruh sistem ekso terhadap anak berlaku secara tidak langsung melalui sistem mikronya.

Sistem makro adalah konteks sosio-kultural yang lebih besar tempat anak hidup. Berns (2004: 17)

menyatakan bahwa sistem makro terdiri dari masyarakat dan subkultur yang dimiliki oleh anak, merujuk kepada sistem keyakinan, gaya hidup, pola interaksi sosial, dan perubahan hidup. Contohnya, budaya timur-barat, ekonomi nasional, budaya politik, etnis, status negara (berkembang atau industri). Ideologi demokrasi mempengaruhi bagaimana sekolah berkomunikasi dengan keluarga.

Sistem berikutnya adalah interaksi sistem ekologi sepanjang waktu atau sistem krono (*chronosystem*), yaitu proses evolusi sistem eksternal yang berlangsung sepanjang waktu atau pembentukan pola kejadian dan transisi lingkungan berlangsung sepanjang kehidupan. Perubahan temporal tersebut menghasilkan kondisi baru yang mempengaruhi perkembangan anak. Contohnya, penembakan di sebuah sekolah Colorado mempengaruhi prosedur keamanan dalam sekolah, menyebabkan pemasangan pendeteksi logam, pengangkatan penjaga keamanan (*satpam*), dan penerapan "zero tolerance" bagi siswa yang agresif (Berns, 2004: 19).

Wood & Attfield (2005: 103 – 104) menyatakan bahwa hubungan sosial, yang menurut Vygotsky dikatakan sebagai "mengajar", adalah suatu hubungan satu per satu antara ahli dan pemula, atau siswa dengan guru. Piaget menyatakan bahwa ketika seorang guru mengajarkan sesuatu secara prematur kepada siswanya, ia akan menjadi penghalang anak untuk memahami materi yang diajarkan dan berdampak anak tidak memahaminya secara utuh. Pembelajaran merupakan interaksi dua arah antara siswa dan guru. Dalam



pandangan teori sosio-kultural, anak dapat belajar dengan memanfaatkan motivasi internal dan kemampuan yang dimiliki, sertabelajar akan lebih efektif bila difasilitasi oleh orang yang lebih berpengetahuan dan didukung oleh lingkungan belajar.

Menurut Vygotsky, mengajar akan lebih efektif untuk meningkatkan prestasi siswa manakala bantuan diberikan dalam kerangka "ZPD", dan diberikan oleh orang yang lebih terampil, lebih berpengetahuan, dan lebih berpengalaman. Proses pembiasaan di TK akan lebih efektif apabila guru memiliki pemahaman yang memadai tentang teori belajar.

##### **5. Penilaian Hasil Belajar**

Penilaian merupakan bagian integral dari proses pembelajaran. Memahami dan mengetahui bagaimana cara menggunakannya secara tepat sangat penting agar pembelajaranberlangsung secara efektif. Penilaian membantu guru mengenali kelebihan dan kebutuhan peserta didik serta mengawasi kemajuannya manakala pembelajaran sedang dan telah berlangsung.

Chen & McNamee (Roopnarine & Johnson, 2011: 265) menyatakan bahwa salah satu tugas tersulit dan terpenting adalah bagaimana menilai anak-anak secara individual dengan tepat dan menggunakan hasil penilaian tersebut secara efektif untuk menginformasikan perkembangan belajar. Guru yang dapat menilai dengan baik akan menjadi guru yang lebih baik. Bila guru adalah penilai yang teliti, ia tahu apa yang telah dikuasai anak dan apa yang sedang mereka pelajari.

Penilaian adalah proses pengamatan, pencatatan, pemrosesan, dan pendokumentasian apa yang dilakukan

anak sebagai dasar untuk membuat keputusan pendidikan yang akan mempengaruhi anak, dan melaporkannya kepada pihak yang berkentingan (Morrison, 2012: 158). Direktorat Pembinaan PAUD (2011: 31 – 33) menyarankan agar penilaian di TK dilakukan melalui pengamatan, penugasan, unjuk kerja, pencatatan anekdot, percakapan/dialog, laporan orangtua, dan dokumentasi hasil karya anak (portofolio), serta deskripsi profil peserta didik. Informasi yang dikumpulkan mencakup seluruh tingkat pencapaian perkembangan peserta didik termasuk data tentang status kesehatan, pengasuhan, dan pendidikan. Informasi yang diperoleh perlu diolah, dilaporkan dan ditindaklanjuti.

#### **6. Sarana dan Prasarana**

Sarana pendidikan TK meliputi alat peraga, alat bermain di dalam dan di luar ruang kelas, bahan cetak, elektronik, dan lingkungan, sedangkan prasarana pendidikan TK meliputi lahan (tanah, halaman), bangunan dan perabotan. Agar dapat menyelenggarakan proses pendidikan yang memadai, sebuah TK dipersyaratkan oleh Direktorat Pembinaan PAUD (2011: 8 – 10) perlu memiliki sarana dan prasarana pendidikan minimal: (1) memiliki lahan/tanah minimal 300 m<sup>2</sup>, (2) lokasi pendirian memperhatikan faktor keamanan, kebersihan, ketenangan, dekat dengan pemukiman penduduk serta kemudahan aksesibilitas, (3) memiliki sekurang-kurangnya: (a) ruang kelas; (b) ruang kantor/Kepala TK; (c) ruang kegiatan bermain bebas; (d) ruang UKS; (e) ruang perpustakaan; (f) gudang; (g) dapur; (h) ruang kamar mandi/WC guru; (i) ruang kamar mandi/WC anak, (4) memiliki perabot, alat peraga dan alat permainan di luar dan di dalam ruangan.



## 7. Pembiayaan

Pemerintah atau yayasan badan penyelenggara TK bertanggung jawab atas pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan pendidikan di TK. Pemerintah dapat memberi bantuan kepada TK yang diselenggarakan masyarakat dalam bentuk dana, sarana dan prasarana pendidikan, tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil, dan bantuan lain disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan kemampuan daerah.

Komponen Pembiayaan meliputi : (a) gaji dan kesejahteraan guru serta tenaga kependidikan lainnya; (b) penyelenggaraan teknis edukatif termasuk kegiatan belajar mengajar, evaluasi dan kegiatan bimbingan; (c) pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan; (d) kegiatan penunjang antara lain kegiatan kemasyarakatan, kegiatan lomba, dan lain-lain; (e) biaya daya dan jasa (listrik, telepon, PAM dll); (f) biaya Perjalanan Dinas (Kepala TK, Guru, Tenaga TU dan Penjaga TK); (g) program khusus yang mengacu pada peningkatan mutu TK.

Penentuan besarnya dana yang dapat dihimpun dari masyarakat untuk membantupenyelenggaraan TK ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara sekolah dengan Komite TK. Jumlah dan alokasi dana TK dicatat dalam buku kas, digunakan sesuai dengan program dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, serta dipertanggungjawabkan setiap tahun anggaran atau tahun pelajaran kepada masyarakat/Komite TK/pemerintah.

## **8. Pengelolaan.**

Penyelenggaraan pendidikan TK perlu dikelola dengan administrasi yang baik agar dapat memberikan layanan yang berkualitas kepada peserta didik. Pengelolaan pendidikan TK lebih mengarah kepada manajemen internal lembaga yang mencakup empat kegiatan, yaitu (1) pengorganisasian lembaga. Pengelolaan penyelenggaraan TK dilaksanakan oleh suatu organisasi yang berstruktur rapi dan ramping sesuai dengan kebutuhannya; (2) rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah: setiap sekolah perlu menyusun suatu prediksi pendapatan atau pemasukan dan rencana pengeluaran atau penggunaan; (3) tata usaha dan administrasi keuangan sekolah: Prinsip utama kegiatan tata usaha dan administrasi keuangan adalah pengelolaan yang tertib, teratur dan bertanggungjawab, (4) kalender pendidikan: kalender pendidikan berkaitan erat dengan implementasi kurikulum.

### **C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Pendidikan TK**

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan Pendidikan TK diperoleh dari hasil wawancara kepada Orangtua/Wali Siswa, Guru TK, Kepala TK, dan Pengawas, serta hasil observasi terhadap keseharian TK. Para informan menyatakan bahwa semua elemen yang ada dalam TK saling berkaitan untuk mempengaruhi penyelenggaraan TK. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua klasifikasi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam TK sendiri yang mempengaruhi penyelenggaraan TK. Faktor internal merupakan potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh TK



untuk menghadapi berbagai tantangan dan ancaman dari pihak luar dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Faktor internal meliputi: (1) Sistem pendidikan yang dikembangkan oleh TK sehingga TK memperoleh kepercayaan dan memuaskan orangtua atau cocok dengan harapan mereka; (2) kualitas Sumber daya yang dimiliki oleh TK memiliki peran yang penting dalam penyelenggaraan TK: manajemen, mutu tenaga pendidik, kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana, serta sikap dan perilaku SDM; (3) Kepekaan dengan apa yang terjadi di sekitarnya, dan pengetahuan tentang berbagai aspek yang mempengaruhi kepercayaan konsumen, kemampuan memperhatikan dan mengikuti perkembangan di TK lain yang ada di sekitarnya; (4) Layanan merupakan unggulan, sehingga merasa layanan yang diberikan dapat disaingkan dengan TK yang lain, dan hasilnya sangat disenangi oleh *stakeholders*, mulai dari *cleaning service*, petugas administrasi, *assistant*, *educator*, dan *principal* semua harus membuat suasana TK menjadi nyaman; (5) penghargaan yang diterima tenaga pendidik dan kependidikan dan tingkat kesejahteraan yang dimiliki oleh tenaga pendidik dan kependidikan, (6) biaya pendidikan yang sesuai dengan layanan yang diberikan, transparan, akuntabel, dan terukur dalam pengelolaannya; (7) monitoring oleh kepala sekolah dan yayasan, serta mentoring yang dilakukan oleh kepala sekolah kepada guru dan guru senior kepada *educator* junior atau *assistant*; (8) kemampuan menghadapi persaingan yang ketat dengan lembaga sejenis, sehingga TK masih eksis sampai saat ini; (9) kemampuan *marketing* yang dilakukan pengelola TK sehingga dikenal oleh masyarakat sekitarnya.

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar TK yang mempengaruhi penyelenggaraan TK. Semua elemen yang berada di luar TK saling berkaitan untuk mempengaruhi



penyelenggaraannya. Faktor eksternal adalah keadaan atau situasi di luar TK yang merupakan tantangan atau ancaman bagi penyelenggaraan TK. Faktor eksternal tersebut adalah: (1) umpan-balik dari orangtua atau saran yang disampaikan oleh orangtua kepada pihak yayasan, kepala sekolah, dan guru perlu mendapatkan perhatian yang memadai dan bila perlu terus ditindaklanjuti; (2) kepercayaan dari luar atau masyarakat terhadap kualitas layanan dan lulusan yang dinilai bagus. Pengelola TK dapat menjaga mutu dan kualitas, dapat memberikan layanan yang baik sehingga konsumen puas dan memberikan kepercayaan kepada TK, sehingga mereka menitipkan anaknya ke TK dimaksud; (3) dukungan dari yayasan dan pemerintah, pihak yayasan menetapkan arah kebijakan yang jelas, dan pembagian tugas yang memadai, misalnya jika menyangkut kebijakan karyawan ditentukan oleh yayasan, tetapi untuk kebijakan operasional sehari-hari yayasan memberikan kewenangan penuh kepada *principal*; (4) kondisi lingkungan, yaitu potensi masyarakat atau animo peserta didik, atau kondisi TK lain yang berdekatan, tingkat ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat akan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kebermanfaatan pendidikan; dan (5) kebijakan dari pemerintah, misalnya ijin pendirian, ijin operasional, dan akreditasi harus diutamakan; dan bantuan dengan mengajukan proposal. TK yang belum berijin tidak boleh mengajukan usulan bantuan apapun.

Bila mempergunakan logika analisis SWOT, maka faktor internal adalah hal-hal yang dimiliki oleh TK yang bersangkutan. Faktor internal berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki TK. Pengelola dan para guru harus mampu memanfaatkan kekuatan dan mengurangi kelemahan sebagai instrumen untuk mempertahankan dan mengembangkan keberadaan TK. Faktor



eksternal adalah situasi dan kondisi yang berada di luar TK yang bersangkutan. Faktor eksternal merupakan kekuatan luar yang perlu diwaspadai karena dapat menjadi ancaman bagi keberadaan TK, tetapi juga sekaligus merupakan kesempatan untuk dimanfaatkan oleh kepala dan para guru dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan TK.

Faktor internal yang paling menonjol adalah sistem pendidikan yang dikembangkan oleh TK sehingga TK memperoleh kepercayaan dan memuaskan orangtua atau cocok dengan harapan mereka; dan kualitas Sumber daya yang dimiliki oleh TK memiliki peran yang penting dalam penyelenggaraan TK: manajemen, mutu tenaga pendidik, kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana, serta sikap dan perilaku SDM. Dengan demikian, para orangtua lebih mempertimbangkan sistem pendidikan yang ada di TK tersebut dan sumberdaya yang dimilikinya ketika mereka memilih TK untuk menyekolahkan anak-anaknya ketimbang pembiayaan yang harus dikeluarkan.

Para orangtua tidak terlalu memperhitungkan pembiayaan yang harus disediakan tetapi mereka lebih mempertimbangkan kualitas layanan yang akan diterima oleh anaknya. Mereka percaya bahwa pendidikan yang ada sangat dipengaruhi oleh sistem pendidikan yang dikembangkan dan sumberdaya yang mengawal penyelenggaraan pendidikan. Karenanya, keberlangsungan TK sangat tergantung kepada tingkat kepercayaan orangtua terhadap layanan pendidikan yang diberikan.

Faktor eksternal yang paling menonjol adalah (1) umpan-balik dari orangtua atau saran yang disampaikan oleh orangtua kepada pihak yayasan, kepala sekolah, dan guru perlu ditindaklanjuti; dan (2) kebijakan dari pemerintah, misalnya ijin

pendirian, ijin operasional, dan akreditasi harus diutamakan; dan berbagai bantuan untuk penyelenggaraan pendidikan.

Orangtua memiliki peran yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan TK. Sebagai lembaga yang menjembatani masa transisi antara kehidupan di rumah dan kehidupan di sekolah formal dan mengemban tugas sebagai pengantar budaya sekolah bagi anak-anak, TK tidak boleh meninggalkan keikutsertaan orangtua dalam penyelenggaraan pendidikan anak. Proses transisi akan berjalan dengan baik bila pentahapan prosesnya dilaksanakan secara cermat dan orangtua dilibatkan secara aktif. Anak perlu dipisahkan secara bertahap dari orangtua, karenanya Teori *Attachment* perlu diimplementasikan ketika proses transisi dilaksanakan.

Selain peran orangtua, kebijakan pemerintah memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pendidikan TK. Namun demikian, kebijakan pendidikan TK pada tataran implementatif masih banyak yang bersifat elitis karena belum mampu mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan seluruh kelompok. Walaupun ketika didisain kebijakan itu diusahakan bersifat populis karena ditujukan agar dapat mengatur kehidupan pendidikan seluruh lapisan masyarakat kabupaten Sleman, tetapi ketika diimplementasikan sebagian besar kebijakan pendidikan tersebut lebih memiliki dampak yang menguntungkan kelompok tertentu saja.

#### **D. Kaitan Paradigma, Teori, dan Kebijakan Pendidikan dengan Penyelenggaraan Pendidikan TK**

Pembahasan tentang kaitan paradigma pendidikan dan teori pendidikan, kebijakan pendidikan TK yang ditetapkan Pemerintah kabupaten Sleman dengan penyelenggaraan pendidikan TK akan mempergunakan dua pendekatan, yaitu (1) Teori Pergeseran



Budaya Prasekolah oleh Tobin, Wu, dan Davidson (1989), dan (2) Teori Pergeseran Paradigma PAUD oleh Woodhead (2006). Penggunaan kedua pendekatan diurutkan berdasarkan tahun kemunculan pendekatan tersebut.

a. Teori Pergeseran Budaya Prasekolah dari Tobin, Wu, dan Davidson (1989)

Tobin, Wu, dan Davidson melakukan riset tentang prasekolah di tiga negara dengan budaya yang berbeda, yaitu Jepang, China, dan Amerika Serikat. Hasil penelitian mereka dibukukan dengan judul "Preschool in three cultures: Japan, China, and the United States", dan diterbitkan pada tahun 1989. Tobin, Wu, dan Davidson meneliti tiga budaya prasekolah dan dinamika budaya 3 negara dalam kehidupan di setiap pendidikan prasekolahnya. Mereka mencatat adanya pergeseran budaya pada pendidikan prasekolah dan pada masyarakat di ketiga negara tersebut. Dalam pandangan komparatifnya, Tobin, Wu, dan Davidson menemukan bahwa terjadi keterkaitan pergeseran budaya yang terjadi di masyarakat di masing-masing negara dengan bentuk layanan prasekolah yang dilaksanakan.

Tobin, Wu, dan Davidson menjelaskan bahwa terjadi pergeseran bentuk layanan prasekolah, seperti membantu peningkatan keterampilan bahasa dengan cara yang berbeda-beda untuk setiap negara; pemaknaan prasekolah sebagai sekolah dengan penekanan pembekalan kemampuan akademik yang berbeda-beda di setiap negara; pergeseran pendekatan belajar pada anak karena adanya perubahan budaya baik di China maupun di Amerika Serikat.

Pergeseran budaya masyarakat menyebabkan perubahan layanan prasekolah. Ketiga negara mengalami pergeseran

peran dan jumlah anggota keluarga, dan cenderung mengarah ke orangtua tunggal anak tunggal. Pergeseran ini menyebabkan layanan pendidikan prasekolah di tiga negara lebih menekankan pada pembentukan anak untuk menjadi lebih mandiri. Perubahan sosio-ekonomi diakibatkan oleh revolusi industri dan revolusi budaya, pasca industri menyebabkan hubungan orangtua-anak menjadi lebih rumit. Kondisi ini menyebabkan orangtua menjadi gamang untuk menentukan layanan pendidikan prasekolah yang disediakan bagi anak-anaknya.

Pada masyarakat di ketiga negara terjadi pergeseran energi, perhatian, dan sumberdaya orangtua terhadap anak-anaknya karena jumlah anak di setiap keluarga mengalami penyusutan menuju ke dua atau satu anak. Di sisi lain, pendidikan prasekolah memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memperluas cakrawalanya melalui interaksi dengan sebaya, membuat teman, dan interaksi dengan orang dewasa bukan orangtuanya. Pendidikan prasekolah mengalami pergeseran peran menuju penyiapan anak untuk memasuki dunia yang lebih besar dari keluarganya, lebih kompetitif. Peran ibu mengalami pergeseran dari ibu rumahtangga menjadi ibu bekerja keluarga. Pergeseran tersebut menyebabkan perubahan pemilihan tipe prasekolah yang disediakan untuk anak-anaknya. Mengantisipasi jam kerja yang panjang, banyak orangtua yang menitipkan anaknya ke prasekolah penuh waktu.

Hubungan orangtua dan guru prasekolah mengalami pergeseran, dan pergeseran ini menyebabkan interaksi guru dan orangtua menjadi bervariasi. Di China, guru tidak bekerja untuk orangtua siswa, tetapi bekerja untuk negara sesuai mandat yang diberikan negara. Di Amerika Serikat, hubungan



orangtua-guru bervariasi dan kadang ambivalen. Di satu sisi menganggap guru sebagai pegawai madani, dan di sisi yang ada yang menganggap guru sebagai bawahan. Di Jepang, guru prasekolah berperan sebagai ibu pengasuh bagi muridnya.

Pergeseran juga terjadi pada karakteristik guru prasekolah yang berkualitas, ketiga negara sepakat bahwa guru berkualitas harus memahami dan menyukai anak-anak, serta pandai membujuk dan berperangai hangat. Ciri yang menonjol lainnya adalah wanita merupakan sebagian besar guru dan pengelola prasekolah. Budaya tersebut mempengaruhi dan membentuk anggapan masyarakat bahwa prasekolah adalah pengasuhan ibu. Prasekolah di ketiga negara menunjukkan realitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Karenanya, kualitas dan ketersediaan program prasekolah merupakan fungsi dari kemampuan dan keinginan orangtua dan pemerintah untuk membiayai pendidikan anaknya. Fungsi pendidikan prasekolah melestarikan atau mentransformasikan budaya masyarakatnya.

Hasil penelitian Tobin, Wu, dan Davidson cocok untuk diimplementasikan pada kajian kondisi dan situasi tiga tipe TK yang diteliti. Penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh ketiga TK disebabkan adanya pergeseran kebutuhan masyarakat, dan pergeseran paradigma dari para pengelola dan guru TK. Masyarakat kabupaten Sleman mengalami pergeseran peran keluarga sehingga mengubah kebutuhan pengasuhan anak. Fungsi pengasuhan bergeser dari ibu ke sekolah formal karena ibu banyak yang bekerja baik di perkotaan maupun pedesaan. Peluang karena pergeseran fungsi tersebut ditangkap oleh pihak swasta sehingga mereka menyediakan institusi pengganti peran ibu yang diperlukan.

Selain menuntut peningkatan kualitas pendidikan TK, masyarakat berkeinginan agar anak-anaknya memperoleh pendidikan TK yang tidak hanya membekali kemampuan dasar tetapi juga keterampilan keagamaan yang memadai. Pergeseran cara pandang masyarakat ini menyebabkan pergeseran paradigma pendidikan pada tingkat implementasi penyelenggaraan pendidikan. Namun demikian, tuntutan kemampuan calistung masih mendominasi harapan masyarakat walaupun hal itu tidak sesuai dengan peran dan fungsi TK. Hal ini yang menyebabkan perbedaan antara paradigma pendidikan dan praktik pendidikan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan TK karena mereka harus memenuhi tuntutan masyarakat tersebut.

TK IT "Harapan" memutuskan untuk menyediakan sekolah di lokasi yang sekarang karena tuntutan pangsa pasar dan menyediakan tempat bagi para ibu yang bekerja. TK "Riang-Bahagia" bermigrasi ke Darma Baru karena mengikuti orangtua yang dibidik untuk menitipkan anaknya. TK "Utama" memberikan layanan pendidikan selain karena kebijakan pemerintah juga karena adanya tuntutan dari masyarakat akan pendidikan yang berkualitas.

Kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah beserta perubahannya telah ikut mendorong pengembangan penyelenggaraan pendidikan TK. Kebijakan tersebut diantaranya persyaratan pendirian dan operasional pendidikan TK oleh masyarakat, penilaian mutu penyelenggaraan pendidikan TK melalui akreditasi, dan persyaratan dan sertifikasi guru TK disebabkan oleh perubahan tuntutan akan pendidikan yang berkualitas. Kebijakan tersebut telah mendorong penyelenggara TK terus berupaya untuk



meningkatkan penyelenggaraan pendidikan TK yang dikelolanya.

b. Teori Pergeseran Paradigma PAUD dari Woodhead (2006)

Memperkuat penggunaan hasil kajian Tobin, Wu, dan Davidson (1989) untuk mengkaji kaitan antara paradigma pendidikan TK, teori pendidikan TK, kebijakan pendidikan TK yang dikembangkan Pemkab Sleman dan penyelenggaraan pendidikan TK, peneliti menggunakan pemikiran Woodhead (2006). Woodhead menyiapkan naskah "Changing perspectives on early childhood: theory, research and policy" untuk diserahkan ke UNESCO. Ia mengkaji pergeseran paradigma pendidikan yang terjadi dalam penyelenggaraan PAUD di seantero dunia. Woodhead (2006: 4 - 5) menyatakan bahwa kebijakan dan praktik PAUD dibentuk oleh pergulatan pemikiran dan wacana dunia anak-anak. Peningkatan kualitas kehidupan anak-anak merupakan prioritas dunia internasional saat ini, hal ini ditunjukkan dengan adanya penelitian dan inisiatif kebijakan PAUD oleh berbagai pemerintah. Berbagai negara berupaya untuk meningkatkan program PAUD, diskusi dan penelitian tentang paradigma dan teori pendidikan anak usia dini, serta praktik PAUD terus digalakkan.

Woodhead (2006: 5 - 6) menyimpulkan bahwa tradisi riset dan teori PAUD ikut membentuk perkembangan praktik dan kebijakan PAUD. Paradigma pendidikan (dan pergulatannya) yang didominasi oleh golongan kaya berkaitan erat dengan sejarah perubahan ekonomi, pendidikan, dan sosial dari golongan minoritas di negara kaya menyebabkan pergeseran paradigma pendidikan dan memunculkan paradigma pendidikan baru berupa paradigma pendidikan hak asasi manusia yang berbasiskan keadilan sosial. Upaya

penelitian dan penetapan kebijakan tampak berfungsi sebagai penghubung dan kadang saling berkait antara implikasi hasil penelitian dan pembenaran simpulan penelitian terhadap kebijakan yang ditetapkan. Keduanya (riset dan kebijakan) membentuk dan dibentuk oleh pemikiran konteks politik, ekonomi, dan budaya PAUD, dan mengakomodasi perubahan ekonomi, politik, demografi, teknologi dan budaya global. Karenanya, berdasarkan hasil analisis atas teori pendidikan, praktik PAUD, dan perkembangan kebijakan PAUD dapat diklasifikasikan perspektif atau paradigma PAUD, yaitu paradigma perkembangan, paradigma ekonomi dan politik, paradigma sosial dan budaya, dan paradigma hak asasi manusia.

Hasil analisis Woodhead yang menyatakan bahwa praktik pendidikan dipengaruhi oleh kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah terungkap dalam wawancara dengan para guru, kepala sekolah dan pengawas di ketiga TK yang diteliti. Ketika ditanyakan empat faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan TK, mereka menjawab bahwa salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Penyelenggaraan pendidikan TK tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tentu saja, kebijakan pendidikan yang dikeluarkan dapat berpengaruh secara positif atau negatif terhadap keberadaan TK. Namun, kebijakan pendidikan TK yang dikeluarkan oleh Pemkab Sleman dirancang agar mampu meningkatkan kualitas persekolahan yang berada di bawah kendalinya. Tujuan tersebut sejalan dengan Cooper, Fusarelli, dan Randall (2004: 161) yang menyatakan bahwa sebuah kebijakan pendidikan dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas



pendidikan. Perbaikan tersebut dilakukan melalui cara penyediaan program dan staf yang lebih baik, standar dan kurikulum yang lebih kuat, dan hasil tes siswa dan angka kelulusan yang lebih tinggi agar persekolah menjadi lebih baik.

Semua TK baik negeri maupun swasta tidak ada yang tidak mematuhi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, terutama peraturan mengenai perijinan dan akreditasi, dan akhir-akhir ini kebijakan mengenai sertifikasi para guru. Tampaknya, TK yang ada memperoleh dampak positif dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Efektivitas implementasi kebijakan pemerintah sangat tergantung kepada kepiawaian para pengawas untuk mengawal berbagai kebijakan yang dikeluarkan. Keberadaan pengawas sangat penting dalam memperlancar komunikasi antara dinas dengan sekolah, terutama komunikasi TK swasta dan dinas. Pengawas memiliki kedudukan yang penting bagi TK, terutama bagi TK swasta.

Cooper, Fusarelli, dan Randall (2004: 148) mengingatkan bahwa kebijakan pendidikan yang dikeluarkan merupakan sebuah kebijakan yang tepat untuk memecahkan permasalahan pendidikan apabila pembuatan kebijakan pendidikan menggunakan pendekatan partisipatori. Dalam penyusunan kebijakan pendidikan, semua pemangku kepentingan perlu diperhatikan kepentingannya. Usulan seluruh pemangku kepentingan harus didengarkan dan dipertimbangkan secara cermat. Pengaturan tersebut tidak hanya mempertimbangkan dan menghormati hak tiga kelompok utama pemangku kepentingan pendidikan (pegawai pemerintah, orangtua, dan siswa) untuk berpartisipasi dalam penentuan kebijakan pendidikan, tetapi juga akan mengembangkan proses demokratisasi dalam pembuatan

kebijakan pendidikan dan memperkuat masyarakat yang demokratis. Menurut Fowler (2009) keberhasilan pelaksanaan kebijakan pendidikan di level sekolah akan sangat ditentukan oleh kepemimpinan sekolah, terutama kepemimpinan kepala sekolah.

Para guru dan penyelenggara pendidikan TK melaksanakan layanan pendidikan dilandasi oleh paradigma yang diyakininya. Hal ini sejalan dengan pemikiran Morrison (1988: 465) bahwa guru harus mengembangkan paradigma mengajar sebagai pedoman dalam melaksanakan praktik belajar mengajar dalam kelas. Praktik belajar mengajar yang dilandasi oleh paradigma akan menyebabkan guru lebih mantap, dan peserta didik mampu belajar lebih terarah dan mampu mengembangkan potensi secara menyeluruh.

Teori pendidikan yang dimanfaatkan oleh TK berkaitan dengan paradigma pendidikan yang dipergunakan oleh para penyelenggara pendidikan TK. Data dari 3 TK yang diamati menunjukkan bahwa penggunaan teori pendidikan sebagai landasan penyelenggaraan pendidikan di setiap TK dipengaruhi oleh pemahaman para pendidik dan pengelola terhadap paradigma pendidikan yang ada, dan difasilitasi oleh berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Di ketiga TK, keempat hal (paradigma, teori, kebijakan, dan penyelenggaraan) saling mempengaruhi dan saling terkait. Paradigma pendidikan yang dipergunakan mempengaruhi teori pendidikan, dan difasilitasi oleh kebijakan pendidikan. Teori pendidikan dipengaruhi oleh paradigma dan kebijakan pendidikan, sedangkan penyelenggaraan TK dilandasi oleh paradigma, teori, dan kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh pengelola dan Pemkab Sleman.



### **E. Penutup**

Berdasarkan pembahasan bab sebelumnya, serta mempergunakan hasil pembahasan, simpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut.

1. Contoh paradigma pendidikan yang dipergunakan sebagai landasan dalam penyelenggaraan pendidikan TK adalah (1) TK "Riang-Bahagia" memanfaatkan Paradigma "Hak Asasi Manusia, (2) TK "Utama" memanfaatkan Paradigma "Ekonomi dan Politik, (3) TK II "Harapan" mempergunakan Paradigma " "Sosial dan Budaya".
2. Contoh teori pendidikan yang dimanfaatkan oleh ketiga TK sebagai landasan dalam penyelenggaraan pendidikan adalah (1) TK "Riang-Bahagia" memanfaatkan Teori Sumberdaya Manusia; (2) TK "Utama" memanfaatkan Teori Rekonstruksionisme; (3) TK IT "Harapan" memanfaatkan Teori Revitalisasi Budaya. Namun demikian, para guru dan pengelola tidak menyatakannya secara eksplisit teori pendidikan yang dipergunakan dan agak kesulitan membedakan antara teori pendidikan dengan teori belajar dan teori psikologi.
3. TK "Riang-Bahagia" dan TK IT "Harapan" menggunakan Akta Notaris sebagai dasar pendirian institusinya, kemudian mengajukan ijin operasioan dan pendirian ke Dinas Dikpora berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Dikpora nomor 369/KPTS/2010 tentang persyaratan pendirian satuan pendidikan dan tatacara pendirian satuan pendidikan oleh masyarakat atau swasta sebagai landasan penyelenggaraan pendidikan. TK "Utama" didirikan dengan SK Bupati Sleman. Selain itu, ketiga TK menggunakan seluruh kebijakan pendidikan sebagai landasan penyelenggaraan pendidikan walau dengan tingkat kepatuhan yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

4. Implementasi kebijakan pendidikan oleh ketiga TK bervariasi. TK "Riang-Bahagia" baru mengajukan izin pendirian dan izin operasional walaupun tetap berupaya mengimplementasikan seluruh kebijakan Pemkab Sleman. TK "Utama" dan TK IT "Harapan" telah memperoleh akreditasi dari Dinas Dikpora dan memperoleh bantuan dari Dinas, terutama TK "Utama" yang mendapatkan alokasi dana tertentu. Semua kebijakan berupaya diimplementasikan oleh ketiga TK namun dengan tingkat keterlaksanaan yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Walaupun didisain untuk menjadi kebijakan yang populis tetapi pada tataran implementatif, kebijakan pendidikan menjadi elitis karena belum mampu menyentuh semua golongan dan terkonsentrasi pada bagian pendidikan TK tertentu. Implementasi kebijakan oleh setiap TK dimonitor oleh para pengawas.
5. Penyelenggaraan pendidikan di ketiga TK berlandaskan paradigma, teori dan kebijakan pendidikan yang dipahaminya. Penyelenggara ketiga TK berupaya untuk mengelola peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, pembelajaran, sarana dan prasarana, pembiayaan, serta pengelolaan dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun demikian, penyelenggaraan pendidikan di ketiga TK masih perlu diperluas agar layanannya dapat mencakup seluruh lapisan masyarakat yang ada.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arif Rohman & Teguh Wiyono. (2010). *Education policy in decentralization era*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Berns, Roberta M., (2004). *Child, family, school, community: Socialization and support*. 6th ed. Belmont, CA.: Wadsworth/Thompson Learning.
- Bretherton, Inge. (2010). "The origin of attachment theory: John Bowlby and Mary Ainsworth". Diunduh 29 Mei 2010 dari [http://www.psychology.sunysb.edu/attachment/online/inge\\_origins.pdf](http://www.psychology.sunysb.edu/attachment/online/inge_origins.pdf).
- Cherry, Kendra. (2010) "Background and key concepts of Piaget's theory." Diunduh 31 Mei 2010, dari: <http://psychology.about.com/od/piagets-theory/a/keyconcepts.htm>,
- Crain, William. (2007). *Teori perkembangan: Konsep dan aplikasi*. (Terjemahan Yudi Santoso). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Direktorat Pembinaan PAUD. (2011). *Petunjuk teknis penyelenggaraan taman kanak-kanak*. Jakarta: Dit Bin PAUD, Ditjen PAUDNI, Kemdiknas.
- Encyclopædia Britannica online*. (2009). "Kindergarten." In *Encyclopædia Britannica Online*: Diunduh 3 September 2009, dari: <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/318044/kindergarten>,
- Evans, Judith L. (2007). "Policy in support of young children: An introduction." *Presentation at Policy review workshop February 6-8, 2007. UNICEF/UNESCO*, Bangkok. Diunduh 31 Mei

2010, dari: <http://www.unescobkk.org/education/appeal/programme/themes/ecce/ecce-resources/regional.pdf>.

- Gardner, Howard. (2003). *Kecerdasan majemuk: Teori dalam praktik*. (Terjemahan Drs. Alexander Sindoro). Batam Center: Penerbit Interaksara.
- Haywood, Kathleen M., (1986). *Life span motor development*. 2<sup>nd</sup> ed. Champaign, IL.: Human Kinetics.
- Heydon, RM., & Ping Wang. (2006). "Curricular ethics in early childhood education programming: a challenge to the Ontario kindergarten program." *McGill Journal of Education* • vol. 41 no 1 winter 2006.
- Imam Barnadib. (1996). *Dasar-dasar Kependidikan: Memahami makna dan perspektif beberapa Teori Pendidikan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Imoto, Yuki. (2007). "The Japanese preschool system in transition". *Research in comparative and international education*, Vol. 2, No. 2, 2007. (88-101).
- Kelly, L.E., & Melograno, V.J. (2004). *Developing the physical education curriculum: An achievement-based approach*. Champaign, IL.: Human Kinetics.
- Ki Hadjar Dewantara. (2009). *Menuju mamisia merdeka*. Yogyakarta: Leutika.
- Knight, George R. (2007). *Filsafat pendidikan*. (Terjemahan Mahmud Arif). Yogyakarta: Penerbit Gama Media.
- Magill, Richard A. (1993). *Motor learning: Concepts and application*. 4<sup>th</sup> ed. Madison: WCB. Brown & Benchmark Publishers.



- Mansur. (2007). *Pendidikan anak usia dini dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moeslichatoen R. (2004). *Metode pengajaran di taman kanak-kanak*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Morrison, George S., (1988). *Early childhood education today*. 4<sup>th</sup> ed. Columbus: Merrill Publishing Company.
- Morrison, George S. (2012). *Dasar-dasar pendidikan anak usia dini (PAUD)*. (Terjemahan Suci Romadhona & Apri Widiastuti). Jakarta: PT. Indeks
- NoengMuhadjir. (2006). *Filsafat ilmu: Kualitatif & kuantitatif untuk pengembangan ilmu dan penelitian*. Edisi III revisi. Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasin.
- Nola, R., & Irzik, G. (2005). *Philosophy, science, education and culture*. Dordrecht The Netherlands: Springer.
- Nichols, Rachel. (2010). "Friedrich Froebel: Founder of the first Kindergarten". Diunduh 25 Mei 2010, dari: <http://hubpages.com/hub/Friedrich-Froebel-Founder-of-the-First-Kindergarten>.
- Nivala, V., dan Hujala, E. (eds.), (2002). *Leadership in early childhood education: Crosscultural perspectives*. Oulu: Oulu University Press. Diunduh 26 November 2008, dari: <http://herkules oulu.fi/isbn09514268539/html/x157.html>.
- O'neil, William F., (2008). *Ideologi-ideologi pendidikan*. Ed ke-2. (Terjemahan Omi Intan Naomi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Oswalt, Angela. (2010). "Parenting and child development of preschool children". Diunduh 25 Mei 2010, dari: [http://www.bhcmhmr.org/poc/center\\_index.php?id=462&cn=462](http://www.bhcmhmr.org/poc/center_index.php?id=462&cn=462).

Pemda DKI Jaya. (2002). "Pedoman standar pelayanan minimal (SPM) penyelenggaraan pendidikan TK." Diunduh tanggal 7 Juni 2011 dari: <http://mudarman.files.wordpress.com/2010/06/spm-tk-smp-02.pdf>

Pemkab Sleman. (2008). *Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) kabupaten Sleman tahun 2009*. Diunduh 15 Mei 2010 dari: [http://bappeda.slemankab.go.id/index.php?option=com\\_remository&Itemid=35&func=selectcat&cat=12&lang=english](http://bappeda.slemankab.go.id/index.php?option=com_remository&Itemid=35&func=selectcat&cat=12&lang=english).

\_\_\_\_\_. (2008). *Keputusan Bupati Sleman Nomor 185/Kep.KDH/A/2008 tentang Pendirian Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Model Kabupaten Sleman*.

\_\_\_\_\_. (2008). *Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 8 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman*.

\_\_\_\_\_. (2009). *Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman*.

\_\_\_\_\_. (2009). *Peraturan Bupati Sleman nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah*.



- \_\_\_\_\_. (2009). *Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS)*.
- \_\_\_\_\_. (2009). *Peraturan Bupati Sleman nomor 30 tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga*.
- \_\_\_\_\_. (2010). *Peraturan Bupati Sleman nomor 9 tahun 2010 tentang Anggaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah kabupaten Sleman 2011*.
- \_\_\_\_\_. (2010). *Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2011*.
- \_\_\_\_\_. (2011). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Sleman tahun 2011-2015*.
- Riant Nugroho. (2008). *Kebijakan pendidikan yang unggul: Kasus pembangunan pendidikan di kabupaten Jember 2000-2006*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Riant Nugroho. (2011). *Public policy: Dinamika kebijakan – analisis kebijakan – manajemen kebijakan*. Edisi ke-3. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Riegle, RP. (2008). "Educational paradigms: Visionary leadership for the information age". Diunduh 26 November 2008, dari: <http://people.coc.ilstu.edu/~priegle/wwwdocs/paradigm/welcome.htm>.
- Santrock, John W. (2007). *Psikologi pendidikan*. Edisi kedua. (terjemahan Tri Wibowo B.S.) Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Suyata. (2010). "Principles of research methods in Early childhood education: Multicultural approaches." *Paper for The International seminar on Early Childhood in and for Socio cultural diversity*. May 18-19, 2010 in Yogyakarta.
- Tilaar, HAR. (2004). *Paradigma baru pendidikan nasional*. ed. ke-2. Jakarta: Rineka Cipta.
- Woodhead, Martin. (2006). "Changing perspectives on early childhood: Theory, research and policy." *Background paper prepared for the education for all global monitoring report 2007 Strong foundations: early childhood care and education*. UNESCO. Diunduh 24 Mei 2010, dari: <http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001474/147499e.pdf>.
- Yuliani N. Sujiono. (2009). *Konsep dasar pendidikan anak usia dini*. Jakarta: PT. Indeks.
- Zamroni. (2007). *Pendidikan dan demokrasi dalam transisi (Prakondisi menuju era globalisasi)*. Jakarta: PSAP Muhammadiyah.